



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2022

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
INSPEKTORAT**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP. (0361) 9009245,9009246, Fax : (0361) 9009245

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung untuk Tahun 2021 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Badung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas. Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mangupura, 29 Maret 2022

Inspektur Kabupaten Badung,



Luh Suryaniti, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 198903 2 012

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,



Atas Asung Kerta Wara Nugraha dari Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati wajib menyusun Laporan Kinerja (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 merupakan laporan kinerja tahun terakhir dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021. Sesuai Visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yaitu “**Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera**” akan diwujudkan dengan 13 tujuan yang terdiri dari 20 sasaran strategis dan diukur dengan 21 indikator kinerja utama (IKU). Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung tahun 2021 berisikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat serta kepada masyarakat sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus meningkatkan efektivitas program/kegiatan (*refocusing program*) dengan mengutamakan program prioritas sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 untuk meningkatkan efisiensi anggaran melalui perubahan *mindset* dan penyelarasan program/kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *efektif, efisien, akuntabel* dan berorientasi pada hasil (*result oriented*). Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Badung mulai dirasakan manfaatnya hal ini tampak dari perubahan *mindset* dan disiplin ASN sebagai tuntutan dari budaya kinerja yang lambat laun mulai tumbuh dan akan terus kami dorong serta *efisiensi*

anggaran sebagai akibat adanya penyalarsan program/kegiatan dengan sasaran RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja khususnya kepada jajaran Kementerian PAN dan RB atas perhatian dan pembinaannya selama ini, untuk selanjutnya dengan komitmen dan kerja keras, kami bertekad untuk bisa lebih baik untuk mewujudkan implementasi akuntabilitas kinerja di Kabupaten Badung.

Sekian dan Terima kasih

Om Santih, Santih, Santih, Om

Mangupura, 29 Maret 2022

Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 dengan visi **“Memantapkan Arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”** terdiri dari 9 (sembilan) misi, 13 (tiga belas) Tujuan, 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU).

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran kinerja pada tahun 2021 dilakukan terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD. Hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2021 (sampai tanggal 11 Maret 2021) terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak bisa dan atau belum dapat diukur kinerjanya, yaitu:

- a. Indikator kinerja yang tidak dilaksanakan survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, sebanyak 2 IKU meliputi : **Indeks kerukunan umat beragama dan Indek Kebahagiaan**. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengukuran indikator ini oleh karena pengumpulan data harus dilakukan melalui survei, sehingga dengan kondisi pandemi COVID-19, kegiatan survei/pengumpulan data dari masyarakat tidak memungkinkan

untuk dilaksanakan dan adanya refocusing anggaran terhadap program/kegiatan/sub kegiatan.

- b. Indikator yang belum terbit hasil evaluasinya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) meliputi : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten** dan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** oleh kementerian PAN-RB serta **Opini BPK** masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

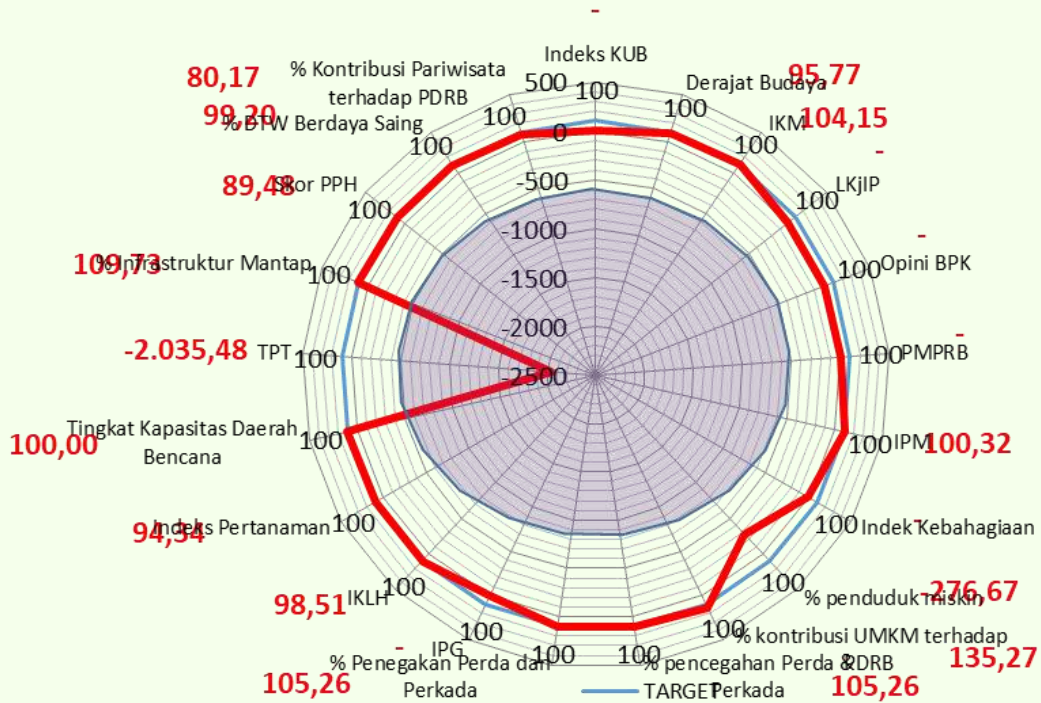
Hasil capaian kinerja tujuan RPJMD terhadap 17 indikator, rata-rata sebesar -105,10%. Hal ini disebabkan karena dua indikator dengan nilai minus sampai diatas 100% yaitu tingkat kemiskinan sebesar -276,67% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar -2.035,48%. Hasil pengukuran indikator tujuan sebanyak 17 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :

- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 6 indikator kinerja utama (35,29%)
- b. dibawah target (<100%) sebanyak 6 indikator kinerja utama (35,29%)
- c. Tidak ada Hasil pengukuran sebanyak 5 indikator kinerja utama (29,41%)

Capaian kinerja sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung untuk tahun 2021 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja secara keseluruhan dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai kinerja rata-rata sebesar -54,31%. Hal ini disebabkan karena dua indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu tingkat kemiskinan sebesar -276,67% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar -2.035,48% sehingga mempengaruhi nilai rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan. Hasil pengukuran terhadap 21 indikator kinerja utama diperoleh hasil seperti berikut :

- a. Melebihi target (>100%) sebanyak 7 indikator kinerja utama (33,33%)
- b. Sesuai target (100%) sebanyak 1 indikator kinerja utama (4,76%)
- c. dibawah target (<100%) sebanyak 8 indikator kinerja utama (38,10%)
- d. Tidak ada Hasil pengukuran sebanyak 5 indikator kinerja utama (23,81%)

Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 16 indikator menunjukkan indicator dengan capaian dibawah target yaitu sebanyak 8 indikator (50%) dan 8 indikator telah mencapai target atau diatas target ($\geq 100\%$) sebesar 50%.. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2016-2021 untuk tahun 2021 seperti berikut :



Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021 sebesar Rp. 1.119.108.803.765 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 904.057.417.689,86 sehingga persentase penyerapan sebesar 80,78%.

Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator tiap sasaran strategis seperti berikut :

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45	-	Tidak dilaksanakan survei
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90	86,19	95,77
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82	85,4	104,15
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01	-	Data Belum Terbit

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Data Belum Terbit
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75	-	Data Belum Terbit
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57	81,83	100,32
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	75,51	-	Tidak dilaksanakan survei
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40	2,62	-276,67
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91	10,70	135,27
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	95	100	105,26
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95	100	105,26
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76,13	95,53	125,48
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,40	68,37	98,51
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	235	221,69	94,34
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31	6,93	-2035,48
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58	99,39	109,73
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97	86,8	89,48

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00	74,4	99,20
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29,00	23,25	80,17
Total Kinerja							-868,93
Rata-rata Kinerja							-54,31

Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja yang < 100%, sehingga tidak menjadi hambatan dalam implementasi RPJMD semesta berencana 2021-2026 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian adat dan budaya melalui :
 - a. Pemberian bantuan kepada desa adat dalam pelaksanaan upacara yadnya pemberian bantuan kepada lembaga adat, lembaga kesenian, dan pelaku seni.
 - b. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada desa adat dan lembaga kesenian dengan crosscutting program dengan OPD lain dalam hal pelestarian adat, seni dan Budaya
 - c. Pemberian bantuan operasional terhadap subak di Kabupaten badung
 - d. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap seluruh subak yang ada di kabuapten badung
 - e. Adanya *crosscutting* program a OPD lainnya untuk pelestarian subak
 - f. pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan warisan budaya.

2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. Melaksanakan validasi data masyarakat miskin sebagai dampak pandemic covid 19
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar (pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan)
 - c. Pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP)
 - d. Penertiban, pembinaan dan rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan melalui :
 - a. Mengendalikan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
 - b. Mengurangi Daerah Rawan bencana dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - c. Memprioritaskan cara pengelolaan persampahan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Badung
 - d. Pemantauan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Badung
 - e. Membangun TPS 3R/TPA di tempat yang wilayah-wilayah desa/kelurahan yang sudah tersedia lahan
 - f. Membangun taman berkualitas internasional yang berwujud bersih dan hijau di Kabupaten Badung
 - g. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Melaksanakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks pertanian melalui :
 - a. Meningkatkan intensifikasi tanaman
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan
 - d. Pembangunan/rehab saluran irigasi/pengairan serta pembuatan embung untuk menampung air (pembangunan sumber-sumber air).

5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
 - b. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri
 - d. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)

- e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
 - f. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran
6. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani dengan indikator skor pola pangan harapan melalui:
- a. Meningkatkan sosialisasi mengenai keanekaragaman konsumsi makanan dan gizi seimbang.
 - b. Meningkatkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga memberi nilai tambah
 - c. Menumbuhkan gerakan generasi muda sebagai petani dan nelayan
 - d. Mengalakkan asuransi pertanian, meningkatkan pertanian organik.
 - e. Meningkatkan produksi hewani dan produksi ikan tangkap/budidaya
7. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing melalui:
- a. Penerapan Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment*) pada obyek wisata/DTW
 - b. Memperketat protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan obyek wisata destinasi atau atraksi budaya, dengan penyediaan kelengkapan protocol kesehatan bagi wisatawan, seperti masker *hand sanitizer* dan wastafel dan sumber daya manusia pariwisata. Penyediaan fasilitas kesehatan serta pelengkap lainnya seperti ruang karantina mandiri, *thermal detector, rapid test kit*.
 - c. Penyusunan kebijakan transportasi kepariwisataan untuk kepastian perjalanan wisatawan.
8. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui :
- a. Pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat seperti desa wisata
 - b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata pedesaan
 - c. Meningkatkan manajemen pengelolaan obyek wisata
 - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pedesaan
 - e. Mengadakan promosi obyek wisata secara elektronik atau melalui kegiatan gebyar wisata,
 - f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan obyek wisata dan lingkungannya.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1.1. Latar Belakang 1
	1.2. Gambaran Umum 3
	1.3. Gambaran Perekonomian 7
	1.4. Gambaran IPM 15
	1.5. Gambaran Pemerintahan 16
	1.6. Sumber Daya Manusia 20
	1.7. Sumber Daya Keuangan 22
	1.8. Isu Strategis 23
	1.9. Arah Kebijakan 24
	1.10. Ruang Lingkup 30
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 31
	2.1. RPJMD Semesta Berencana 2016 – 2021 31
	2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 37
	2.3. Perjanjian Kinerja 40
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 40
	3.1. Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja tahun 2021 43
	3.2. Analisis Capaian Kinerja 48
	3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan 157
	3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 160
	3.5. Prestasi/Penghargaan 162
BAB IV	PENUTUP 166
	4.1. Kesimpulan 166
	4.2. Upaya Perbaikan Kinerja 168

LAMPIRAN :

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021	172
Lampiran II	: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021	173
Lampiran III	: Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021	175
Lampiran IV	: Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2021	177
Lampiran V	: Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintahkabupaten Badung Tahun 2016-2021	179

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1	Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2021 4
Tabel 1.2	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung 4
Tabel 1.3	Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2021 6
Tabel 1.4	Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural di Kabupaten Badung Tahun 2021 17
Tabel 1.5	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021 20
Tabel 1.6	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepangkatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021 21
Tabel 1.7	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021 21
Tabel 1.8	Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021 22
Tabel 1.9	Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2021 23
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 33
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 39
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 41
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tujuan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 44
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 46
Tabel 3.3	Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2021 64
Tabel 3.4	Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang di Kabupaten Badung Tahun 2021 65
Tabel 3.5	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 67
Tabel 3.6	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 70
Tabel 3.7	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta efisiensi Anggaran dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 77
Tabel 3.8	Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020 84
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil Kabupaten Badung Tahun 2020 85

Tabel 3.10	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	88
Tabel 3.11	Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2021	99
Tabel 3.12	Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021	100
Tabel 3.13	Distribusi PDRB Kabupeten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021	104
Tabel 3.14	Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021	108
Tabel 3.15	Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021	111
Tabel 3.16	Jumlah Pelanggaran dan Pelanggaran yang Ditangani di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021	111
Tabel 3.17	Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2016-2021	115
Tabel 3.18	Indeks Pembangunan Gender menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021	116
Tabel 3.19	Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks Resiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021	131
Tabel 3.20	Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2021	132
Tabel 3.21	Rencana Tindak Lanjut Sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung Tahun 2022	134
Tabel 3.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2021	136
Tabel 3.23	Tingkat Pengangguran terbuka menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021	138
Tabel 3.24	Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan di Kabupeten Badung Tahun 2021	142
Tabel 3.25	Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan di Kabupeten Badung Tahun 2015-2021	146
Tabel 3.26	Target dan capaian Produksi Perikanan di Kabupeten Badung Tahun 2021	147
Tabel 3.27	Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupeten Badung Tahun 2021	150
Tabel 3.28	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Sarana Penunjang Pariwisata Di Kabupaten Badung Tahun 2021	151
Tabel 3.29	Distribusi PDRB Kabupeten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021	154
Tabel 3.30	Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran Kabupaten Badung Tahun 2021	158
Tabel 3.31	Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan di Kabupaten Badung Tahun 2021	160
Tabel 3.32	Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2021	163

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>	
Grafik 1.1	Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Mataharai di Kabupaten Badung Tahun 2021	5
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Badung tahun 2021	7
Grafik 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2021	8
Grafik 1.4	Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	9
Grafik 1.5	Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2015-2021	10
Grafik 1.6	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020	11
Grafik 1.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Badung tahun 2016-2021	12
Grafik 1.8	Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2021	13
Grafik 1.9	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	14
Grafik 1.10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara Menurut Asal Negara ke Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	15
Grafik 1.11	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2010-2021	16
Grafik 1.12	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung	17
Grafik 2.1	Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021	35
Grafik 2.2	Cascading dan Cross Cutting RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021	36
Grafik 3.1	Target dan Capaian Indiaktor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	57
Grafik 3.2	Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional tahun 2017-2019	57
Grafik 3.3	Perbandingan IKUB di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2016-2021	58
Grafik 3.4	Perbandingan Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019	59
Grafik 3.5	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021	60
Grafik 3.6	Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian	64

	budaya Tahun 2017-2021	
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	68
Grafik 3.8	Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	69
Grafik 3.9	Target dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	75
Grafik 3.10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020	76
Grafik 3.11	Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten Badung Tahun 2018-2020	76
Grafik 3.12	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	80
Grafik 3.13	Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	81
Grafik 3.14	Target dan Capaian indikator Kategori PMPRB dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	84
Grafik 3.15	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	87
Grafik 3.16	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021	89
Grafik 3.17	Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	90
Grafik 3.18	Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	91
Grafik 3.19	Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	93
Grafik 3.20	Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021	94
Grafik 3.21	Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2018, 2019 dan Indonesia Tahun 2021	95
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	97
Grafik 3.23	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	98
Grafik 3.24	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	104
Grafik 3.25	Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkd di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	107
Grafik 3.26	Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkd di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	110
Grafik 3.27	Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	114
Grafik 3.28	Perbandingan indeks pembangunan gender menurut	115

	Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021	
Grafik 3.29	Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	119
Grafik 3.30	Capaian Variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	120
Grafik 3.31	Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2021	121
Grafik 3.32	Target dan Capaian Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	124
Grafik 3.33	Target dan Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2017-2021	126
Grafik 3.34	Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2021	126
Grafik 3.35	Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2021	132
Grafik 3.36	Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2021	133
Grafik 3.37	Target dan Capaian Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	135
Grafik 3.38	Distribusi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2021	137
Grafik 3.39	Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	142
Grafik 3.40	Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021	145
Grafik 3.41	Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung dengan Nasional Tahun 2017-2021	145
Grafik 3.42	Target dan Capaian Indikator Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	149
Grafik 3.43	Perkembangan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2021	151
Grafik 3.44	Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupeten Badung Tahun 2017-2021	153
Grafik 3.45	Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	155
Grafik 3.46	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung Tahun 2021	156

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 3.1 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2021	59
Gambar 3.2 Capaian Prioritas, Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks resiko Bencana Kabupaten Badung Tahun 2021	127
Gambar 3.3 Indeks Resiko Bencana di Indonesia Tahun 2021	131



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kinerja dapat disusun berdasarkan penerapan manajemen kinerja dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pencapaian kinerja disajikan dengan informasi ketercapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung sesuai RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 kepada Presiden sesuai peraturan yang terbaru.

Dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Badung Tahun 2021, berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, untuk diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa



- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 12. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU)



1.1. Gambaran Umum

1.2.1 Gambaran Geografis

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali yang terletak dibagian tengah dan selatan dari pulau Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Batas wilayah

Kabupaten Badung berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar, Bangli dan Kota Denpasar di sebelah Timur, Kabupaten Tabanan disebelah barat serta Samudera Indonesia di sebelah Selatan.

Secara administratif, terbagi atas 6 wilayah kecamatan terdiri dari 46 desa dan 16 kelurahan. Dari seluruh kecamatan yang ada, kecamatan Petang merupakan kecamatan terluas dengan luas 115 Km² sedangkan kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas wilayah 17,52 km².

Disamping memiliki desa/kelurahan yang sering disebut desa dinas, terdapat 122 desa adat, 531 Banjar



adat dan Sekaa Teruna yaitu kelompok pemuda/pemudi (sekaa) yang bernaung dibawah desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Keberadaan desa dinas dan desa adat selama ini berjalan harmonis karena memiliki fungsi yang berbeda dimana desa dinas melayani administrasi pemerintahan sedangkan desa adat khusus melaksanakan fungsi pelestarian adat, agama dan budaya.



Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Banjar Dinas, dan Lingkungan Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Banjar Dinas	Jumlah Lingkungan
1.	Kuta Selatan	Jimbaran	3	3	27	36
2.	Kuta	Kuta	0	5	0	25
3.	Kuta Utara	Kerobokan	3	3	43	46
4.	Mengwi	Mengwi	15	5	133	57
5.	Abiansemal	Blakiuh	18	0	125	0
6.	Petang	Petang	7	0	51	0
TOTAL			46	16	379	165

Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021

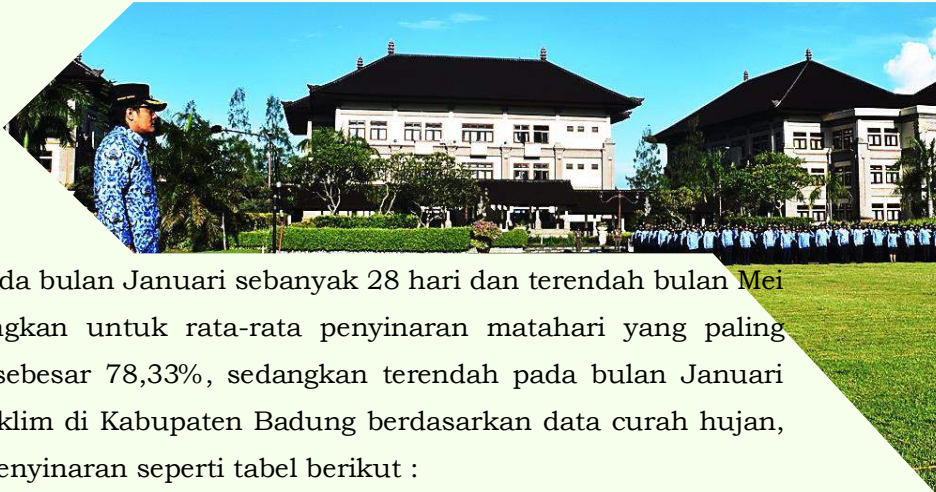
Secara geografis Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen luas wilayah Provinsi Bali, dengan wilayah terluas Kecamatan Petang sebesar 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan Kuta dengan wilayah terkecil, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung menurut kecamatan seperti pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Petang	115	27.48
TOTAL		418.52	100

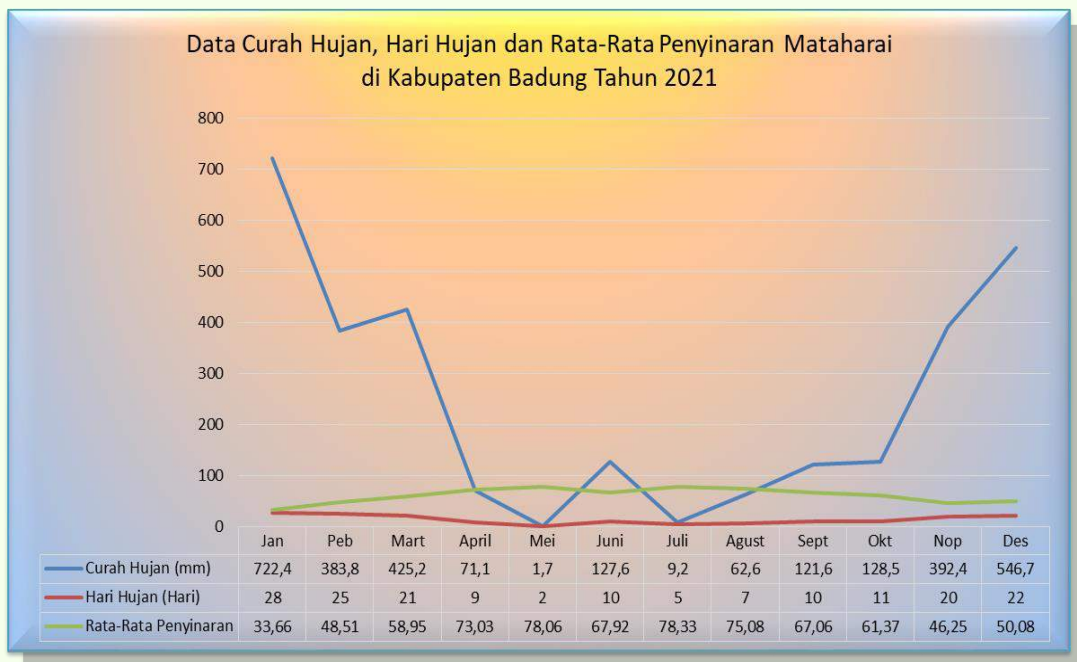
Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Badung mengalami 2 musim yaitu ; musim kemarau dan musim penghujan. Hal ini dipengaruhi oleh arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya uap air yang dikandungnya. Curah Hujan dengan kondisi normal sampai cukup tinggi. Curah hujan yang paling tinggi pada bulan Januari sebesar 722,40 mm dan Curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 1,7 mm. Sedangkan untuk



hari hujan paling tinggi pada bulan Januari sebanyak 28 hari dan terendah bulan Mei sebanyak 24 hari. Sedangkan untuk rata-rata penyinaran matahari yang paling banyak pada bulan Juli sebesar 78,33%, sedangkan terendah pada bulan Januari sebesar 33,66%. Kondisi iklim di Kabupaten Badung berdasarkan data curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran seperti tabel berikut :

Grafik 1.1
Data Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-Rata Penyinaran Mataharai
di Kabupaten Badung Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Badung Dalam Angka Tahun 2021

1.2.2 Gambaran Demografi

Penduduk Kabupaten Badung sampai dengan data semester II tahun 2021 sebanyak 512,485 jiwa, yang terdiri dari 255,508 jiwa penduduk laki-laki (49,86%) dan 256,977 jiwa penduduk perempuan (50,14%). Distribusi Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Mengwi yaitu sebanyak 129,198 jiwa atau 25,21% dari total penduduk Kabupaten Badung, sementara kecamatan Petang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 32,273 jiwa (6,30%). Jumlah penduduk menurut Kecamatan seperti tabel berikut :



Tabel 1.3

Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Jenis kelamin
di Kabupaten Badung Tahun 2018-2021

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK				
		LAKI	WANITA	2021	%	2020	2019	2018
1	Kuta	28,147	27,756	55,903	10,91	53.926	53.626	52.352
2	Mengwi	64,402	64,796	129,198	25,21	124.752	124.365	121.651
3	Abiansemal	48,309	49,121	97,430	19,01	94.289	94.200	92.391
4	Petang	16,249	16,024	32,273	6,30	31.225	31.196	30.812
5	Kuta Selatan	56,167	56,550	112,717	21,99	107.083	105.927	100.725
6	Kuta Utara	42,234	42,730	84,964	16,58	81.551	81.250	78.744
	Kabupaten	255,508	256,977	512,485	100,00	492.826	490.564	476.675

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung 2021

Pertambahan penduduk tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 19.659 orang. Distribusi pertumbuhan jumlah penduduk menurut kecamatan menunjukkan pertumbuhan penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 5.634 jiwa atau sebesar 28,66%, hal ini disebabkan oleh perpindahan penduduk pendatang karena pertumbuhan obyek wisata.

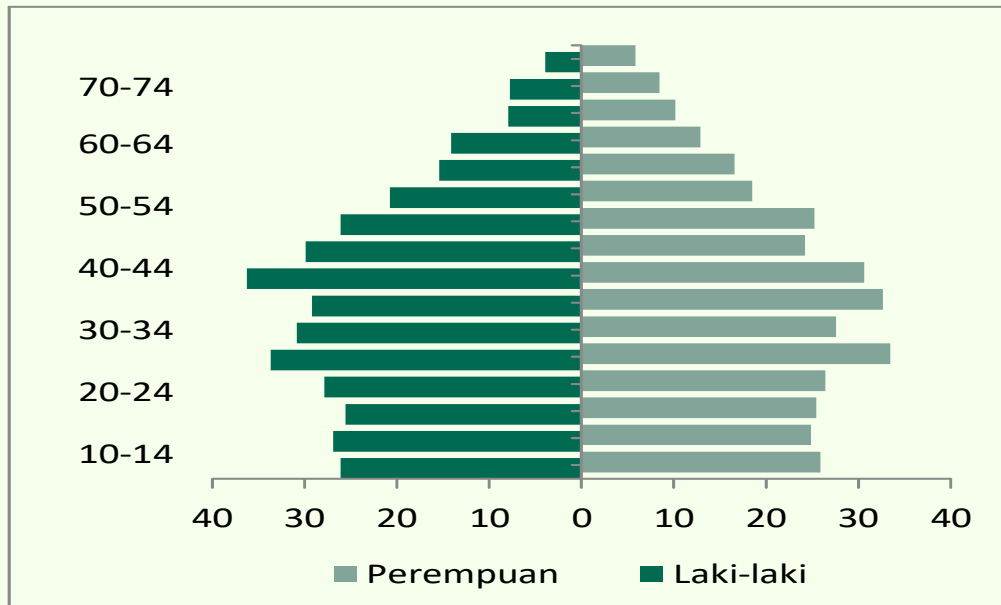
komposisi penduduk digambarkan dengan piramida penduduk. Pada dasarnya piramida penduduk adalah refleksi struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu wilayah. Struktur umur penduduk wilayah berkembang pada umumnya menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan usia dewasa. Hal ini diakibatkan oleh sedikitnya jumlah penduduk usia tua, serta tingkat kelahiran bayi yang tinggi, sehingga laju pertumbuhan penduduknya tinggi.

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Badung hasil proyeksi cenderung membentuk limas (*expansive*), seperti bentuk piramida penduduk wilayah berkembang pada umumnya. Tingkat kelahiran di Kabupaten Badung masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk pada kelompok umur muda dibandingkan pada kelompok umur di atasnya.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun. Adapun distribusi penduduk menurut kelompok umur secara lengkap seperti grafik berikut :



Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Badung tahun 2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, 2021

1.3. Gambaran Perekonomian

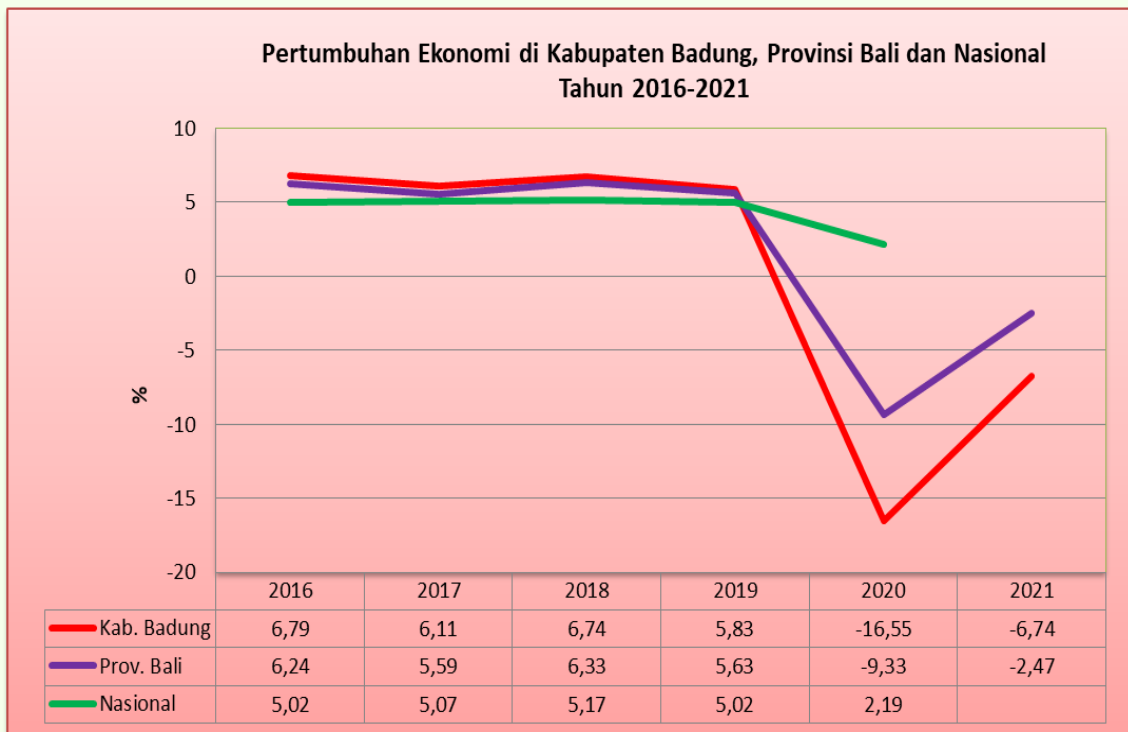
1.3.1. Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung tahun 2016 – 2018 rata-rata diatas 6% dan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Nasional, sedangkan untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dan tingkat Nasional cenderung menurun dan mulai tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Nasional turun secara signifikan mencapai 2,19. Untuk Provinsi Bali mengalami penurunan yang drastis diatas angka Nasional mencapai minus 9,33% dan Kabupaten Badung sebesar minus 16,55 dan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali sebesar minus 2,47 dan Kabupaten Badung sebesar minus 6,74, hal ini disebabkan karena perekonomian di Kabupaten Badung lebih dominan ditopang sektor pariwisata, sehingga dengan adanya pandemi COVID 19 sangat berpengaruh terhadap



pertumbuhan ekonomi. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional secara lengkap seperti grafik berikut :

Grafik 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tahun 2021

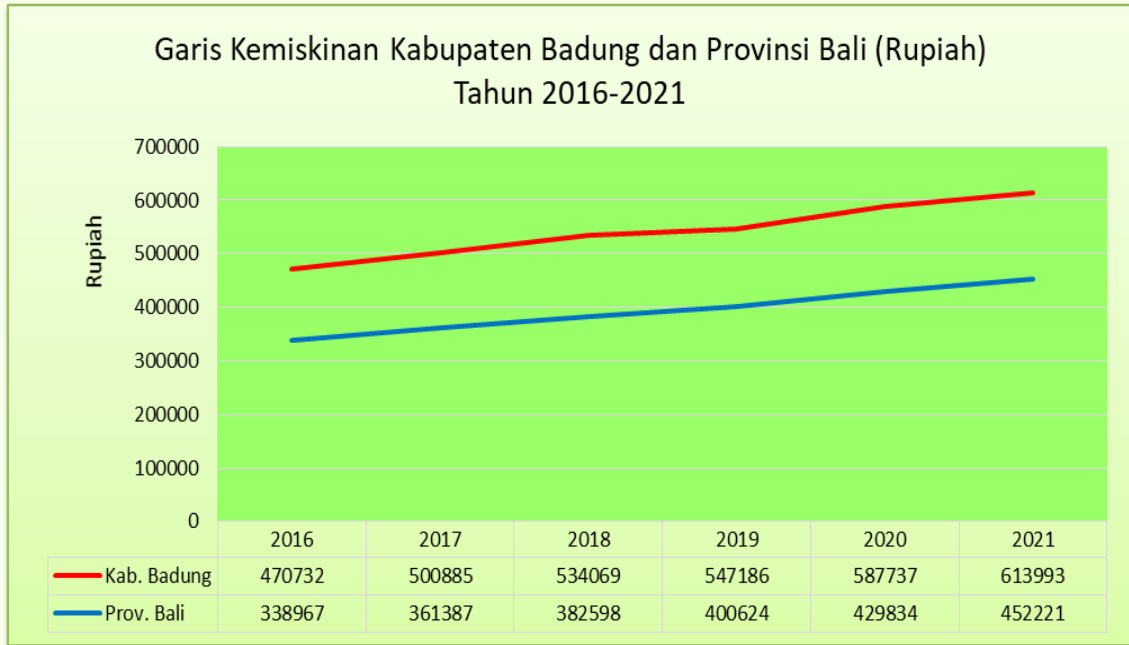
1.3.2. Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah atau lebih rendah dari besaran yang disebut sebagai Garis Kemiskinan. Batas pengelompokan garis kemiskinan Kabupaten Badung cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 454,916/kapita/bulan menjadi sebesar 613.993/kapita/bulan pada tahun 2021. Garis kemiskinan di Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali untuk tahun 2021 sebesar 452.221/kapita/bulan. Secara lengkap garis kemiskinan di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:



Grafik 1.4

Garis Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : Hasil Pengolahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2021

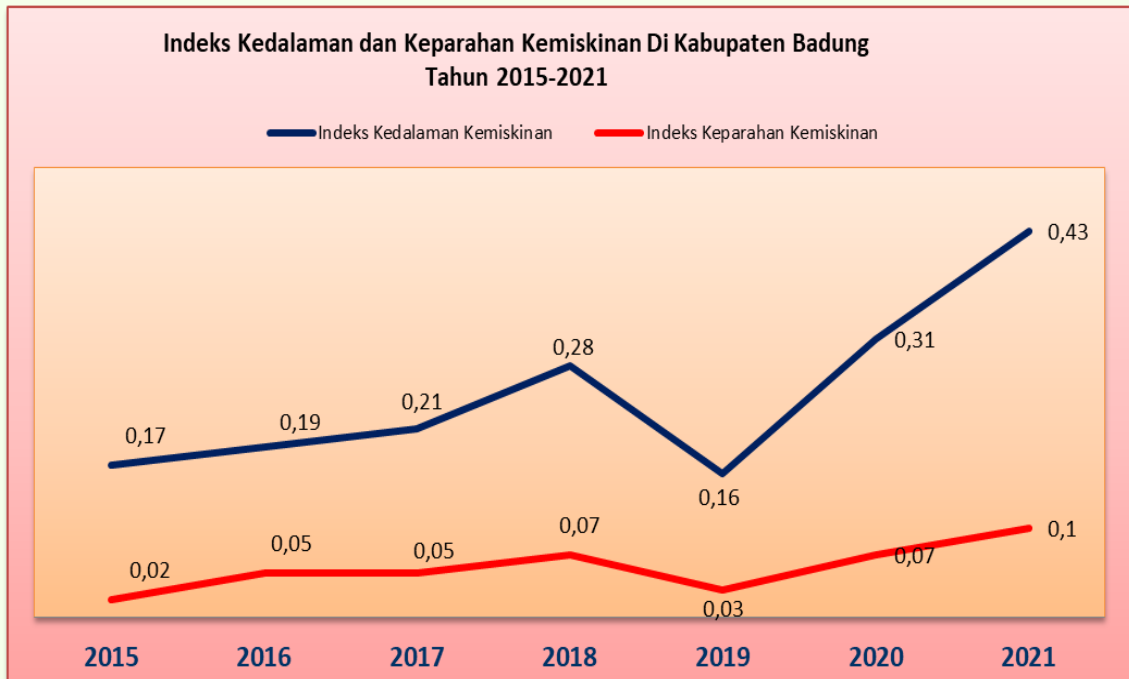
Indikator lain yang bisa disampaikan mendampingi indikator tingkat kemiskinan wilayah, di antaranya adalah indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)/*poverty gaps index* dimaksudkan untuk menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan atau jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Untuk mengetahui masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *poverty severity index*. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) dimaksudkan untuk menunjukkan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Badung periode tahun 2015-2021 menunjukkan bahwa indeks kemiskinan mengalami peningkatan linier dengan indeks kedalaman kemiskinan, namun tahun 2019 mengalami penurunan dengan indeks kedalaman kemiskinan 0,16 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,03. Selanjutnya untuk tahun 2020 sampai 2021, indeks kemiskinan mengalami peningkatan yang tajam melampaui periode sebelumnya, sehingga di tahun 2021



menjadi sebesar 0,43 untuk indeks kedalaman kemiskinan dan 0,1 untuk indeks keparahan kemiskinan. Secara rinci Perkembangan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.5
Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahhan Kemiskinan
di Kabupaten Badung Tahun 2015-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021

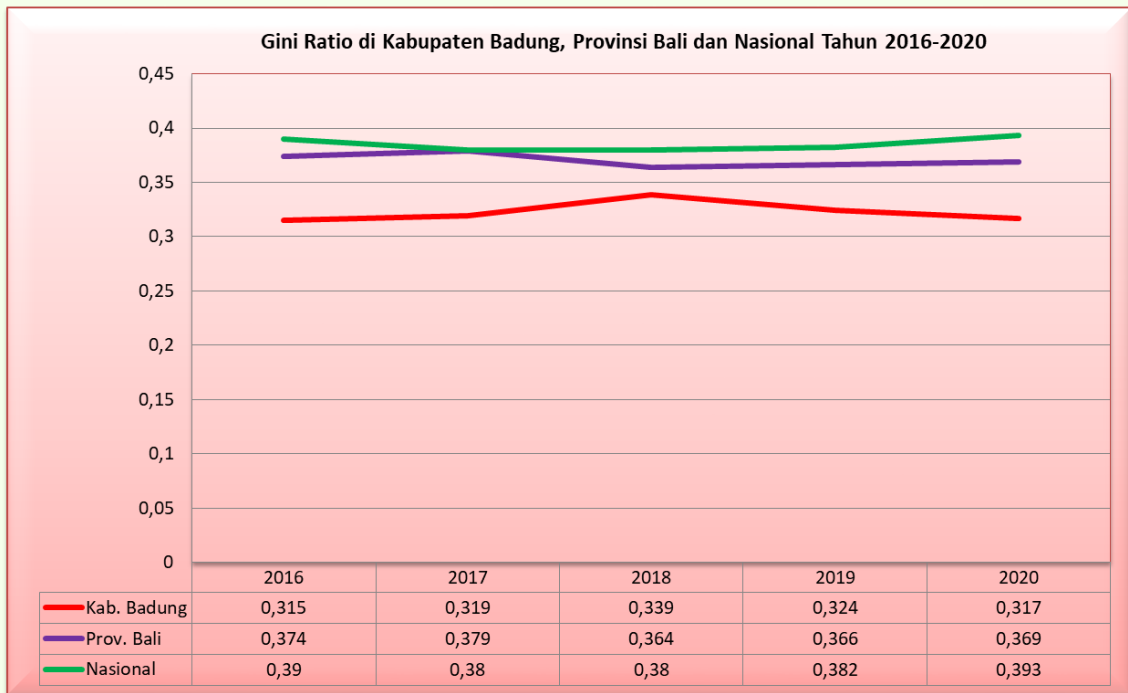
Indikator lain yang biasa juga disertakan mendampingi indikator kemiskinan di antaranya adalah ukuran ketimpangan pendapatan penduduk. Salah satu ukuran ketimpangan yang biasa digunakan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adapun kategori nilai indeks gini rasio yaitu: 0-<0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi. Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2015 hingga Tahun 2018 menunjukkan ketimpangan pendapatan tingkat rendah, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan meningkat. Sedangkan untuk Provinsi Bali dan Nasional termasuk dalam kategori ketimbangan sedang. Kondisi ini perlu diantisipasi



melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perkembangan gini ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016 - 2020 seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.6

Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius untuk mengendalikan kemiskinan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung yang pro rakyat seperti:

1. Program kesehatan yang menanggung semua masyarakat (*Universal Health Coverage*) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) serta Program Krama Badung Sehat yaitu program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Badung untuk pelayanan kesehatan diluar tanggungan JKN KIS.
2. Program Bedah rumah dan rehab rumah bagi masyarakat miskin
3. Program pemberian santunan lansia bagi masyarakat berumur diatas 72 tahun.
4. Program Santunan Kematian yaitu setiap masyarakat yang meninggal diberikan santunan kematian sekaligus akte kematian.
5. Program santunan penunggu pasien untuk masyarakat Badung yang anggota keluarganya mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit.



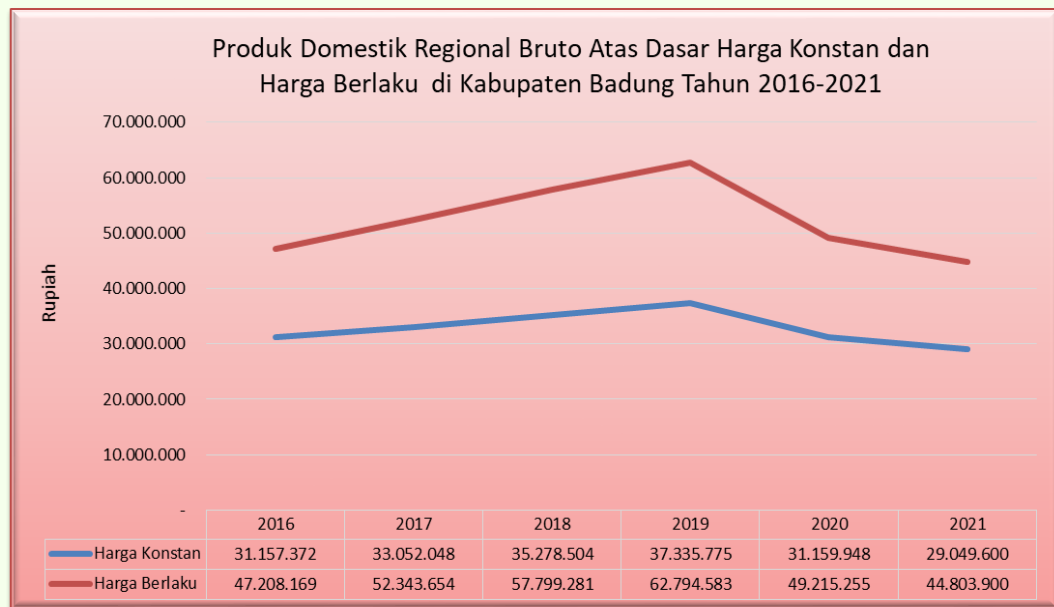
6. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB)
7. Program lainnya yang bersifat meringankan beban masyarakat untuk kegiatan sosial, budaya dan keagamaan.

1.3.3 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Gambaran PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2016-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 1.7
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Badung tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021



Nilai PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku pada tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan secara linier setiap tahunnya, namun pada tahun 2020-2021 mengalami nilai penurunan yang signifikan. Angka PDRB tahun 2015-2019 berdasarkan harga konstan 2010, mengalami kenaikan, Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi diatas 6 (enam) persen serta meningkatnya produksi dan adanya inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Badung tahun 2020-2021 mengalami penurunan disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga berdampak pada menurunnya produksi serta pertumbuhan ekonomi.

1.3.4. Gambaran Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15-65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat.

Ukuran untuk menilai keberhasilan dalam ketenagakerjaan, salah satunya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 berfluktuatif, namun di tahun 2020 sebesar 6,92% dan tahun 2021 sebesar 6,93% artinya mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya serta melampaui angka Provinsi Bali dan Nasional. Gambaran tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 seperti tabel berikut:

Grafik 1.8
Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2021

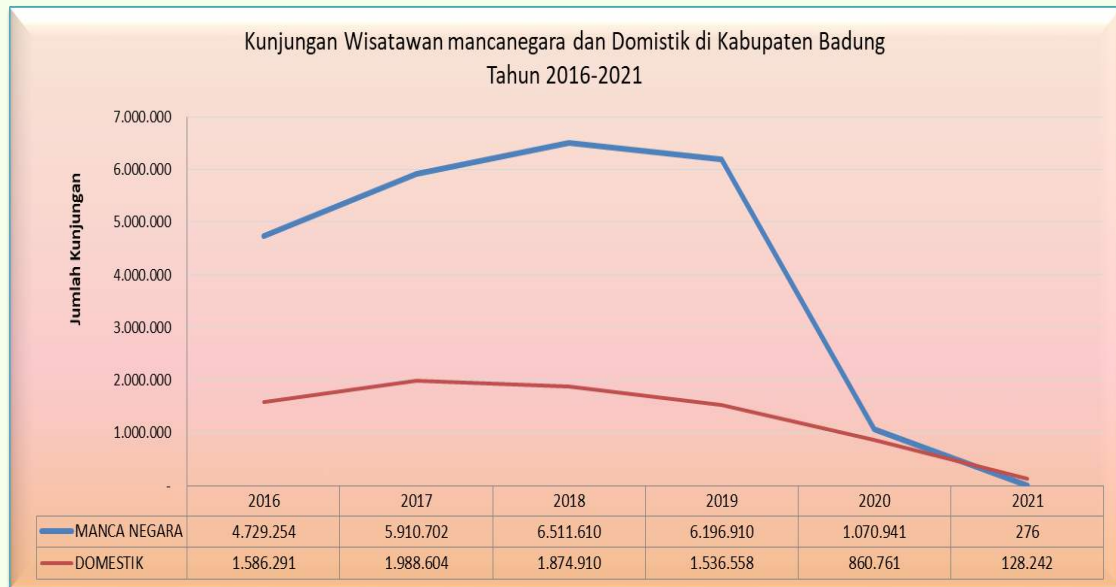


1.3.5. Gambaran Kepariwisataan

Kabupaten Badung merupakan pusat pengembangan dan tujuan wisata di Bali dan Nasional, karena memiliki banyak kawasan destinasi wisata yang sudah terkenal di manca negara. Perkembangan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mengalami perkembangan yang meningkat sejak tahun 2016-2021 dan mencapai puncak pada tahun 2018 dengan kunjungan wisatawan sebanyak 8.386.520 orang dan tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemik covid-19, dengan pembatasan bepergian antar daerah dan antar negara. Kunjungan wisatawan manca Negara mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana sebelum pandemic covid-19 kunjungan 4-6 juta per tahun dan selama pandemic covid-19 di tahun 2021 hanya sebanyak 276 wisatawan. Perkembangan kunjungan wisatawan manca negara dan domestik ke Kabupaten Badung seperti pada grafik berikut :

Grafik 1.9

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

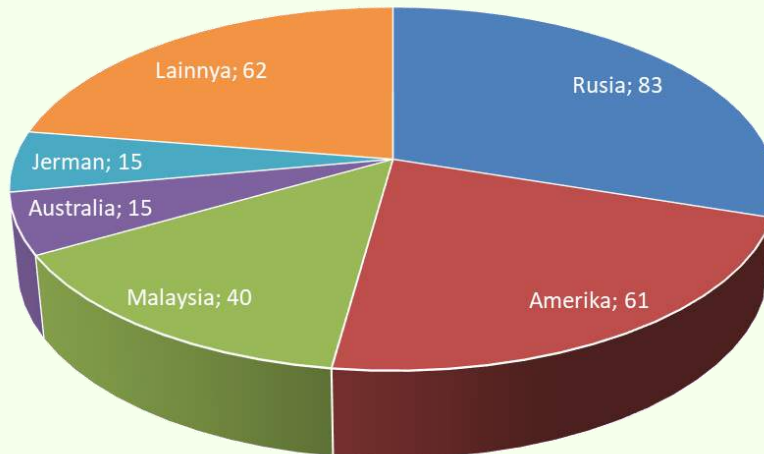


Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung 2021

Kunjungan wisatawan ke Badung pada tahun 2021 didominasi wisatawan domestik. Sedangkan wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung berasal dari Negara Rusia sebanyak 83 orang. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung pada tahun 2021 secara rinci seperti pada grafik berikut :



Grafik 1.10
Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara Menurut Asal Negara
ke Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



1.4. Gambaran IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Badung tahun 2010-2021 menunjukkan kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan di tahun 2021 sebesar 81,83 termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Perkembangan secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung dari tahun 2010-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 1.11

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung Tahun 2010-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, 2021

1.5. Gambaran Pemerintahan

Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan kabupaten, serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka susunan perangkat daerah telah mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai potensi daerah. Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Badung seperti gambar berikut :



Grafik 1.12

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung



Berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan mengacu prinsip efektivitas dan efisiensi serta Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Dibandingkan tahun 2016, jumlah Perangkat Daerah mengalami pengurangan dari 53 menjadi 38 Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sekretariat, 1 Inspektorat, 7 badan, 21 Dinas, 6 kecamatan dan 1 (satu) RSUD.

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPT yang dibentuk terdapat satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 sebanyak 877 jabatan struktural. Secara lengkap jumlah, tipe dan jumlah jabatan struktural/eselon seperti tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah, Tipe dan Jumlah Jabatan Struktural
Di Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
1	Sekretariat Daerah;	A	1	6	12			36	55
2	Sekretariat DPRD;	B		1	3			9	13
3	Inspektorat;	A		1	5			3	9
4	Dinas Pariwisata;	A		1	1	4		15	21
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;	A		1	1	4		15	21
6	Dinas Kebudayaan;	A		1	1	4		15	21



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	A		1	1	8	27		37
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;	A		1	1	5	18		25
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;	A		1	1	4	15		21
10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;	A		1	1	4	15		21
11	Dinas Pertanian dan Pangan;	A		1	1	6	21		29
12	Dinas Komunikasi dan Informatika;	A		1	1	5	18		25
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;	A		1	1	4	15		21
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;	A		1	1	4	15		21
15	Satuan Polisi Pamong Praja;	A		1	1	4	15		21
16	Dinas Kesehatan;	A		1	1	4	15		21
17	Dinas Sosial;	B		1	1	3	11		16
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;	B		1	1	5	17		24
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	B		1	1	3	11		16
20	Dinas Perikanan;	B		1	1	3	11		16
21	Dinas Perhubungan;	B		1	1	3	11		16
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	B		1	1	3	11		16
23	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan; dan	B		1	1	3	11		16
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;	B		1	1	3	11		16
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	A		1	1	4	15		21
26	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;	B		1	1	3	8		13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	B		1	1	3	11		16
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan	C		1	1	2	6		10



NO	PERANGKAT DAERAH	TIPE	ESELON						JUM LAH
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
29	Badan Penelitian dan Pengembangan;	C		1	1	2	8		12
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;			1		4	11		16
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;			1	1	3	9		14
32	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	C			1	4		8	13
33	Kecamatan Petang;	A			1	1	5	2	9
34	Kecamatan Abiansemal;	A			1	1	5	2	9
35	Kecamatan Mengwi;	A			1	1	5	2	9
36	Kecamatan Kuta Utara;	A			1	1	5	2	9
37	Kecamatan Kuta; dan	A			1	1	5	2	9
38	Kecamatan Kuta Selatan.	A			1	1	5	2	9
39	Kel. Kapal						1	4	5
40	Kel. Abianbase						1	4	5
41	Kel. Lukluk						1	4	5
42	Kel. Sading						1	4	5
43	Kel. Sempidi						1	4	5
44	Kel. Kerobokan Kaja						1	4	5
45	Kel. Kerobokan						1	4	5
46	Kel. Kerobokan Kelod						1	4	5
47	Kel. Seminyak						1	4	5
48	Kel. Legian						1	4	5
49	Kel. Kuta						1	4	5
50	Kel. Tuban						1	4	5
51	Kel. Kedonganan						1	4	5
52	Kel. Benoa						1	4	5
53	Kel. Tanjung Benoa						1	4	5
54	Kel. Jimbaran						1	4	5
55	UPTD						55	55	110
			II a	II b	III a	III b	IV a	IV b	
	TOTAL JUMLAH		1	36	54	117	530	139	877

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021



1.6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Badung menurut perangkat daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 7.204 orang. Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Badung dalam 2 (dua) tahun telah berkurang sebanyak 1.008 orang. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara lengkap seperti berikut:

1.6.1. Distribusi Menurut Pendidikan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan tercatat tahun 2021, tingkat pendidikan yang paling banyak sarjana (S1/S2/S3) sebanyak 4.4780 orang (66,35%) sedangkan yang paling kecil dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) sebanyak 37 orang (0,51%).

Tabel 1.5
Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut tingkat pendidikan
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2021				2020	2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%		
1.	SD	28	9	37	0,51	60	74
2.	SLTP	84	13	97	1,35	147	175
3.	SLTA	1002	460	1462	20,29	1552	1761
4.	DIPLOMA I/II	49	59	108	1,50	134	187
5.	DIPLOMA III/IV	138	582	720	9,99	722	663
6.	S1/ S2/S3	2165	2615	4780	66,35	5013	5352
	Jumlah	3466	3738	7204	100,00	7628	8212

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2021

1.6.2. Distribusi Menurut Kepangkatan

Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan tercatat, kepangkatan pegawai yang paling banyak golongan III/a sebanyak 1.203 orang (16,70%) sedangkan pegawai dengan kepangkatan I/a tidak ada. Distibusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut kepangkatan seperti berikut :



Tabel 1.6
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Kepegangatan
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO	GOLONGAN	2021				2020	2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%		
1	I/a	0	0	0	-	0	2
2	I/b	3	5	8	0,11	10	10
3	I/c	14	3	17	0,24	19	31
4	I/d	27	3	30	0,42	39	52
5	II/a	101	42	143	1,99	180	209
6	II/b	127	36	163	2,26	171	264
7	II/c	247	147	394	5,47	585	752
8	II/d	515	246	761	10,56	592	444
9	III/a	528	675	1203	16,70	1247	1250
10	III/b	235	361	596	8,27	896	1179
11	III/c	438	642	1080	14,99	947	855
12	III/d	425	671	1096	15,21	1073	1019
13	IV/a	377	369	746	10,36	881	1242
14	IV/b	386	517	903	12,53	936	863
15	IV/c	39	21	60	0,83	47	38
16	IV/d	4	0	4	0,06	5	2
		3466	3738	7204	100,00	7.628	8.212

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2020

1.6.3. Distribusi Menurut Eselon

Distribusi Aparatur Sipil Negara menurut jabatan (eselon) seperti tabel berikut:

Tabel 1.7

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jenjang Jabatan
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO	ESELON	2021				2020	2019
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%		
1.	Eselon II	34	3	37	4,45	32	27
2.	Eselon III	123	53	176	21,18	162	180
3.	Eselon IV	353	254	607	73,04	589	645
4.	Eselon V	6	5	11	1,32	12	18
	Jumlah	516	315	831	100	795	870

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2021



Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut eselon tahun 2021, tercatat pegawai dengan jabatan eselon yang paling banyak eselon IV sebanyak 607 orang (73,04%) sedangkan yang paling kecil dengan eselon V sebanyak 11 orang (1,32%).

1.6.4. Distribusi Menurut Jenjang Jabatan

Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan tercatat, jabatan yang paling banyak adalah fungsional umum/staf sebanyak 3.307 orang (45,91%) sedangkan yang paling kecil dengan jabatan struktural sebanyak 831 orang (11,54%). Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut jenjang jabatan seperti table berikut:

Tabel 1.8
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut status jabatan
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO	JABATAN	2021				2020		2019	
		LAKI	WANITA	JUMLAH	%	JML	%	JML	%
1.	Struktural	516	315	831	11,54	795	10,42	870	10,59
2.	Fungsional Tertentu	1035	2031	3066	42,56	3089	40,50	3259	39,69
3.	Fungsional Umum/Staf	1915	1392	3307	45,91	3744	49,08	4083	49,72
	Jumlah	3466	3738	7204	100,00	7628	100,00	8212	100,00

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Peningkatan SDM Kab. Badung Tahun 2019-2021

1.7. Sumber Daya Keuangan

Anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan target pendapatan sebesar Rp. 2.960.242.418.923,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.707.595.408.858,96 atau sebesar 91,47%. Sedangkan belanja direncanakan sebesar Rp. 3.268.403.627.706,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.811.514.572.382,20 atau sebesar 86,02%. Distribusi Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 secara rinci seperti tabel berikut :

Tabel 1.9
Realisasi APBD Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Pendapatan	2.960.242.418.923,00	2.708.124.519.192,96	91,48
	Pendapatan Asli Daerah	1.972.103.054.321,00	1.750.450.712.030,68	88,76
	Pendapatan Transfer	903.634.834.602,00	866.887.036.895,25	95,93
	Lain-lain Pendapatan yang sah	84.504.530.000,00	90.786.770.267,03	107,43
2	Belanja	3.268.403.627.706,00	2.810.667.656.353,20	85,99
	Belanja Operasi	2.550.252.078.870,00	2.169.432.919.549,48	85,07
	Belanja Modal	158.956.876.514,00	133.501.454.492,45	83,99
	Belanja Tak Terduga	294.566.533.858,00	280.264.299.890,27	95,14
3	Belanja Transfer	264.628.138.464,00	227.468.982.421,00	85,96
	Surplus/(defisit)	-308.161.208.783,00	-102.543.137.160,24	33,28
	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembayaran	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00
	Pembiayaan Netto	308.161.208.783,00	308.167.875.451,64	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0,00	205.624.738.291,40	0,00

Sumber data Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2021 (*unaudited*)

1.8. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pembangunan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, maka tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penyebab akar permasalahannya.

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan



permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pada tahun 2021 dalam upaya pencapaian target tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021, antara lain :

1. Peningkatan penanganan pandemi covid-19 melalui peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan daya beli serta penanganan masalah sosial. Pandemi COVID 19 telah menimbulkan *multifier effect* terhadap segala aspek kehidupan termasuk kesehatan, sosial serta ekonomi.
2. Adanya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
3. Penurunan kunjungan pariwisata mancanegara dan domestik yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
4. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan sosial.
5. Peningkatan kualitas pelayanan dasar/publik berbasis teknologi informasi.
6. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1.9. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan daerah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.



- b) Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c) Revitalisasi adat, dan karya seni.
- d) Restorasi warisan budaya daerah.
- e) Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- g) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
- h) Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
- i) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a) Mempercepat proses pelayanan publik yang prima (tepat, cepat, akurat) didukung teknologi informasi.
- b) Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- c) Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
- d) Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government.

Arah Kebijakan :

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
- b) Melakukan Evaluasi Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c) Meningkatkan integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
- d) Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
- e) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- f) Meningkatkan kualitas bantuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- g) Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- h) Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
- i) Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

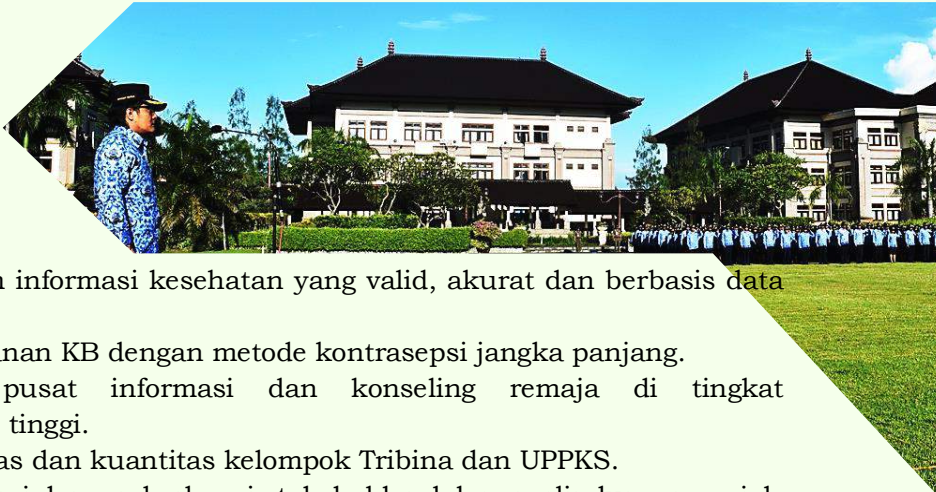


- j) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- k) Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bimtek/sejenisnya terhadap PNS.
- l) Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
- m) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Arah Kebijakan :

- a) Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b) Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c) Memantapkan mutu pendidikan dasar mendukung wajar 12 tahun.
- d) Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
- e) Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
- f) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
- g) Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- h) Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
- i) Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.
- j) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- k) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- l) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- m) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- n) Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- o) Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- p) Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- q) Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- r) Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- s) Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- t) Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta perawatan kesehatan masyarakat.
- u) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- v) Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.



- w) Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- x) Peningkatan pelayanan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang.
- y) Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/perguruan tinggi.
- z) Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- aa) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- bb) Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- cc) Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b) Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b) Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c) Penegakan Hukum dan HAM.
- d) Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e) Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a) Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c) Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d) Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e) Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f) Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h) Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i) Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j) Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k) Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.



- l) Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m) Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- n) Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- o) Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- p) Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- q) Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
- r) Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a) Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
- b) Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
- c) Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor.
- d) Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial (Perjanjian Kerja Sama).
- e) Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
- f) Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
- g) Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- h) Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)
- i) Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- j) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
- k) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- l) Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a) Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b) Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah.
- c) Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah.
- d) Optimalisasi ketersediaan sumber daya air.
- e) Mempertahankan kesuburan tanah.
- f) Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g) Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.



- h) Meningkatkan kesejahteraan petani
- i) Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- j) Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata
- k) Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- l) Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga.
- m) Pelestarian plasma nutfah tanaman langka.
- n) Mengembangkan Pertanian Organik.
- o) Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian.
- p) Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
- q) Memantapkan program Badung Go Organik .
- r) Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan.
- s) Peningkatan infratraktur pertanian.
- t) Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani.
- u) Menyusun regulasi tentang penampungan dan pemasaran hasil pertanian.
- v) Mengembangkan pariwisata alternatif
- w) Peningkatan kualitas DTW dan desa wisata sesuai standar kepariwisataan.
- x) Melaksanakan promosi pariwisata.
- y) Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- z) Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- aa) Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.

Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021 serta kondisi pandemi COVID 19 yang menimpa masyarakat kabupaten Badung maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung tahun 2021 yaitu :

1. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selaras dengan prioritas kebijakan PPNSB Kabupaten Badung yaitu, Sandang, Pangan dan Papan, Kesehatan dan Pendidikan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Bidang Pariwisata.
2. Penanggulangan masalah kesehatan, ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi COVID 19
3. Pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19
4. Pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dengan memperluas pemanfaatan teknologi informasi.



1.10. SISTIMATIKA LAPORAN

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif	Menyajikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja Kabupaten Badung Tahun 2021.
Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, data umum yang menyangkut gambaran Kabupaten Badung, aspek strategis serta arah kebijakan.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menyajikan mengenai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2021.
Bab III Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2021 yang memuat hasil pengukuran kinerja dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta akuntabilitas keuangan
Bab IV Penutup	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis tahun 2021 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

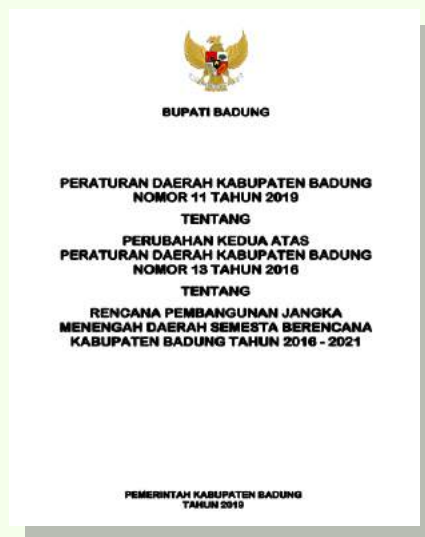


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2.1. RPJMD Semesta Berencana 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.



RPJMD Kabupaten Badung disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-

758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan



Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, telah menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Sasaran pokok dari RPJPD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang merupakan implementasi dari Ajaran Tri Sakti yaitu : **BERDIKARI DI BIDANG EKONOMI, BERDAULAT DI BIDANG POLITIK DAN BERKEPRIBADIAN DI BIDANG KEBUDAYAAN**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karna serta Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka.

RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Badung dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

RPJMD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG 2016-2021

VISI
MISI

MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRIHITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan
5. Memperkuat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yg menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya





Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama RPJMD
Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no. 9 Tahun 2017)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no.11 Tahun 2019)
1	2	3	4	5
Visi :				
“MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”				
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama				
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	1. Indek kerukunan umat beragama
		2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	2. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi				
2.	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Indeks kepuasan masyarakat	3. Indeks kepuasan masyarakat
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>				
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Katagori akuntabilitas kinerja kabupaten	4. Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten
		1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5. Opini BPK	5. Opini BPK
		6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN	6. Katagori penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)	6. Indeks reformasi birokrasi
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan				
4.	Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7. Indeks pembangunan manusia	7. Indeks pembangunan manusia
		8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan	8. Indek Kebahagiaan	8. Indek Kebahagiaan



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no. 9 Tahun 2017)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no.11 Tahun 2019)
1	2	3	4	5
		masyarakat		
		9. Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase penduduk miskin	9. Persentase penduduk miskin
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan				
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10. Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)				
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	2. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11. Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
		3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada	12. Persentase penegakan Perda dan Perkada
7.	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	4. Meningkatnya Pengarusutamaan gender	13. Indeks pembangunan gender (IPG)	13. Indeks pembangunan gender (IPG)
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana				
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup	14. Indek kualitas lingkungan hidup
			6. Indeks pertanaman	15. Indeks pertanaman
9.	Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	16. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah				
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17. Tingkat pengangguran terbuka	17. Tingkat pengangguran terbuka
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	18. Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya				



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no. 9 Tahun 2017)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (Perda no.11 Tahun 2019)
1	2	3	4	5
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani	19. Skor pola pangan harapan	19. Skor pola pangan harapan
13.	Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan	19. Meningkatkan daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	20. Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing
		20. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Setelah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum dan perubahan kebijakan nasional sehingga mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Beberapa perubahan dalam RPJMD diantaranya perubahan rumusan indikator sasaran dan penyesuaian target.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana 2016-2021, Bupati dan Wakil terpilih telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas daerah sebagai penjabaran **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** sebagai berikut:

Grafik 2.1.

Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta membangun akuntabilitas kinerja yang semakin baik, maka





Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 telah dirumuskan secara terukur dan akuntabel. Untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan Kabupaten Badung yang lebih fokus, efektif, efisien dan akuntabel maka masing-masing sasaran strategis dilakukan penyelarasan serta cross cutting program. Adapun contoh penyelarasan program untuk pencapaian sasaran strategis RPJMD seperti berikut :

Grafik 2.2

Cascading dan Cross Cutting

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021



Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan Indikator kinerja Utama maka setiap sasarnya RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pendekatan pohon kinerja dan cascading.



2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun Ke-5 (Tahun terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.



Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 –

2021. Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagai berikut :

"AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, Penguatan INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP"



Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, yaitu :



1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sedangkan program prioritas pada 5 bidang Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama dan Budaya
5. Pariwisata

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2021 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2021. Adapun Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah :

“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”

Sedangkan Prioritas Nasional Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :



**“PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN
KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN”**

Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2021, yaitu :

1. Pangan, Sandang dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021 sesuai dokumen RKT dan dokumen RKPД Pemerintah Kabupaten Badung 2021 secara rinci, seperti tabel berikut :

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5 Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indek Kebahagiaan	Nilai	75,51
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	95
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13 Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	76,13
14	Meningkatkan kualitas	14 Indeks kualitas lingkungan	Nilai	69,4



	lingkungan hidup		hidup (KLH)		
		15	Indeks Pertanaman (IP)	Nilai	235
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah), selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi perjanjian kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen





antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati



tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja adalah : 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3)

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward* dan *punishment*); 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja 2021 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2016 – 2021, dan telah ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2021 dan perjanjian kinerja perubahan ditetapkan tanggal 15 Oktober 2021 seperti berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5 Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indek Kebahagiaan	Nilai	75,51
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	95
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	13 Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	76,13
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14 Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Nilai	69,4
		15 Indeks Pertanaman (IP)	Nilai	235
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Potret Pengukuran dan Capaian Kinerja Tahun 2021

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan (17 indikator), 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU). Untuk tahun 2021 terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yang belum dapat diukur kinerjanya, yaitu:

1. Indikator kinerja yang tidak dilaksanakan survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, sebanyak 2 IKU meliputi : **Indeks kerukunan umat beragama dan Indek Kebahagiaan.**
2. Indikator yang belum terbit hasil evaluasinya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) meliputi : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten** dan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** oleh kementerian PAN-RB serta **Opini BPK** masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

Adapun yang menjadi hambatan dalam pengukuran indikator Indeks kerukunan umat beragama dan Indek Kebahagiaan karena pengumpulan data harus dilakukan



melalui survey serta adanya refocusing program/kegiatan, sehingga dengan kondisi pandemic COVID-19 maka kegiatan survei ini tidak bisa dilaksanakan.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2016-2021 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih ditingkatkan karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021 dilakukan terhadap tujuan dan sasaran rencana strategis RPJMD tahun 2016-2021, dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

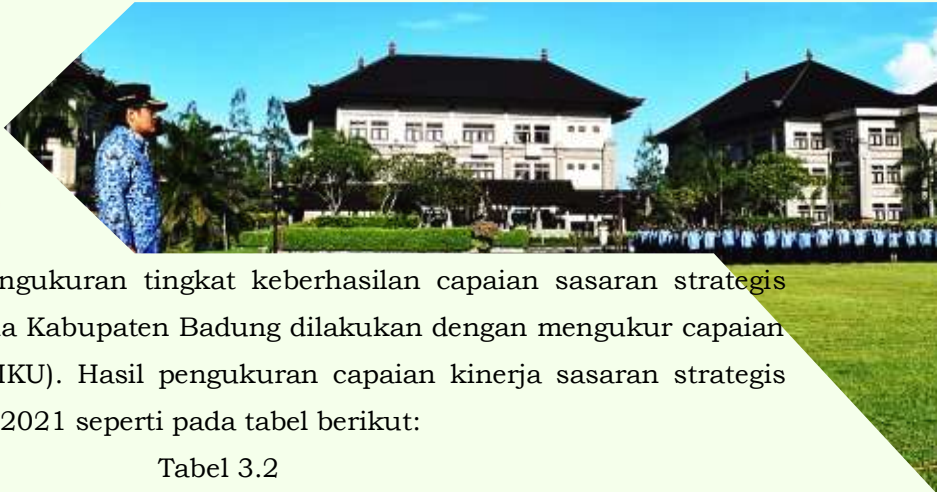
Pengukuran kinerja tahun 2021 merupakan periode terakhir dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sehingga pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan jangka menengah RPJMD dan pengukuran kinerja sasaran strategis jangka pendek Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Adapun hasil pengukuran tujuan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tujuan
RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Tujuan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78,45	-	Tidak dilaksanakan survei
2.	Terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	85,4	104,15
3.	Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01	-	Data Belum Terbit
		4.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Data Belum Terbit
		5.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75	-	Data Belum Terbit



NO	Tujuan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4.	Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya Angka kemiskinan dalam masyarakat	6.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57	81,83	100,32
		7.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	75,51	-	Tidak dilaksanakan survei
		8.	Tingkat kemiskinan	%	0,60-0,40	2,62	-276,67
5.	Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	9.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91	10,70	135,27
6.	Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	10.	Persentase Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	%	95	100	105,26
7.	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	11.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76,13	95,53	125,48
8.	Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	12.	Indeks pencemaran lingkungan hidup Indeks pencemaran lingkungan hidup	Nilai	69,4	68,37	98,51
9.	Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	13.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	%	100	83,25	83,25
10.	Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	14.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,31	6,93	-2.035,48
11.	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58	99,39	109,73
12.	Meningkatnya ketersediaan pangan	16.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97	86,8	89,48
13.	Meningkatnya daya saing Kepariwisata bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	17.	Indeks daya saing destinasi pariwisata	%	75,00	74,4	99,20
	Jumlah		Total Kinerja				-1261,23
	Rata-rata		Rata-rata Kinerja				-105,10



Sedangkan hasil pengukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran strategis RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satu an	Target	Realis asi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45	-	Tidak dilaksanakan survei
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90	86,19	95,77
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82	85,4	104,15
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01	-	Data Belum Terbit
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Data Belum Terbit
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75	-	Data Belum Terbit
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57	81,83	100,32
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	75,51	-	Tidak dilaksanakan survei
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40	2,62	-276,67
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91	10,70	135,27



NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satu an	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	95	100	105,26
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95	100	105,26
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76,13	95,53	125,48
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,40	68,37	98,51
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	235	221,69	94,34
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31	6,93	-2035,48
17.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58	99,39	109,73
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97	86,8	89,48
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00	74,4	99,20
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29,00	23,25	80,17
Total Kinerja							-868,93
Rata-rata Kinerja							-54,31



3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021

Dalam rangka untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah terpilih selama lima tahun pemerintahannya maka kepala daerah dalam menyusun RPJMD merumuskan tujuan yang ingin dicapai sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 ditetapkan 13 tujuan jangka menengah pembangunan yang akan dicapai pada akhir RPJMD. Hasil analisis capaian tujuan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung pada tahun 2021 diuraikan secara rinci per masing-masing tujuan.

1

Analisis Kinerja Tujuan 1

Terwujudnya Kerukunan Hidup Beragama serta Penguatan Kehidupan Adat dan Budaya

Hasil capaian tujuan terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan indikator indek kerukunan umat beragama pada tahun 2021, tidak dapat diukur oleh karena tidak dilakukan survei indek kerukunan umat beragama oleh Badan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pengukuran indek kerukunan umat beragama untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19 serta adanya penurunan pendapatan daerah terutama dari sektor pariwisata akibat



dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu nilai indeks kerukunan umat beragama untuk tahun 2020 dan 2021 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai gambaran hasil capaian Indikator indek kerukunan umat beragama Kabupaten Badung sampai tahun 2019 sebesar 80,24 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator indeks kerukunan umat beragama telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 75,45.

2

Analisis Kinerja Tujuan 2

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Hasil capaian tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 85,4 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 menunjukkan hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 82 sehingga kinerjanya sebesar 104,15%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat telah tercapai.

3

Analisis Kinerja Tujuan 3

Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Profesional

Tujuan RPJMD terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional diukur dengan tiga indikator meliputi:

1. Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten
2. Opini BPK
3. Indeks reformasi birokrasi

Hasil capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja kabupaten pada akhir RPJMD tahun 2021, belum dapat diukur oleh karena data hasil evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Hasil capaian indikator Opini BPK pada akhir RPJMD tahun 2021, belum dapat diukur oleh karena masih dalam tahap pelaksanaan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil capaian indikator indeks reformasi birokrasi pada akhir RPJMD tahun 2021, belum dapat diukur oleh karena data hasil evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4

Analisis Kinerja Tujuan 4

Meningkatnya Kualitas SDM dan Menurunnya Angka Kemiskinan dalam Masyarakat

Tujuan RPJMD meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, diukur dengan tiga indikator meliputi:

1. Indeks pembangunan manusia
2. Indek Kebahagiaan
3. Persentase penduduk miskin

Hasil capaian indikator indeks pembangunan manusia pada akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 81,83 dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 81,57, sehingga kinerja capaian tujuan sebesar 100,32%, berarti telah melampaui target akhir RPJMD. Hal ini berarti tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) telah tercapai.

Hasil capaian indikator Indek Kebahagiaan pada tahun 2021, belum dapat diukur oleh karena tidak dilakukan survei indeks kebahagiaan oleh Badan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Badung yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pengukuran Indek Kebahagiaan untuk tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19 serta adanya penurunan pendapatan daerah terutama dari sektor pariwisata akibat dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu nilai Indek Kebahagiaan untuk tahun 2020 dan 2021 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai gambaran hasil capaian Indikator indikator Indek Kebahagiaan Kabupaten Badung sampai tahun 2019 sebesar 76,14 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator Indek Kebahagiaan telah melampaui target akhir sebesar 75,51.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin pada akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 2,62% dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar



0,60-0,40%, sehingga kinerja capaian tujuan sebesar -276,67 %. Hal ini berarti tujuan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan indikator persentase penduduk miskin belum tercapai.

5

Analisis Kinerja Tujuan 5

Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan

Hasil capaian tujuan menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan, dengan indikator Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 10,7% sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 7,91% sehingga kinerjanya sebesar 135,27%. Hal ini berarti tujuan menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan, dengan indikator Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB telah tercapai.

6

Analisis Kinerja Tujuan 6

Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada

Hasil capaian tujuan terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan indikator Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 100% sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95% sehingga kinerjanya sebesar 105,26%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya kepatuhan



masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan indikator Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti telah tercapai.

7

Analisis Kinerja Tujuan 7

Terwujudnya Pengarasutamaan Gender

Hasil capaian tujuan terwujudnya pengarasutamaan gender, dengan indikator Indeks pembangunan gender (IPG) pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 95,53 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator indeks kepuasan masyarakat lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 76,13 sehingga kinerjanya sebesar 105,26%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya pengarasutamaan gender, dengan indikator Indeks pembangunan gender (IPG) telah tercapai.

8

Analisis Kinerja Tujuan 8

Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan

Hasil capaian tujuan terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan indikator Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 68,37 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup belum mencapai target akhir sebesar 69,4 sehingga kinerjanya sebesar 98,51%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan indikator Indeks Pencemaran Lingkungan Hidup belum tercapai.



9

Analisis Kinerja Tujuan 9

Terwujudnya Penanggulangan bencana secara terpadu

Hasil capaian tujuan terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 83,25% sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 masih dibawah target sebesar 100%, sehingga kinerjanya sebesar 83,25%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana belum tercapai.

10

Analisis Kinerja Tujuan 10

Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing

Hasil capaian tujuan terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 6,93% sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator tingkat pengangguran terbuka lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 0,31% sehingga kinerjanya sebesar -2035,48%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka belum tercapai.



11

Analisis Kinerja Tujuan 11

Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas

Hasil capaian tujuan terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, dengan indikator Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 99,39% sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 90,58% sehingga kinerjanya sebesar 109,73%. Hal ini berarti tujuan terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, dengan indikator Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap telah tercapai.

12

Analisis Kinerja Tujuan 12

Meningkatnya ketersediaan pangan

Hasil capaian tujuan meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator skor pola pangan harapan pada tahun 2021, diperoleh hasil sebesar 86,8 sehingga bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 maka hasil capaian indikator skor pola pangan harapan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 97, sehingga kinerjanya sebesar 89,48%. Hal ini berarti tujuan meningkatnya ketersediaan pangan, dengan indikator skor pola pangan harapan belum tercapai.



13

Analisis Kinerja Tujuan 13

Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor Pertanian dan Perikanan

Hasil capaian tujuan meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator indeks daya saing destinasi pariwisata menunjukkan bahwa hasil capaian akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 74,4% dari tagert yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga kinerjanya sebesar 99,20%. Hal ini berarti tujuan meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator indeks daya saing destinasi pariwisata belum tercapai.

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Startegis RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021

Analisis Kinerja Sasaran 1 : Meningkatkan Toleransi Hidup

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang masyarakatnya dinamis dan heterogen dari perspektif agama, sosial-budaya-politik sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius tentang kerukunan umat beragama untuk menjaga wilayah Kabupaten Badung. Kerukunan Umat beragam di Kabupaten Badung menjadi perhatian yang serius sehingga menjadi salah satu indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Indikator Sasaran strategis RPJMD meningkatnya toleransi hidup beragama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/8 Tahun 2006, yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai. Kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik, dalam keadaan rukun dan damai.

Indeks Kerukunan Umat Beragama dinilai dari tiga indikator yang digunakan dalam riset ini yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kementerian Agama RI juga membuat kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama menjadi beberapa kategori nilai, yaitu :

- a) Sangat Tinggi : > 80
- b) Tinggi : 60-80
- c) Sedang : 40-60
- d) Rendah : < 40

Pengukuran indeks kerukunan umat beragama tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan oleh karena :

1. adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19
2. adanya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan maka untuk tahun 2020 dan 2021 sehingga tidak dilaksanakan kegiatan survei pengumpulan data untuk pengukuran nilai indeks kerukunan umat beragama.
3. adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan/bermakna terutama penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) dari sektor pariwisata dampak pandemi COVID 19.

Berdasarkan kondisi tersebut maka kegiatan survei indeks kerukunan umat beragama tidak dilaksanakan sehingga kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2019 sebesar 80,24 dan bila dibandingkan dengan target pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil capaian telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 78,45. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi (nilai >80). Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung seperti pada grafik berikut :



Grafik 3.1

Target dan Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Berdasarkan data hasil survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2019 maka hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 80,24, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 78,45.

Hasil capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Provinsi Bali sebesar 80,1 dan Nasional sebesar 73,83. Kategori indeks kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung dan Provinsi Bali termasuk kategori sangat tinggi, sedangkan kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional termasuk tinggi. Secara lengkap perbandingan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama seperti grafik berikut :

Grafik 3.2

Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional tahun 2017-2019



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung



Hasil capaian indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan indeks kerukunan umat beragama di Indonesia, ini berarti rata-rata masyarakat di Kabupaten Badung memiliki hubungan harmonis sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Gambaran indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung dan Indonesia seperti grafik berikut:

Grafik 3.3
Perbandingan IKUB di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2016-2021



Berdasarkan data Kementerian agama, indeks kerukunan umat beragama (KUB) di Indonesia tahun 2021 sebesar 72,39, meningkat dibandingkan dengan indeks kerukunan umat beragama tahun 2020 sebesar 67,46. Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia ditentukan oleh tiga indikator yaitu : 1) nilai toleransi sebesar 68,72 2) nilai kerjasama sebesar 73,41 dan 3) nilai kesetaraan sebesar 75,03. Gambaran indeks kerukunan umat beragama di Indonesia seperti gambar berikut :



Gambar 3.1

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia tahun 2021



Tangkapan layar- Indeks kerukunan umat beragama di Indonesia tahun 2021 termasuk tinggi menurut Kementerian Agama. JIBi - Bisnis/Nancy Junita

Berdasarkan dimensi dari tingkat kerukunan umat beragama (KUB) di Kabupaten Badung tahun 2019 menunjukkan capaian pada dimensi Toleransi dengan nilai sebesar 83,89, Kesetaraan sebesar 77,48 dan Kerjasama sebesar 79,27, sehingga nilai rata-rata kerukunan umat beragama sebesar 80,24 yang berarti tingkat kerukunan umat beragama termasuk kategori sangat tinggi di Kabupaten Badung. Secara lengkap perbandingan komponen indeks KUB di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.4

Perbandingan Komponen Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2018-2019

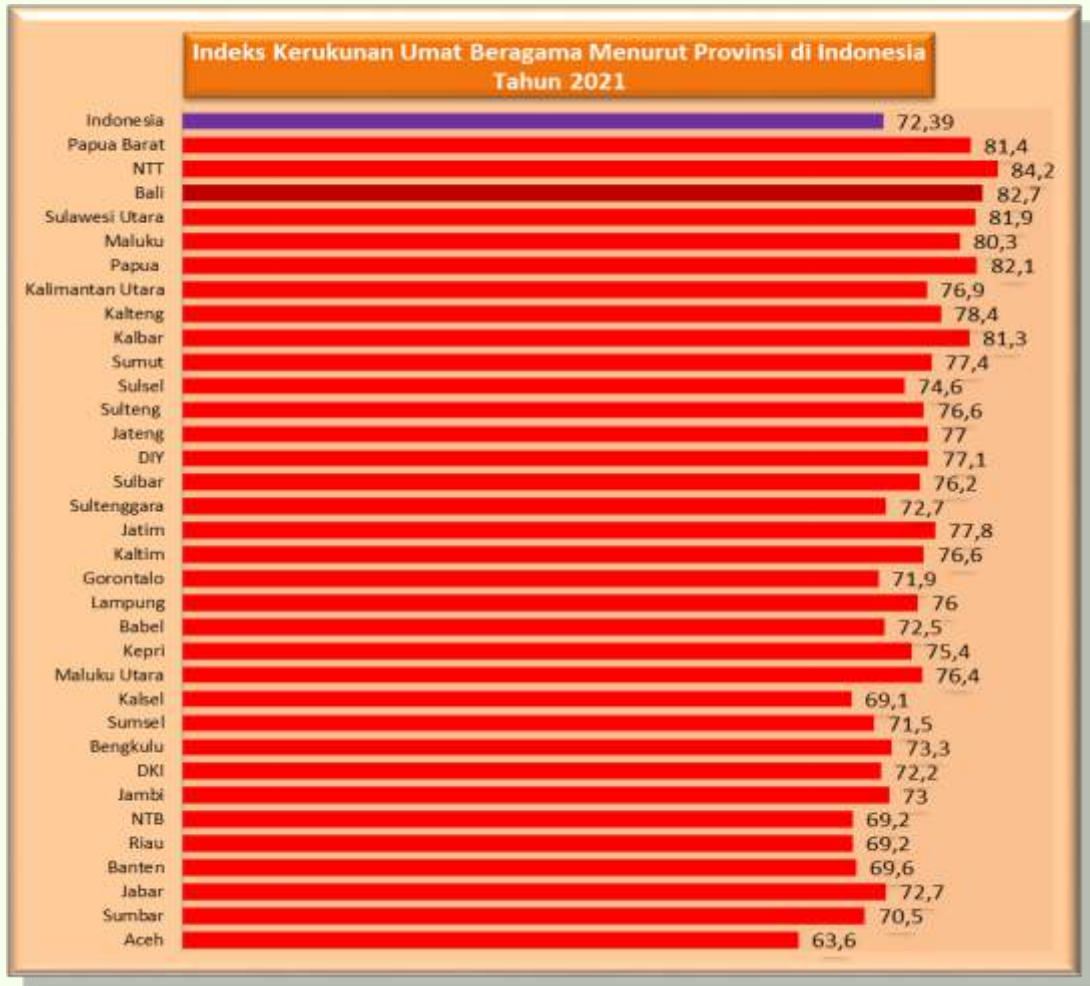




Distribusi indeks kerukunan umat beragama menurut provinsi di Indonesia tahun 2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.5

Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama
Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2021



Sasaran meningkatnya toleransi hidup beragama didukung 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program yang mendukung pencapaian target sasaran ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada anggaran induk 2021 dengan pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 324.604.415,- namun pada anggaran perubahan mengalami rasionalisasi/refocusing anggaran sehingga program/kegiatan/sub kegiatan ini tidak dialokasikan anggaran.

Terciptanya kerukunan umat beragama yang tinggi di Kabupaten Badung tidak terlepas dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberagaman.

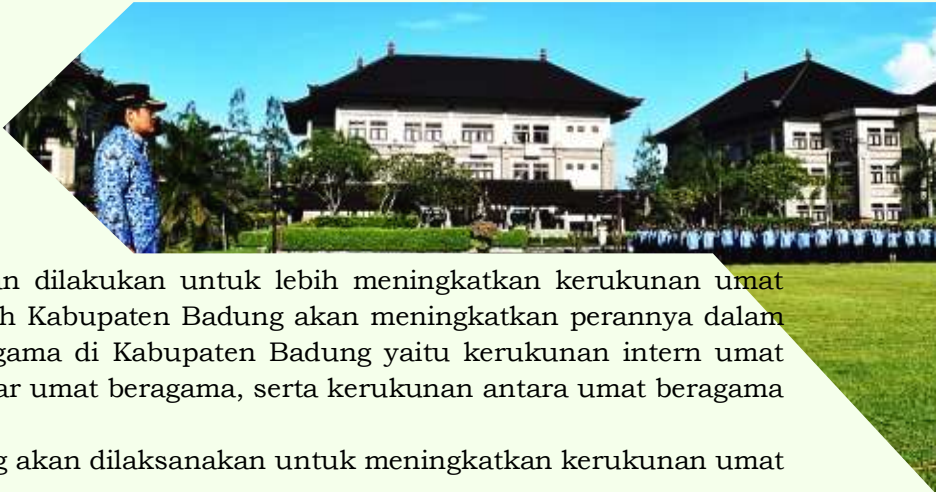


Adanya rasa saling menghargai antar sesama umat beragama, peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman bagi umatnya, serta tingginya sinergitas tokoh adat dan tokoh masyarakat antar agama yang menciptakan suatu kerukunan umat beragama. Beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi indeks kerukunan umat beragama dengan kategori nilai sangat tinggi di Kabupaten Badung meliputi :

- 1) Kesadaran terhadap konstitusi empat pilar pokok yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai-nilai perekat bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh secara konsekwen oleh semua lapisan masyarakat dalam keberagaman hidup beragama.
- 2) Peran tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa membangun sinergisitas agar terbangun keharmonisan yang baik di lingkungan desa dan kelurahan sehingga tercipta tri kerukunan umat beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
- 3) Peran tokoh agama sebagai *opinion leader* terhadap umatnya sudah berjalan dengan baik sehingga kerawanan konflik yang akan muncul sangat rendah dan bahkan belum pernah muncul konflik tersebut.
- 4) Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai kebijakan yang mengayomi seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada dengan membangun komunikasi dan kerukunan lintas agama dengan mengedepankan aspek-aspek persamaan bukan menggali perbedaan-perbedaan yang memang sudah pasti ada.
- 5) Berdasarkan aspek idiologis, historis serta sosiologis masyarakat Kabupaten Badung memiliki latar belakang pendidikan, wawasan dan pemahaman, serta tingkat intelektual yang baik menjadi nilai kekuatan pada aspek toleransi masyarakat Kabupaten Badung khususnya pada daerah yang heterogenitasnya tinggi.

Walaupun indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung termasuk kategori sangat tinggi namun ada beberapa faktor penghambat atau tantangan kedepan yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung antara lain :

1. Adanya kecenderungan umat beragama lebih eksklusif atau bersifat radikal dan intoleran dan pandangan subyektif dalam memandang kebenaran agama lain.
2. Munculnya sikap militan yang sangat berlebihan dalam kehidupan beragama.
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang membawa umat mudah melakukan otak-atik terhadap apa yang ia terima, sehingga kerukunan dapat tercipta tetapi agama itu kehilangan arti, fungsi maupun maknanya.
4. Makin bergesarnya pola hidup berdasarkan kekeluargaan atau gotong royong ke arah kehidupan individualistis.



Strategi yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kerukunan umat beragama yaitu Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan perannya dalam tri kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi :

- 1) Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*.
- 2) Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan.
- 3) Membangun dan mengembangkan kegiatan lintas agama antar generasi muda dan masyarakat umumnya lintas agama sehingga akan tumbuh pemahaman ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat
- 4) Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
- 5) Memperkuat dasar-dasar tri kerukunan beragama antara lain: kerukunan internal umat beragama, antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- 6) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- 7) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif yang mendukung pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- 8) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementif bagi kemanusiaan yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 9) Meningkatkan pemahaman umat beragama untuk menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat.



Analisis Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Adat dan Budaya

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budia atau akal). Bentuk lain dari kata budaya dalam bahasa inggris disebut *culture*. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. Unsur-unsur budaya seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan pelaratan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan.

Kabupaten Badung yang merupakan bagian dari Provinsi Bali memiliki kebudayaan yang adiluhung bersifat local genius sehingga perlu dilestarikan. Di era globalisasi dewasa ini kebudayaan lokal (kearifan lokal) sangat dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang membawa dampak positif maupun negatif terhadap eksistensi budaya tersebut. Kabupaten Badung merupakan daerah tujuan wisata, sehingga secara langsung akan beradapan dengan budaya asing. Demikian juga dengan perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak langsung terhadap eksistensi kebudayaan masyarakat Kabupaten Badung.

Penetapan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas/harmonis antara pelaksanaan pembangunan dengan lestariannya budaya, seperti pengembangan pariwisata dipadukan dengan nilai-nilai budaya masyarakat.

Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya diukur dengan formula Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2 (dua).

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian adat dan budaya dengan indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tahun 2021 sebesar 86,19% dari target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaian kinerja sebesar 95,77%. Hasil capaian indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya untuk tahun 2021 dibawah target yang ditetapkan RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 74,4%. Hasil capaian kinerja indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya untuk tahun 2021 masih dibawah target yang ditetapkan akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 90%. Sebagai perbandingan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:



Grafik 3.6

Perbandingan target dan Realisasi Indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2017-2021

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya ditinjau dari kategori tingkat kemajuan desa adat menunjukkan bahwa semua desa adat (122 desa adat) di Kabupaten Badung termasuk kategori desa adat maju.

Sedangkan berdasarkan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung menunjukkan dari 61 cagar budaya yang ada semuanya dalam kategori lestari. Secara Kategori desa adat dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :

Tabel 3.3

Kategori Desa Adat dan Cagar Budaya di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	JUMLAH	JML DESA ADAT		JUMLAH	JML. CAGAR
			DESA ADAT	BERKEMBANG MAJU		
1	Petang	27	-	27	22	22
2	Abiansemal	34	-	34	7	7
3	Mengwi	38	-	38	16	16
4	Kuta Utara	8	-	8	4	4
5	Kuta	6	-	6	-	-
6	Kuta Selatan	9	-	9	12	12
	Kabupaten	122	-	122	61	61

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021



Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak areal persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Dalam organisasi subak, dikenal adanya beberapa perangkat. Perangkat-perangkat yang ada dalam subak adalah pekaseh (ketua subak), petajuh (wakil pekaseh), penyarikan (juru tulis), petengen (juru raksa), kasinoman (kurir), dan beberapa yang lainnya. Subak merupakan salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.

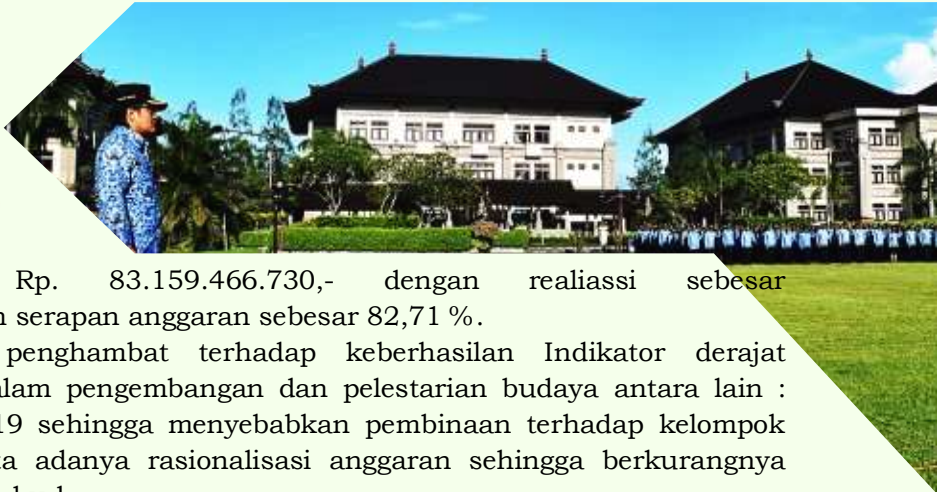
Keberadaan subak di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori lestari atau dari 214 kelompok tani semuanya (100%) lestari. Sedangkan menurut komponen jumlah sekaa/kelompok tari, tabuh dan Kidung/Kekawin telah mendapatkan pembinaan, dari 2280 sekaa/kelompok yang aktif sebanyak 972 sekaa atau 42,63%. Secara Lengkap jumlah subak dan sekaa/kelompok seni menurut kecamatan di Kabupaten Badung, seperti tabel berikut:

Tabel 3.4
Kategori Subak Lestari dan Sekaa yang Berkembang
di Kabupaten Badung Tahun 2021

No.	KECAMATAN	JUMLAH SUBAK	JUMLAH SUBAK LESTARI	JUMLAH SEKAA YANG ADA			JUMLAH SEKAA YANG AKTIF		
				TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN	TARI	TABUH	KIDUNG/ KEKAWIN
1	Petang	43	43	81	97	13	42	25	10
2	Abiansemal	53	53	157	228	89	59	73	25
3	Mengwi	70	70	127	473	285	62	150	151
4	Kuta Utara	18	18	136	175	35	73	93	16
5	Kuta	3	3	9	86	18	5	40	10
6	Kuta Selatan	27	27	58	173	40	25	88	25
	Kabupaten	214	214	568	1232	480	266	469	237

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pelestarian adat dan budaya didukung oleh 5 program, 7 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pengembangan Nilai Budaya, program Pelestarian pengembangan kesenian tradisional, program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program Pengelolaan Permuseuman dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pembinaan lembaga adat (desa adat, sekaa teruna, subak dan kelompok-kelompok kesenian). Pagu anggaran yang



dialokasikan sebesar Rp. 83.159.466.730,- dengan realisasi sebesar Rp.68.783.869.733 dengan serapan anggaran sebesar 82,71 %.

Beberapa faktor penghambat terhadap keberhasilan Indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya antara lain : adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pembinaan terhadap kelompok seni sangat terbatas serta adanya rasionalisasi anggaran sehingga berkurangnya cakupan aktivitas seni dan budaya.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan dalam pencapaian target indikator derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meliputi: meningkatnya komitmen pemerintah terhadap eksistensi budaya, adat dan seni, meningkatnya eksistensi adat masyarakat, menguatnya nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat, meningkatnya pelestarian seni dan warisan budaya melakukan inventarisasi, Subak di Bali pada umumnya merupakan kelembagaan sosioagraris-religius di sektor pertanian, tetapi sangat menarik sebagai daya tarik wisata dari beragam atraksi yang bisa dikembangkan seperti lanskap persawahan, ritual agama, produk pertanian, dan kehidupan sosial petaninya serta sosialisasi terhadap situs budaya daerah serta pelestarian warisan budaya daerah.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan indikator ini meliputi :

- a. Pemberian bantuan kepada desa adat dalam pelaksanaan upacara yadnya pemberian bantuan kepada lembaga adat, lembaga kesenian, dan pelaku seni.
- b. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada desa adat dan lembaga kesenian dengan crosscutting program dengan OPD lain dalam hal pelestarian adat, seni dan Budaya.
- c. Pemberian bantuan operasional terhadap subak di Kabupaten Badung
- d. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap seluruh subak yang ada di Kabuapten Badung.
- e. Adanya crosscutting program dengan OPD lainnya dalam hal pelestarian subak.

Analisis Kinerja Sasaran 3 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari



penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu evaluasi implementasi pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat (SKM).

Indeks kepuasan masyarakat dihitung dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ini meliputi: 1) persyaratan 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan 6) Kompetensi pelaksana 7) Perilaku pelaksana 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan 9) Sarana dan Prasarana. Berdasarkan kesembilan unsur maka diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat seperti tabel berikut :

Tabel 3.5
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator hasil survei kepuasan masyarakat atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai standar yang cepat, mudah, murah, nyaman dan ramah sebagai wujud pelayanan prima.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 dilakukan secara online melalui aplikasi *google form*, hal ini dilakukan karena masih adanya pandemi COVID19 dan pengalaman tahun 2020 tidak dilaksanakan survei oleh karena adanya *refocusing* anggaran untuk pengendalian COVID 19, adanya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan karena pandemi COVID19 dengan penerapan protokol



kesehatan serta adanya penurunan pendapatan daerah yang *signifikan*/bermakna terutama penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) dari sektor pariwisata dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Hasil pengukuran sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 sebesar 85,4 dari target yang ditetapkan sebesar 82, sehingga kinerjanya sebesar 104,15%, berarti capaian tahun 2021 telah melampaui target RPJMD. Hasil capaian Indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,4 termasuk indeks kepuasan masyarakat kategori baik (interval nilai 76,61 – 88,30).

Hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2017-2019). Hasil capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 telah melampaui dari target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 82, namun trend capaian dari tahun 2017-2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara lengkap perbandingan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.7

Target dan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2021



Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 berdasarkan perangkat daerah menunjukkan bahwa perangkat daerah lebih banyak termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat kategori baik dan sangat baik, serta tidak pernah ada perangkat daerah dengan kategori kurang baik atau tidak baik. Secara lengkap kategori indeks kepuasan masyarakat menurut perangkat daerah sebagai berikut:

Grafik 3.8
Kategori Perangkat Daerah Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2021

Penilaian indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Badung juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut :

- *Public service of the year Bali 2021* dari Markplus institute kepada DPMD PTSP, Disdukcapil, dan Dinas Kesehatan
- *Out Standing Achievement of Public Service innovation 2021* dari : KemenPAN RB untuk inovasi Balitbang dengan judul PATRIOT : Pendeteksi Area Tangkapan Ikan Menggunakan sistem *Internet of things*
- Predikat Kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 oleh ombudsman RI



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
9	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	76,27	81,03	90,85	-	86,42
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79,83	80,73	91,10	-	92,71
11	Dinas Pariwisata	84,62	84,29	79,25	-	85,11
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78,00	79,55	83,52	-	81,17
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70,00	81,03	N/A	-	86,39
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87,85	78,73	91,87	-	88,97
15	Dinas Kebudayaan	79,80	87,69	87,00	-	80,22
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,09	81,77	90,85	-	91,85
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	83,92	80,37	82,52	-	88,11
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	82,61	78,80	88,80	-	82,77
19	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79,86	80,52	86,35	-	80,35
20	Dinas Pertanian dan Pangan	84,05	79,51	86,10	-	82,86
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	84,29	80,89	88,87	-	84,84
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	78,84	83,53	90,70	-	95,32
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83,27	90,65	86,85	-	81,53
24	Dinas Kesehatan	82,70	80,48	91,00	-	81,76
25	Dinas Sosial	79,96	82,32	80,37	-	87,69
26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,23	78,01	89,27	-	86,85
27	Dinas Perikanan	78,94	82,14	84,15	-	83,99
28	Dinas Perhubungan	79,03	78,78	83,77	-	85,75
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,25	82,97	87,77	-	85,46
30	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	79,82	80,73	80,60	-	85,11
31	Satuan Polisi Pamong Praja	77,06	79,55	88,87	-	87,25
32	RSUD Mangusada (Rawat Jalan)	80,81	78,29	87,55	-	83,80
33	RSUD Mangusada (Rawat Inap)	N/A	N/A	N/A	-	82,90
34	Kecamatan Petang	79,81	81,70	82,80	-	80,45
35	Kecamatan Abiansemal	84,69	80,99	87,10	-	91,18
36	Kecamatan Mengwi	91,06	83,13	81,75	-	87,24



No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
37	Kecamatan Kuta Utara	80,42	80,02	84,50	-	88,25
38	Kecamatan Kuta	81,80	87,48	85,60	-	81,32
39	Kecamatan Kuta Selatan	80,72	80,12	77,85	-	85,93
RATA-RATA		81,37	81,79	86,35	-	85,40

Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2021

Program inovatif dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung secara nyata dilapangan, mendapat apresiasi positif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui sasaran ini diharapkan mampu mendorong seluruh OPD untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan berbagai program inovatif dalam pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan evaluasi



Penyerahan sertifikat kepatuhan pelayanan publik oleh kepala Ombudsman kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, 11 Januari 2022

bekerjasama dengan ORI dan akademisi Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperkuat kualitas SDM pelayanan publik. Hasil penilaian dari ombudsman Republik Indonesia (ORI) termasuk kategori kepatuhan tinggi (hijau).

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik didukung oleh 21 program, 34 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Program pendukung antara lain: Program Peningkatan Kapasitas pelayanan public, Program penataan administrasi kependudukan, program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa kegiatan pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SOP) dan Proses bisnis, Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik sampai ke tingkat desa upaya tersebut diperkuat dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan program lainnya. Pagu anggaran yang dialokasikan



sebesar Rp. 107.369.220.996,- dengan realisasi sebesar Rp. 61.235.767.615,- dengan serapan anggaran sebesar 57,03 %.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dalam pelayanan publik mampu mendorong perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanannya
- b. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ada dalam katagori Baik. Hampir sebagian besar perangkat daerah telah menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan
- c. Dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk jaringan layanan internet untuk memudahkan perangkat daerah memberikan pelayanan secara online.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya indeks kepuasan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a. Pandemi covid-19 merupakan faktor penghambat utama dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat yang menyebabkan peniadaan pelayanan tatap muka sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan
- b. *Refocussing* anggaran mengakibatkan pelayanan yang diberikan menjadi kurang optimal
- c. Pandemi telah mengakibatkan dunia beradaptasi berupa semakin pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin cepatnya perkembangan teknologi mengakibatkan semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yg belum bisa diimbangi dengan kemampuan pemberi layanan.
- d. Sumber Daya Manusia di bidang pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komputer yang mendukung sistem informasi perizinan online masih terbatas
- e. Sistem Informasi Manajemen / SIM belum seluruhnya terintegrasi dengan perangkat daerah terkait.
- f. Peraturan Perundang – undangan sebagai payung hukum pelaksanaan Perizinan dan non Perizinan belum sepenuhnya disesuaikan dan ditindaklanjuti, atau belum mengacu pada kebijakan terbaru dari pemerintah.

Upaya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat adalah :

- a. Pelayanan secara online dilaksanakan untuk mengatasi faktor penghambat peniadaan layanan tatap muka. Pelayanan online memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemerintah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan
- b. Faktor penghambat *Refocussing* anggaran diatasi dengan cara mengoptimalkan sarana pelayanan yg telah ada serta melakukan berbagai inovasi untuk menciptakan terobosan dalam memberi pelayanan.
- c. Kemampuan pemberi layanan ditingkatkan dengan berbagai pelatihan



- walaupun dilaksanakan secara online.
- d. Meningkatkan survei kepuasan masyarakat pada seluruh perangkat daerah berbasis teknologi informasi sehingga lebih update dan dapat terukur secara teratur seperti google form.
 - e. Meningkatkan pembinaan kepada unit pelayanan publik.
 - f. Meningkatkan inovasi pelayanan publik sehingga lebih responsive, cepat, akurat dan berkeadilan
 - g. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan *service excellent* (pelayanan prima), untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas serta menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan dan disiplin kerja.
 - h. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan serta menindaklanjuti dengan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk janji/ komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada pengguna layanan.
 - i. Membuat kebijakan pemberian *reward* kepada pengguna layanan apabila pelayanan diluar ketentuan/SOP/SP.
 - j. Meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan Tim Kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan seperti memanfaatkan website resmi, telepon, SMS center, Email, dan atau penempatan Kotak Saran.

Analisis Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, hal ini terlihat dalam RPJMD 2016-2021 dengan perumusan sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan demikian maka setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan akuntabilitas kinerja atau dengan kata lainnya



bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan hasil dari setiap anggaran yang dipergunakan serta faktor keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi.

Hasil capaian meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator Nilai akuntabilitas kinerja kabupaten Badung tahun 2021 belum dapat diukur oleh karena sampai laporan ini disusun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Sebagai bahan perbandingan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung untuk tahun 2020 sebesar 78,07 dari target yang ditetapkan sebesar 78,40 sehingga capaian kinerja sebesar 99,58%. Hasil capaian kinerja untuk tahun 2020 masih dibawah target yang ditetapkan.

Hasil capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2019 sebesar 77,90. Hasil capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten menunjukkan tren meningkat walaupun belum sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan hasil capaian indikator kinerja AKIP tahun 2020 masih dibawah target akhir RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 yang ditargetkan sebesar 80,10 (A). Secara lengkap target dan hasil capaian nilai laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.9

Target dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



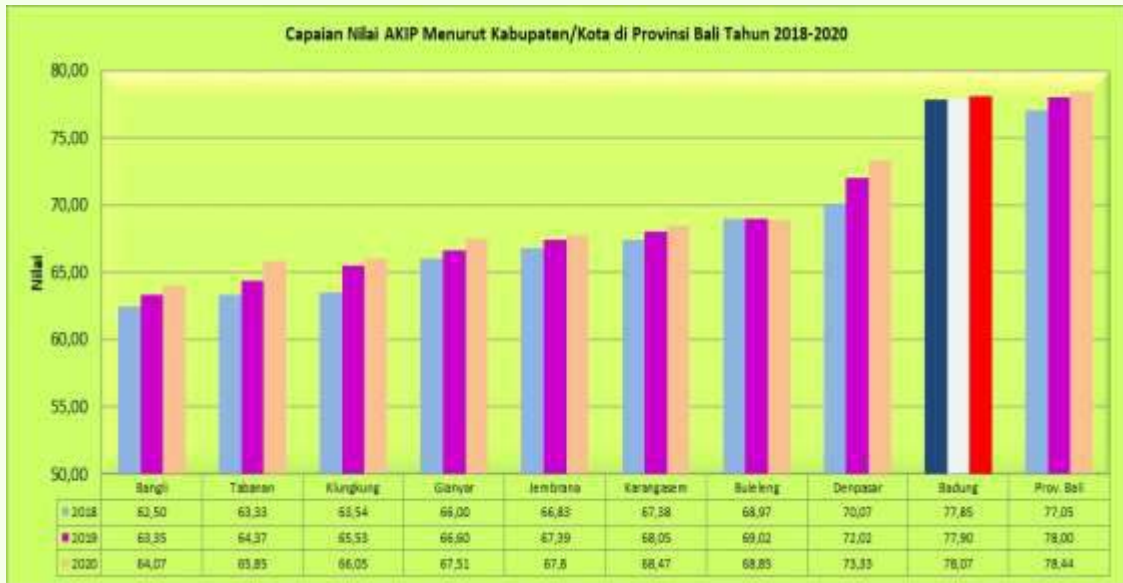
Hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja Kabupaten Badung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Bali menunjukkan nilai AKIP tertinggi. nilai AKIP Provinsi



Bali dibandingkan dengan nilai AKIP Kabupaten Badung menunjukkan nilai AKIP Provinsi Bali lebih tinggi 0,37 poin. Perbandingan nilai AKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat dilihat seperti grafik berikut :

Grafik 3.10

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020



Sedangkan menurut 5 (lima) komponen penilaian AKIP menunjukkan bahwa semua komponen penilaian mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut kecil dan belum optimal.

Grafik 3.11

Perbandingan Hasil Penilaian Komponen AKIP Kabupaten Badung Tahun 2018-2020





Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten didukung oleh 3 program 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten sebesar Rp. 287.386.801,- dengan realisasi sebesar Rp. 225.139.972,- dengan serapan anggaran sebesar 78,34 %.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengimplementasikan SAKIP menjadi budaya kinerja melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan serta evaluasi kinerja serta secara bertahap mengubah mindset ASN agar lebih berorientasi kinerja melalui upaya penyelarasan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran RPJMD. Melalui penerapan Pohon Kinerja dan *refocusing program* mampu mencegah *inefisiensi* anggaran dan kini telah dirasakan manfaatnya dengan adanya perubahan *mindset* dalam perencanaan dan penganggaran serta adanya efisiensi anggaran. Dengan adanya efisiensi program/kegiatan akan berdampak terhadap efisiensi anggaran.

Dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung maka berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran. Efektivitas dan efisiensi dengan penerapan sistem SAKIP di Kabupaten Badung seperti grafik berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta efisiensi Anggaran dengan Penerapan SAKIP Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Tahun	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Efisiensi Anggaran
2017	420	2930	-	133 Milyar
2018	418	2828		776 Milyar
2019	411	2389	-	1,6 Triliun
2020	394	1935	-	1.633.375.252.323,23
2021	174	433	1207	532.562.619.587

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Hasil efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 532.562.619.587 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.633.375.252.323,32, tahun 2019 sebesar 1,6 triliun, tahun 2018 sebanyak Rp. 776.032.414.731,96,-. Sedangkan efektivitas program dan kegiatan pada tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan dari 420 program dan kegiatan sebanyak 2,930 menjadi 174 program dan 433 kegiatan pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 telah menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai peraturan menteri dalam



negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk pemenuhan program dan kegiatan prioritas PPNSB.

Faktor pendorong terhadap pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten antara lain: Adanya komitmen Pimpinan kepala daerah untuk meningkatkan SAKIP, Adanya Tim SAKIP kabupaten yang memberikan bimbingan SAKIP ke perangkat daerah, Dukungan anggaran untuk implementasi kegiatan, Revisi RPJMD, penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan penyelarasan dokumen perencanaan serta *refocusing* program melalui *cross cutting* program telah menunjukkan peningkatan kualitas AKIP di Kabupaten Badung.

Faktor yang masih menjadi penghambat dalam implementasi SAKIP antara lain: komitmen beberapa pimpinan OPD masih belum optimal dimana implementasi SAKIP masih bersifat administratif (dokumen SAKIP), perubahan regulasi pada perencanaan dan keuangan seperti terbitnya permendagri 90 tahun 2019 dan pemberlakuan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), implementasi pohon kinerja kedalam dokumen anggaran belum dapat dilakukan, evaluasi internal kinerja oleh OPD belum optimal, belum optimalnya tindak lanjut OPD terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat, dan belum optimalnya kompetensi SDM tentang SAKIP.

Strategi dan upaya untuk lebih meningkatkan nilai SAKIP antara lain: revisi pedoman pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Badung melalui penyusunan peraturan bupati tentang implementasi SAKIP dan pedoman pelaksanaannya, pembinaan/bimtek SAKIP kepada kepala perangkat daerah/pejabat yang membidangi SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal capaian kinerja masing-masing perangkat daerah, pengembangan teknologi informasi untuk implementasi SAKIP dan pemberian Reward dan punishment bagi perangkat daerah.

Analisis Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Barang Milik

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan



Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

1. **Opini WTP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.
2. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
3. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW.
4. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak.

Hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah dengan indikator opini BPK tahun 2021 belum dapat diukur oleh karena sampai laporan ini disusun masih dalam tahap evaluasi Laporan



Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil capaian indikator opini WTP dari tahun 2017-2020 Kabupaten Badung memperoleh predikat WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%, berarti telah mencapai target yang ditetapkan.

Sebagai gambaran hasil capaian opini BPK tahun 2020 bila dibandingkan dengan target capaian akhir RPJMD maka capaian opini BPK telah mencapai target sesuai yang ditetapkan. Hasil capaian indikator opini BPK pada tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh predikat opini BPK kategori WTP. Target dan capaian indikator kinerja opini BPK dari tahun 2017 - 2021 seperti grafik berikut:

Grafik 3.12

Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Keterangan : 1. Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion) 2. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) 3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion) 4. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion).

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, dilakukan berbagai upaya melalui penyajian laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang baik mulai dari perencanaan sampai penatausahaan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor



13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dapat menyajikan data dan informasi nilai asset yang sebenarnya sesuai jenis-jenis asset, jumlah, keberadaan dan kondisinya.

Total nilai asset Pemerintah Kabupaten Badung sampai Tahun 2021 sebesar Rp. 18.593.094.766.904,6 lebih rendah dibandingkan dengan nilai asset tahun 2020 Sebesar Rp.19.969.791.308.492,9,-. Nilai asset tetap lebih tinggi dibandingkan dengan nilai asset tetap lainnya. Distribusi nilai asset Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2020-2021, sebagai berikut :

Grafik 3.13

Target dan Capaian Indikator Opini BPK Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2020-2021

Dengan komitmen dan upaya tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Badung telah tujuh kali berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Kabupaten Badung pada tahun 2014 - 2020 telah berhasil mempertahankan opini WTP sesuai dengan target yang ditetapkan. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti opini audit terhadap laporan keuangan yang diterbitkan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung oleh auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah didukung oleh 3 program, 4 kegiatan dan 6 Sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan program Penyelenggaraan Pengawasan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 943.730.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 101.750.962,- dengan serapan anggaran sebesar 10,78%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah meliputi : komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, adanya pendampingan dan kerjasama dengan BPKP perwakilan Bali dan kemendagri, pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah meliputi : masih adanya temuan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini dengan indikator opini BPK terhadap laporan keuangan daerah antara lain : penerapan pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP), prioritas transaksi keuangan secara non tunai, realisasi anggaran disesuaikan dengan anggaran kas, rekonsiliasi aset barang milik daerah secara berkala, pembinaan aset serta monitoring dan evaluasi keuangan dan aset BMD.

Analisis Kinerja Sasaran 6 : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Dan Bebas KKN

Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan perwujudan pemerintahan yang bebas dari berbagai penyimpangan khususnya dalam penggunaan wewenang dan pengelolaan keuangan negara, bebas KKN dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program reformasi birokrasi melalui percepatan 8 area perubahan RB dengan menetapkan sasaran terwujudnya pemerintah bersih dan bebas KKN dengan indikator indeks Reformasi Birokrasi.



Indeks reformasi birokrasi diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (*Enablers*) dan Hasil (*Results*). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

No.	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	> 30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, kategori hasil evaluasi menjadi 7 kategori.

Hasil capaian sasaran terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) untuk tahun 2021 belum dapat diukur oleh karena sampai laporan ini disusun hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sebagai bahan perbandingan hasil capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2020 sebesar 72,78 dari target kinerja sebesar sebesar 73,50 atau kinerjanya sebesar 99,02%. Hasil capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 belum mencapai target yang ditetapkan pada Akhir RPJMD semesta berencana 2016-2021 dengan nilai Indeks RB sebesar 75. Hasil capaian indikator indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung seperti tabel berikut:



Grafik 3.14

Target dan Capaian indikator Kategori PMPRB dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Sekretariat Daerah Kab. Badung, 2021

Distribusi hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali, bahkan nilai IRB Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi Bali. Perbandingan hasil capaian indikator indeks Reformasi Birokrasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seperti tabel berikut:

Grafik 3.8

Perbandingan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Badung dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

NO	PEMDA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Bali	64,44	66,16	67,29	69,31	69,49
2	Badung	65,5	72,15	70,92	73,62	72,78
3	Denpasar	60,67	60,45	64,51	68,63	68,73
4	Gianyar	54,17	-	58,48	60,23	56,15
5	Tabanan	-	-	58,77	60,61	61,26
6	Jembrana	-	-	58,32	59,72	57,87
7	Buleleng	-	-	57,77	58,56	60,58
8	Klungkung	-	-	57,26	57,85	58,62
9	Bangli	-	-	56,25	58,81	58,49
10	Karangasem	-	-	-	48,69	50,07



Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan 2 komponen yaitu komponen pengungkit (60%) dan hasil (40%). Hasil capaian komponen pengungkit sebesar 64,13% dari total nilai pengungkit sebesar 60%, sedangkan komponen hasil sebesar 85,75% dari total nilai komponen hasil sebesar 40%. Hasil secara lengkap terhadap evaluasi reformasi birokrasi komponen pengungkit dan hasil Kabupaten Badung Tahun 2020 seperti grafik berikut :

Tabel 3.9

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komponen Pengungkit dan Hasil Kabupaten Badung Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2020	% Capaian
A.	Komponen Pengungkit			
1.	Pemenuhan	20	14,28	71,40
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10	7,12	71,20
3.	Reform	30	17,08	56,93
	Total Nilai Pengungkit	60	38,48	64,13
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,45	84,50
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,90	89,00
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari KKN	10	9,20	92,00
4.	Kinerja Organisasi	10	7,75	77,50
	Total Komponen Hasil	40	34,30	85,75
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100	72,78	72,78

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Kementerian PAN-RB, 2021

Hasil Penilaian komponen pengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB tahun 2020 diperoleh informasi bahwa nilai pemenuhan sebesar 14,28 dari target sebesar 20, Nilai hasil antara area perubahan sebesar 7,12 dari target sebesar 10 dan nilai reform sebesar 17,08 dari target sebesar 30. Total capaian nilai pengungkit sebesar 38,48 dari nilai bobot pengungkit sebesar 60%.

Sedangkan hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dari komponen hasil diperoleh informasi, dari empat unsur yang dinilai diperoleh hasil capaian sebesar 34,30 dari bobot sebesar 40%.

Upaya untuk mewujudkan sasaran terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN didukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.124.340.494,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.239.696.070,- dengan serapan anggaran sebesar 58,36%.

Faktor pendorong dalam pencapaian sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN antara lain: penguatan komitmen pimpinan, adanya tim pengarah dan pelaksana RB kabupaten, adanya Tim internal RB perangkat daerah, penguatan implementasi terhadap 8 area perubahan.



Faktor yang menjadi kendala antara lain: Perubahan regulasi dalam implementasi reformasi birokrasi yang cepat, Keterbatasan pemahaman dalam tim RB internal OPD terhadap pelaksanaan rencana kerja RB, minimnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi, belum optimalnya evaluasi internal secara berkala terhadap capaian rencana aksi RB, keterbatasan dalam pemahaman evaluasi (LKE PMPRB), Belum optimalnya pemahaman Inspektorat maupun perangkat daerah terkait SPIP, dan Kabupaten Badung belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko (MR).

Upaya yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan RB antara lain melalui perubahan *mindset* dan gerakan revolusi mental ASN, percontohan pelaksanaan RB pada perangkat daerah melalui pembangunan ZI, pelaksanaan seleksi terbuka JPT, seleksi CPNS melalui CAT, penguatan APIP, Penerapan SAKIP, penerapan implementasi SPBE, penyederhanaan birokrasi, peningkatan implementasi pengawasan (grafifikasi, SPIP, pencegahan korupsi), penandatanganan fakta Integritas oleh seluruh ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang aman, nyaman, cepat, murah, dan transparan.

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan RB diantaranya melalui pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana RB, Penyusunan *Road Map* RB 2021 – 2026, penyusunan rencana kerja RB perangkat daerah tahun 2021-2026, pembentukan tim tingkat kabupaten dan perangkat daerah, penetapan zona integritas, Penyusunan Budaya Kerja, penguatan dan penataan kelembagaan (penyederhanaan birokrasi), penguatan dan penataan akuntabilitas, penguatan SDM, penguatan dan penataan ketatalaksanaan, diregulasi perundang-undangan, dan pelaksanaan evaluasi RB melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Analisis Kinerja Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk



mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Kategori nilai indeks pembangunan manusia dikategorikan menjadi 4 kelompok, meliputi :

- a. Sangat tinggi : IPM >80
- b. Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- c. Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- d. Rendah : IPM <60

Hasil capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung tahun 2021 sebesar 81,83 dari target yang ditetapkan sebesar 81,57 sehingga kinerjanya sebesar 100,32%. Hasil capaian IPM tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan tahun 2021. Hasil capaian IPM sebesar 81,83 termasuk dalam kategori sangat tinggi (IPM>80).

Hasil capaian IPM pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 81,60 dan bila dibandingkan dengan target capaian pada akhir RPJMD maka capaian IPM tahun 2021 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,57. Hasil capaian indeks pembangunan manusia periode 2017-2021 menunjukkan kecenderungan/trend meningkat setiap tahunnya dan melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hasil capaian sasaran strategis RPJMD meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti grafik berikut:

Grafik 3.15
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021





Hasil capaian IPM Kabupaten Badung bila dibandingkan dengan hasil capaian Kabupaten/Kota se Bali, menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Badung menduduki peringkat kedua setelah Kota Denpasar. Demikian pula hasil capaian IPM Kabupaten Badung lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Bali dan angka Nasional. Perbandingan capaian IPM Kabupaten Badung dengan Kab./Kota di Provinsi Bali dan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.10
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Badung	79.80	80.54	80,87	81,59	81,6	81.83
2	Kab. Bangli	67.03	68.24	68,96	69,35	69,36	69.37
3	Kab. Buleleng	70.65	71.11	71,7	72,3	72,55	72.56
4	Kab. Gianyar	75.70	76.09	76,61	77,14	77,36	77.70
5	Kab. Jembrana	70.38	70.72	71,65	72,35	72,36	72.75
6	Kab. Karangasem	65.23	65.57	66,49	67,34	67,35	67.36
7	Kab. Klungkung	69.31	70.13	70,9	71,71	71,73	71.75
8	Kab. Tabanan	74.19	74.86	75,45	76,16	76,17	76.45
9	Kota Denpasar	82.58	83.01	83,3	83,68	83,93	84.03
	Provinsi Bali	73.65	74.30	74,77	75,38	75,5	75.69
	INDONESIA	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72.29

Sumber Data : BPS Pusat Tahun 2021

Distribusi capaian IPM menurut Provinsi di Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa provinsi dengan capaian IPM paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,11 dan yang terendah Provinsi Papua sebesar 60,62. Distribusi IPM menurut provinsi di Indonesia tahun 2021 seperti berikut:



Grafik 3.16

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi
di Indonesia Tahun 2021



Sumber Data: Badan Pusat Statistik , 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

- **Kesehatan**, diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran
- **Pendidikan**, dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak**, dihitung dari produk nasional bruto per kapita

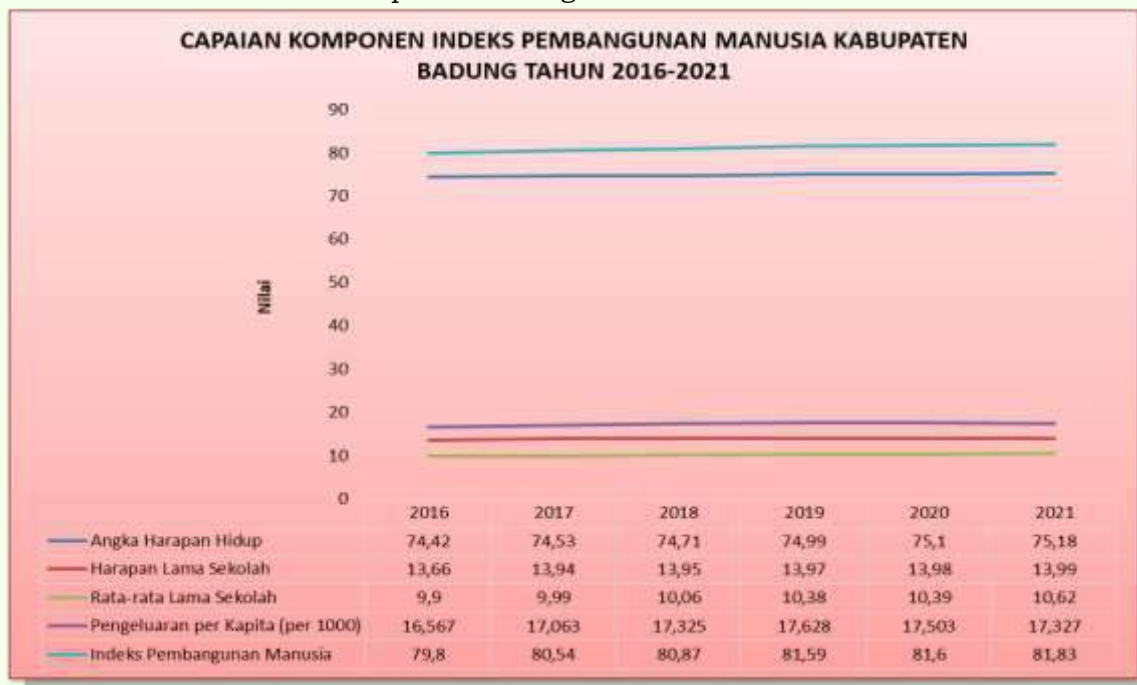
Berdasarkan dimensi dasar indeks pembangunan manusia untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa dari dimensi kesehatan diukur dengan angka umur harapan hidup di Kabupaten Badung sebesar 75,18 Tahun, berarti bayi yang baru lahir pada tahun 2021 akan berpeluang untuk hidup mencapai umur 75,18 tahun.

Dari dimensi pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah selama 13,99 tahun, berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau Diploma dua (D2). Berdasarkan indikator rata-rata lama sekolah capaian Kabupaten Badung sebesar 10,62 tahun, berarti bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Badung pada tahun 2021 mencapai 10,62 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas XI (SMA kelas II).



Sedangkan dari dimensi ekonomi/standar hidup layak yang diukur pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) sebesar Rp. 17.327.000,- berarti pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Badung mencapai Rp. 17.327.000,- per tahun. Pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Badung pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp. 17,503.000,- hal ini dampak langsung dari pandemi COVID-19. Adapun distribusi tiga dimensi dasar indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Sebagai berikut:

Grafik 3.17
Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Distribusi hasil capaian masing-masing dimensi indeks pembangunan manusia (IPM) menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa untuk dimensi kesehatan, dengan indikator umur harapan hidup (UHH), capaian umur harapan hidup Provinsi Bali sebesar 72,24 tahun, sedangkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa capaian yang paling tinggi adalah Kabupaten Badung sebesar 75,18 tahun dan capaian yang terendah Kabupaten Karangasem sebesar 70,56 tahun.

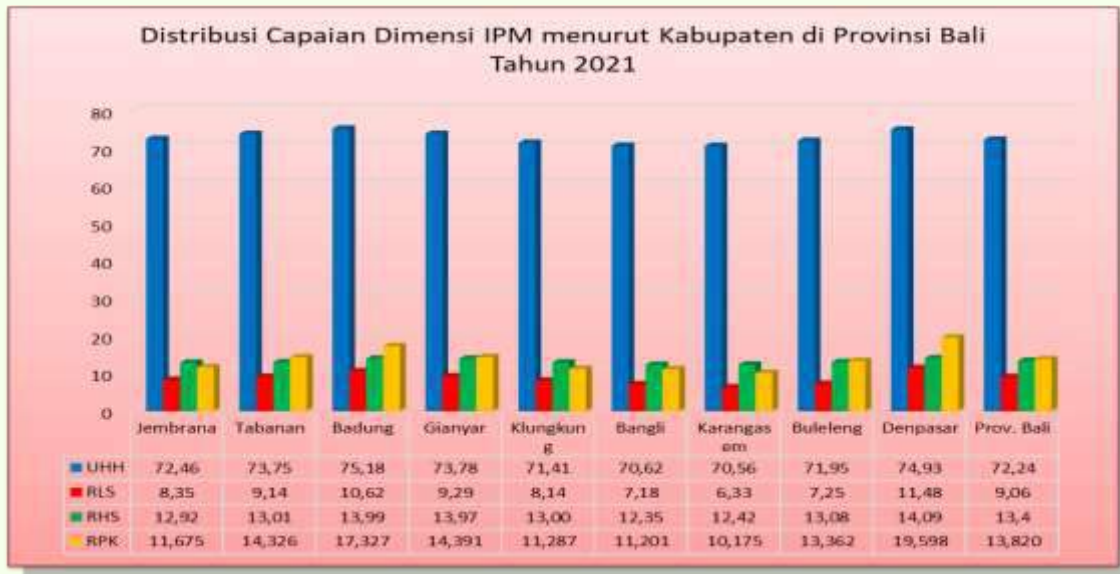
Untuk dimensi pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah, menunjukkan bahwa capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Bali sebesar 9,06 tahun, sedangkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa capaian yang paling tinggi dicapai Kota Denpasar sebesar 11,48 tahun dan yang terendah Kabupaten Karangasem sebesar 6,33 tahun. Berdasarkan indikator rata-



rata harapan lama sekolah menunjukkan rata-rata harapan sekolah Provinsi Bali sebesar 13,4 tahun, sedangkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa bahwa Kota Denpasar dengan capaian paling tinggi sebesar 14,09 tahun, sedangkan capaian yang terendah Kabupaten Bangli sebesar 12,35

Dimensi ekonomi dengan indikator rata-rata pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa capaian untuk Provinsi Bali sebesar Rp. 13.820.000,- sedangkan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa capaian yang paling tinggi adalah Kota Denpasar sebesar Rp. 19.598.000,- dan capaian yang terendah adalah Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 10.175.000,-. Data capaian dimensi indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali seperti grafik berikut :

Grafik 3.18
Capaian Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pencapaian indikator IPM tidak terlepas dari upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program untuk meningkatkan ketiga aspek indeks pembangunan manusia.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung oleh 3 program, 7 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan program Pengelolaan Pendidikan

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp. 440.083.900.540,- dengan realisasi sebesar Rp. 363.874.087.403,71,- dengan serapan anggaran sebesar 82,68%.



Faktor pendorong meningkatnya indeks pembangunan manusia antara lain: peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat (*total coverage*) yang ditanggung pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS kesehatan, pelayanan kesehatan tambahan untuk penyakit yang diluar tanggungan BPJS, pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas rawat inap, peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan ruang kelas belajar, pendidikan formal dan non formal paket A,B dan C serta peningkatan kesempatan kerja pada sektor pertanian dan pariwisata.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan melalui: peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pendirian puskesmas dan rumah sakit, peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak. Untuk peningkatan pendidikan ditengah pandemi COVID-19 maka proses belajar mengajar dilakukan secara daring (siswa belajar dirumah) dengan pemberian paket internet kepada siswa, peningkatan pembangunan ruang belajar siswa untuk pendidikan dasar dan menengah, pendidikan luar sekolah, Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk peningkatan pendapatan dilakukan dengan cara meningkatkan kegiatan penunjang pariwisata, infrastruktur, pertanian hortikultura, perikanan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga berdampak terhadap penghasilan atau daya beli masyarakat.

Analisis Kinerja Sasaran 8 : Meningkatnya Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tiga dimensi yaitu : kepuasan hidup (*life satisfaction*), perasaan (*Affect*) dan makna hidup (*Eudaimonia*) dengan skala 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai indeks, maka penduduk semakin tidak bahagia. Beberapa variabel utama, dalam menentukan Indeks Kebahagiaan antara lain : Kepuasan terhadap kondisi kesehatan, Kepuasan terhadap pendidikan dan keterampilan, Kepuasan terhadap pekerjaan, Kepuasan terhadap pendapatan rumah tangga, Kepuasan terhadap kondisi keamanan, Kepuasan terhadap hubungan sosial, Kepuasan terhadap ketersediaan waktu luang, Kepuasan terhadap kondisi rumah, Kebahagiaan hidup, Harapan/keinginan yang sudah tercapai, Kepuasan hidup, Kepuasan terhadap kondisi lingkungan, Kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.



Pengukuran sasaran meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat diukur dengan indikator indeks kebahagiaan untuk tahun 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan oleh karena adanya refocusing anggaran untuk pengendalian COVID 19, pelaksanaan survei tidak bisa dilakukan ditengah pandemi COVID19 dengan penerapan protokol kesehatan serta adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan/bermakna terutama penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) dari sektor pariwisata dampak pandemi COVID 19. Oleh karena itu indikator indeks kebahagiaan tahun 2020 dan 2021 tidak ada dan kinerjanya tidak bisa diukur.

Sebagai perbandingan hasil pengukuran indikator Indeks kebahagiaan tahun 2019 sebesar 76,14 dan bila dibandingkan dengan target pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil capaian telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,49. Hasil capaian indikator Indeks kebahagiaan tahun 2019 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2021. Secara lengkap target dan capaian indikator indeks kebahagiaan Kabupaten Badung seperti grafik berikut:

Grafik 3.19

Target dan Capaian Indikator Indeks Kebahagiaan
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung, 2019

Capaian Indeks Kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2019 sebesar 76,14 berarti lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Bali yang berada pada nilai indeks kebahagiaan pada tahun 2017 sebesar 72,48 dan tahun 2021 sebesar 71,44. Sedangkan capaian indeks kebahagiaan Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan



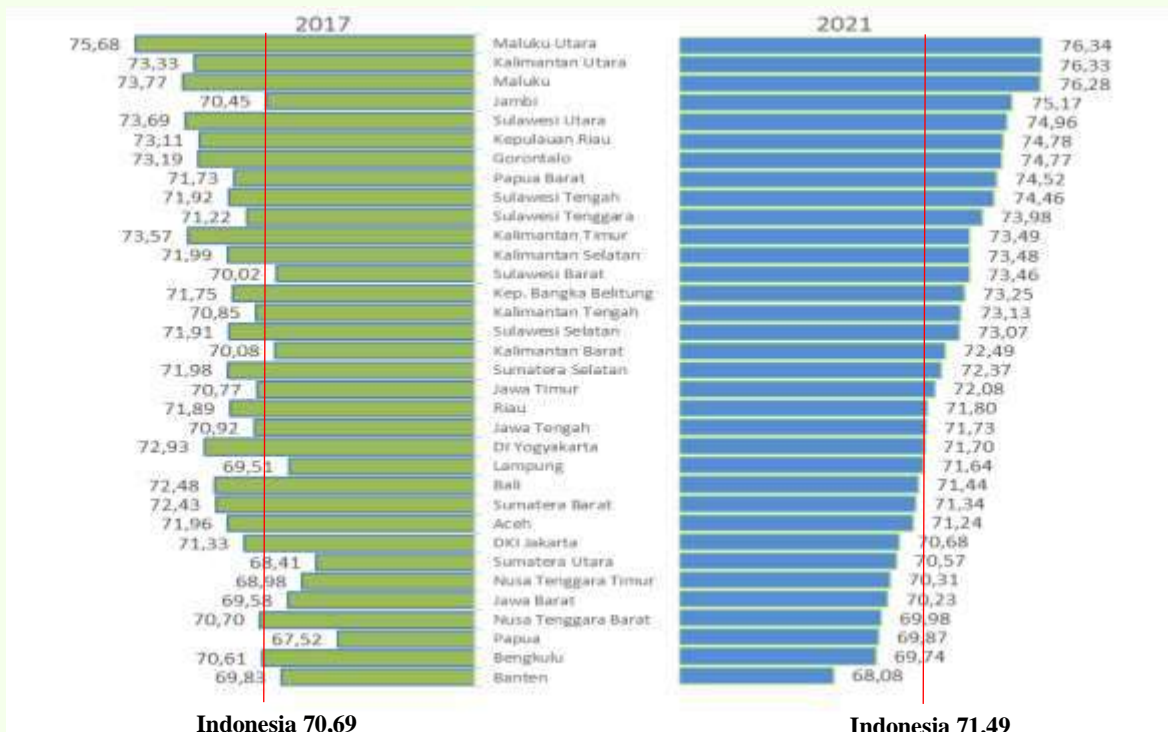
dengan Indeks Kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 sebesar 70,69 dan tahun 2021 sebesar 71,49 pada skala 0 sampai 100.

Indeks Kebahagiaan masyarakat di wilayah Indonesia tahun 2021 meningkat sebesar 0,80 poin dibanding tahun 2017. Peningkatan Indeks Kebahagiaan juga terjadi pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan peningkatan terbesar dibanding provinsi lain adalah Jambi, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara, masing-masing sebesar 4,72 poin, 3,44 poin dan 3,00 poin.

Terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu untuk kawasan Sumatera. Untuk kawasan Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang turut mengalami penurunan Indeks Kebahagiaan yaitu: DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk kawasan Kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur. Sementara Banten menempati posisi terbawah, sebagai provinsi paling tidak bahagia di Indonesia. Adapun distribusi indeks kebahagiaan menurut provinsi di Indonesia tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.20

Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017 dan 2021



Sumber Data : Indeks Kebahagiaan, BPS RI 2021

Indeks kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi, antara lain dimensi kepuasan hidup, dimensi makna hidup dan dimensi perasaan. Setiap dimensi penyusun Indeks

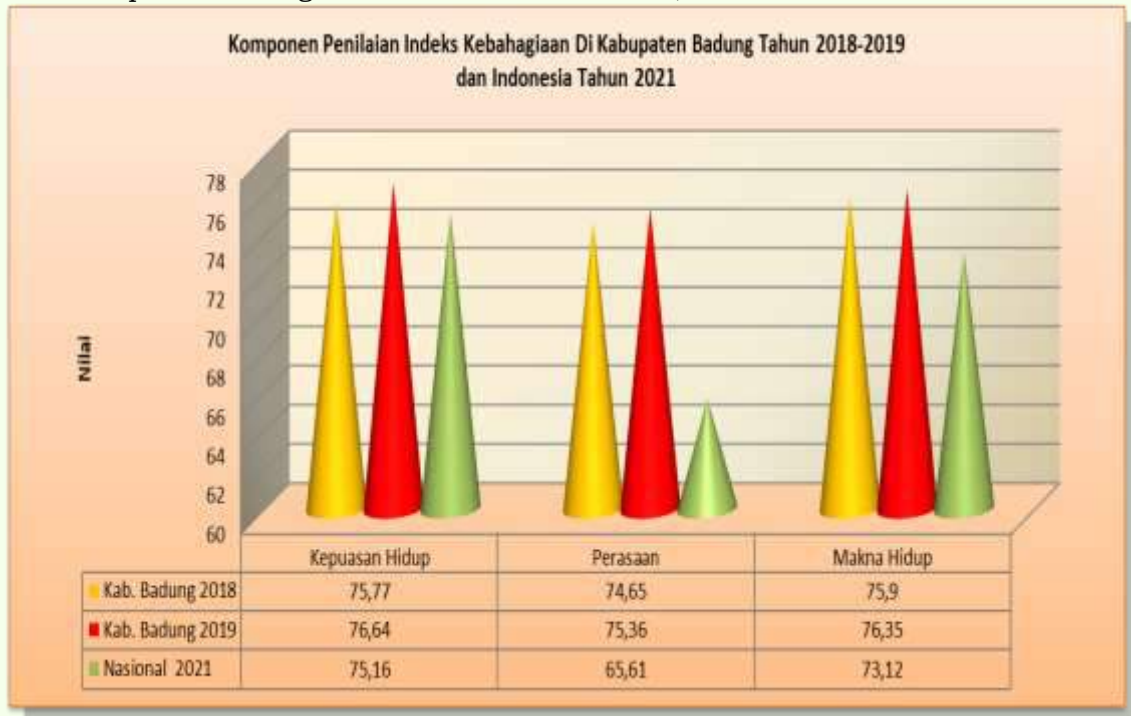


Kebahagiaan memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam menyusun Indeks Kebahagiaan. Distribusi indeks kebahagiaan Kabupaten Badung tahun 2019 menurut dimensi kepuasan hidup sebesar 76,64, dimensi makna hidup sebesar 75,36 dan dimensi perasaan sebesar 76,35.

Distribusi dimensi indeks kebahagiaan di Indonesia menunjukkan bahwa dimensi yang berkontribusi terbesar dalam penyusunan Indeks Kebahagiaan adalah Dimensi Kepuasan Hidup, yaitu sebesar 75,16. Dimensi Makna Hidup sebesar 73,12 dan dimensi Perasaan sebesar 65,61. Adapun perbandingan dimensi indeks kebahagiaan di Kabupaten Badung tahun 2018-2019 dan Indonesia tahun 2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.21

Perbandingan Hasil penilaian Indikator Indeks Kebahagiaan menurut komponen Di Kabupaten Badung dan Indonesia Tahun 2018, 2019 dan Indonesia Tahun 2021



Sumber Data : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Badung, 2019

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat didukung oleh 3 program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, dan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.



Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 126976584885,- dengan realisasi sebesar Rp. 114667317071,- dengan serapan anggaran sebesar 90,31%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung antara lain: program pelayanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah dengan total *coverage*, pendidikan gratis bagi usia sekolah dasar dan menengah, pemberian laptop untuk siswa, pemberian pakaian sekolah bagi siswa, pembangunan sekolah menengah (SMP) beserta penambahan ruang kelas, jaminan sosial (santunan lansia) untuk penduduk lanjut usia diatas 72 tahun keatas, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan untuk perbaikan rumah, pemberian bantuan usaha ekonomi kreatif, bantuan usaha pertanian dan peternakan, bantuan sosial kemasyarakatan untuk keagamaan serta program lainnya sehingga tidak membebani masyarakat.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung antara lain: pandemic covid 19 yang mepuyai dampak pada penurunan kualitas kesehatan, peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran, pembatasan kegiatan social kemasyarakatan sehingga mengurangi aspek kebahagiaan serta berkurangnya kegiatan kepariwisataan.

Upaya-upaya akan terus dilakukan untuk lebih meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat dengan terus melaksanakan program-program yang telah ada antara lain: peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan akses terhadap pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), rasa aman, peningkatan jaminan sosial, peningkatan penyerapan tenaga kerja, perlindungan keluarga miskin serta masyarakat yang termarginalkan, PMKS serta perbaikan lingkungan pemukiman.

Analisis Kinerja Sasaran 9 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Faktor kemiskinan bukan saja akibat masalah fisik atau rumah semata-mata, namun dipengaruhi faktor kemudahan akses dan mentalitas.

Pemerintah Kabupaten Badung sangat serius dalam pengetasan kemiskinan sebagai upaya untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen maka sasaran strategis RPJMD salah satunya untuk

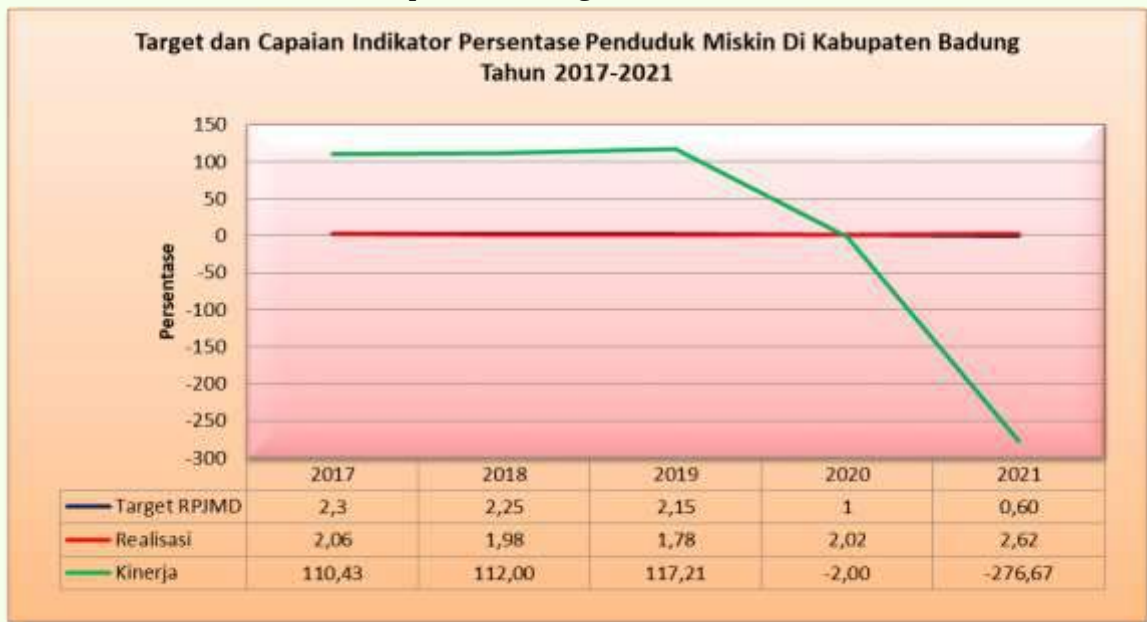


menurunkan angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin dengan formula jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk kali 100.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2021 sebesar 2,62% dari target sebesar 0,60%-0,4% berarti capaian kinerjanya sebesar -276,67% berarti belum mencapai target yang ditetapkan. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2021 lebih tinggi capaiannya dibandingkan tahun 2020 sebesar 2.02%.

Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan bahwa capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,60-0,40%. Hasil capaian indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 dan 2021, mengalami peningkatan yang sangat bermakna, hal ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemic COVID 19 sangat berdampak (*multifier effect*) terhadap sektor pariwisata yang merupakan lokomotif sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Badung. Secara lengkap target dan realisasi indikator persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.22
Target dan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021



Data jumlah dan persentase penduduk tergolong miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2016-2019 masih terkendali antara 1,78% - 2,06%, namun mulai tahun 2020-2021 cenderung meningkat. Peningkatan penduduk miskin di Kabupaten Badung pada tahun 2020 sebanyak 1.860 orang dan meningkat lagi tahun 2021 sebesar 4.770 orang, hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap sektor pariwisata Kabupaten Badung. Adapun rincian perkembangan jumlah penduduk miskin periode 2016-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.23

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung termasuk *hardrock poverty*, dimana kondisi kemiskinan sudah sangat rendah, sehingga memerlukan komitmen dan kerja keras karena sudah sangat sulit untuk diturunkan bagaikan memecah batu karang yang sangat keras. Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Bali, dalam 10 tahun terakhir tingkat trend kemiskinan di Badung selalu berada dibawah kemiskinan Provinsi Bali.

Distribusi Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali periode tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Kabupaten Badung dengan persentase



penduduk miskin yang paling rendah dengan kisaran angka 2%, sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Karangasem dengan kisaran angka sebesar 6%. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota dibali tahun 2016-2020 menunjukkan kabupaten dengan persentase kemiskinan terus mengalami penurunan seperti Kabupaten Jembrana, Klungkung, Bangli dan Karangasem. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung tahun 2021 dibawah angka Nasional sebesar 9,78%. Secara Lengkap distribusi persentase penduduk miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali seperti grafik berikut:

Tabel 3.11
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Kota di Provinsi Bali
Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Jembrana	5.33	5.38	5.20	4.88	4.51	5.06
2	Kab. Tabanan	5.00	4.92	4.46	4.21	4.27	5.12
3	Kab. Badung	2.06	2.06	1.98	1.78	2.02	2.62
4	Kab. Gianyar	4.44	4.46	4.19	3.88	4.08	4.85
5	Kab. Klungkung	6.35	6.29	5.86	5.40	4.87	5.64
6	Kab. Bangli	5.22	5.23	4.89	4.44	4.19	5.09
7	Kab. Karangasem	6.61	6.55	6.28	6.25	5.91	6.78
8	Kab. Buleleng	5.79	5.74	5.36	5.19	5.32	6.12
9	Kota Denpasar	2.15	2.27	2.24	2.10	2.14	2.96
10	Provinsi Bali	4.25	4.25	4.01	3.79	3.78	4.53

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Tahun 2021

Distribusi Persentase penduduk miskin menurut provinsi di Indonesia tahun 2016-2021 menunjukkan persentase penduduk miskin yang paling rendah Provinsi Bali, pada tahun 2021 sebesar 4,53%, sedangkan yang paling tinggi di Provinsi Papua, pada tahun 2021 sebesar 26,86%. Kecendrungan Prosentase penduduk miskin pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 menunjukkan bahwa Provinsi Bali mengalami peningkatan penduduk miskin paling tinggi sebesar 0,75%



sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar -0,02% (berarti pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase masyarakat miskin sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2020) dan untuk tingkat nasional terjadi penurunan persentase penduduk miskin sebesar -0,07%.

Distribusi persentase penduduk miskin menurut Provinsi Bali di Indonesia seperti tabel berikut:

Tabel 3.12

Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021

No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (Tahun)						Trend
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	ACEH	16,43	15,92	15,68	15,01	14,99	15,33	0,34
2	SUMATERA UTARA	10,27	9,28	8,94	8,63	8,75	9,01	0,26
3	SUMATERA BARAT	7,14	6,75	6,55	6,29	6,28	6,63	0,35
4	RIAU	7,67	7,41	7,21	6,90	6,82	7,12	0,3
5	JAMBI	8,37	7,90	7,85	7,51	7,58	8,09	0,51
6	SUMATERA SELATAN	13,39	13,10	12,82	12,56	12,66	12,84	0,18
7	BENGKULU	17,03	15,59	15,41	14,91	15,03	15,22	0,19
8	LAMPUNG	13,86	13,04	13,01	12,30	12,34	12,62	0,28
9	KEP. BANGKA BELITUNG	5,04	5,30	4,77	4,50	4,53	4,9	0,37
10	KEP. RIAU	5,84	6,13	5,83	5,80	5,92	6,12	0,2
11	DKI JAKARTA	3,75	3,78	3,55	3,42	4,53	4,72	0,19
12	JAWA BARAT	8,77	7,83	7,25	6,82	7,88	8,4	0,52
13	JAWA TENGAH	13,19	12,23	11,19	10,58	11,41	11,79	0,38
14	DI YOGYAKARTA	13,1	12,36	11,81	11,44	12,28	12,8	0,52
15	JAWA TIMUR	11,85	11,20	10,85	10,20	11,09	11,4	0,31
16	BANTEN	5,36	5,59	5,25	4,94	5,92	6,66	0,74
17	BALI	4,15	4,14	3,91	3,61	3,78	4,53	0,75
18	NUSA TENGGARA BARAT	16,02	15,05	14,63	13,88	13,97	14,14	0,17
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22,01	21,38	21,03	20,62	20,90	20,99	0,09
20	KALIMANTAN BARAT	8,00	7,86	7,37	7,28	7,17	7,15	-0,02
21	KALIMANTAN TENGAH	5,36	5,26	5,10	4,81	4,82	5,16	0,34
22	KALIMANTAN	4,52	4,70	4,65	4,47	4,38	4,83	0,45



No	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (Tahun)						Trend
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020 thd 2021
	SELATAN							
23	KALIMANTAN TIMUR	6,00	6,08	6,06	5,91	6,10	6,54	0,44
24	KALIMANTAN UTARA	6,99	6,96	6,86	6,49	6,80	7,36	0,56
25	SULAWESI UTARA	8,2	7,90	7,59	7,51	7,62	7,77	0,15
26	SULAWESI TENGAH	14,09	14,22	13,69	13,18	12,92	13	0,08
27	SULAWESI SELATAN	9,24	9,48	8,87	8,56	8,72	8,78	0,06
28	SULAWESI TENGGARA	12,77	11,97	11,32	11,04	11,00	11,66	0,66
29	GORONTALO	17,63	17,14	15,83	15,31	15,22	15,61	0,39
30	SULAWESI BARAT	11,19	11,18	11,22	10,95	10,87	11,29	0,42
31	MALUKU	19,26	18,29	17,85	17,65	17,44	17,87	0,43
32	MALUKU UTARA	6,41	6,44	6,62	6,91	6,78	6,89	0,11
33	PAPUA BARAT	24,88	23,12	22,66	21,51	21,37	21,84	0,47
34	PAPUA	28,4	27,76	27,43	26,55	26,64	26,86	0,22
	INDONESIA	10,7	10,12	9,66	9,22	9,78	9,71	-0,07

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2021

Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program-program strategis dalam penanganan kemiskinan. Program tersebut dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial. Penanganan kemiskinan ini telah tercantum dalam program *Asta Marga Utama Desa* yang utamanya untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Upaya untuk mewujudkan sasaran menurunnya angka kemiskinan didukung oleh 5 program, 7 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pemberdayaan Sosial, program Rehabilitasi Sosial, program Perlindungan dan Jaminan Sosial, program Penanganan Bencana, dan program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 45.979.453.874,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.389.780.709,- dengan serapan anggaran sebesar 37,82%.

Dengan kondisi pandemi COVID19 berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Badung. Dalam kondisi demikian Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen dalam percepatan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program seperti program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan, program



pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, penertiban dan pembinaan kepada penyandang masalah sosial dengan cara melakukan koordinasi lintas instansi/daerah dalam upaya kerjasama penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintahan terdepan di desa/kelurahan, sehingga bila terdapat warga disabilitas di wilayah tersebut maka penyandang disabilitas tersebut dapat segera memperoleh pelayanan maupun bantuan alat bantu kecacatan, Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, serta upaya mencegah bertambahnya kemiskinan melalui program pemberian santunan penunggu pasien, dan pemberian perlindungan sosial bagi lansia (santunan lansia).

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Badung melalui : pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, memberikan bantuan sosial sembako kepada masyarakat Kabupaten Badung sebagai social safety net sebagai bentuk dukungan dalam mengurangi beban keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid-19 dan Mengoptimalkan peran dan partisipasi dunia usaha dalam Program Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Analisis Kinerja Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM Terhadap PDRB

Produkt Domestik Bruto pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan khususnya di Kabupaten Badung, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian masyarakat dan telah terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat pada saat krisis ekonomi atau sekarang adanya pandemic Covid-19 disumbang oleh usaha mikro kecil dan menengah.

Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah dengan memasukkan pada sasaran strategis pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021.

Sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Penetapan target kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB berdasarkan 3 lapangan usaha yaitu industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Khusus untuk sektor UMKM dipakai 75% dari kontribusi 3 lapangan usaha tersebut. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Hasil capaian pengukuran terhadap sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB dengan indikator persentase kontribusi sektor UMKM Terhadap PDRB menunjukkan bahwa hasil capaian tahun 2021 sebesar 10,7% dari target yang ditetapkan sebesar 7,91% sehingga kinerjanya sebesar 135,27%, berarti telah mencapai target RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian indikator capaian indikator persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB pada tahun 2021 melampaui capaian tahun 2020 sebesar 9,78%. Demikian juga capaian indikator Persentase Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB pada tahun 2021 melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,91%. Hasil capaian indikator persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB pada tahun 2017-2021 seperti pada grafik berikut :



Grafik 3.24

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Distribusi PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku menurut lapangan kerja tahun 2016-2021 untuk lapangan usaha industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Jasa Perusahaan sebagai komponen usaha mikro kecil dan menengah menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021 seperti tabel berikut :

Tabel 3.13

Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82	7,45	8,5
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27	0,34	0,36
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63	4,43	4,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21	0,27	0,27
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79	11,18	11,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38	7,78	8,57



	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99	17,2	12,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67	24,61	23,25
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60	7,98	9,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46	3,05	3,32
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14	4,07	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67	0,83	0,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13	4,05	4,47
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99	3,9	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28	1,75	1,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78	0,95	1,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016-2021

Upaya pencapaian target 2021 didukung oleh bertambahnya industri pengolahan/manufacturing serta meningkatnya komponen perdagangan yang dilakukan oleh UMKM melalui program pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta adanya program inovasi berupa Klinik UMKM serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tera ulang sekaligus memberikan perlindungan/keamanan kepada konsumen. Dengan demikian, sektor UMKM diharapkan semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB didukung oleh 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pengembangan UMKM, program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis, program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan program Perekonomian dan Pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 755.647.859,- dengan realisasi sebesar Rp.562.054.336,- dengan serapan anggaran sebesar 74,38%.

Faktor pendorong dalam capaian sasaran meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB meliputi :

- a. Sifat koperasi yang terbuka untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar



- b. Pelatihan-pelatihan dan pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Badung kepada UKM dan Koperasi untuk memajukan kemampuan mereka dibidangteknologi proses, desain ataupun manajemen
- c. Kemudahan administrasi dalam proses penerbitan ijin perusahaan di Kabupaten Badung

Faktor penghambat dalam capaian sasaran meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah
- b. Kesadaran anggota dalam berkoperasi masih rendah
- c. SDM pelaku usaha masih perlu ditingkatkan
- d. Belum optimal kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin perdagangan ataupun Koperasi

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB antara lain peningkatan manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM, pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan kemudahan akses modal, promosi/pameran kerajinan, Pelayanan klinik UMKM, revitalisasi pasar rakyat serta kegiatan yang meningkatkan pemasaran hasil produksi UMKM.

Analisis Kinerja Sasaran 11 : Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda Dan Perkada

Sesuai visi RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 Kabupaten Badung berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, artinya pemerintah menjamin masyarakat untuk merasa aman dan nyaman terhadap terjadinya berbagai pelanggaran terhadap Perda dan Perkada khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kebersihan lingkungan. Komitmen tersebut tertuang dalam sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya pencegahan pelanggaran peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) dengan indikator persentase pencegahan perda dan perkada. Formula dari indikator persentase pencegahan perda dan perkada adalah Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada dengan indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga kinerjanya sebesar 105,26% berarti telah melampaui target RPJMD tahun 2021.



Hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 92,03%. Sedangkan hasil capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2021 telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 95%. Gambaran target dan capaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.25

Target dan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Perda dan Perkda di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Satuan Polisi Praja Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

Berdasarkan data yang ada selama tahun 2021 terdapat indikasi pelanggaran perda/perkada sebanyak 2.921 potensi pelanggaran, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.107, tahun 2019 sebanyak 2.198 berarti pada tahun 2021 terdapat peningkatan potensi pelanggaran perda dan perkada di Kabupaten Badung. Dari 2.921 kasus potensi pelanggaran yang ada maka yang dapat dicegah sebanyak 2.921 atau sebesar 100%. Berbagai upaya pencegahan dilakukan terhadap indikasi pelanggaran melalui tindakan preventif serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Secara lengkap jenis potensi pelanggaran yang dapat dicegah seperti tabel berikut:



Tabel 3.14
Jenis Potensi Pelanggaran yang dapat di Cegah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN N	JENIS POTENSI PELANGGARAN								JML	POTENSI PELANGGARAN DI CEGAH								JUML AH	Realis asi
		1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Petang	2	1	0	0	0	0	2	74	79	2	1	0	0	0	0	2	74	79	100,0
2	Abiansemal	2	0	0	0	0	0	0	176	178	2	0	0	0	0	0	0	176	178	100,0
3	Mengwi	6	4	6	4	0	0	0	693	713	6	4	6	4	0	0	0	693	713	100,0
4	Kuta Utara	7	5	8	2	0	0	10	1258	1290	7	5	8	2	0	0	10	1258	1290	100,0
5	Kuta	0	1	4	20	0	0	5	427	457	0	1	4	20	0	0	5	427	457	100,0
6	Kuta Selatan	0	0	0	0	0	0	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204	100,0
	Kabupaten	17	11	18	26	0	0	17	2832	2921	17	11	18	26	0	0	17	2832	2921	100,0

Keterangan : 1. IMB + Usaha tanpa ijin 2. Jalur Hijau 3. Reklame 4. Gepeng dan orang terlantar
5. Usaha Pariwisata 6. Pencemaran Lingkungan 7. Pelanggaran Trotoar 8. Pelanggaran Proses

Distribusi jenis potensi pelanggaran yang paling banyak berupa potensi pelanggaran pada gepeng dan orang terlantar sebanyak 26 pelanggaran. Sedangkan berdasarkan kecamatan maka pelanggaran yang paling banyak di Kecamatan kuta utara dengan potpelanggaran sebanyak 1258 pelanggaran.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.523.339.581,- dengan realiasi sebesar Rp. 2.384.863.864,- dengan serapan anggaran sebesar 94,51%.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada yaitu :

- Satpol PP Kabupaten Badung tipe A
- Jumlah personil yang cukup banyak yaitu, 188 PNS, 2 THL, 116 Tenaga Kontrak
- Sarana dan Prasarana kerja cukup bagus dan lengkap
- Loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung
- Sejak awal tahun 2017 bergabungnya Linmas pada masing - masing Desa atau Kelurahan dalam wadah Sat Pol PP

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator persentase pencegahan perda dan perkada tahun 2021 yaitu :

- Rata - rata usia personil PNS diatas umur 50 tahun sehingga gerak dan tindakan sudah melambat
- Berkurangnya PPNS karena mutasi pada saat ini masih ada 4 orang PPNS
- Belum semua personil memiliki sertipikat Diklatsar Polisi Pamong Praja



- d. Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang – undangan
- e. Belum optimal ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada
- f. Ketidak patuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID 19.
- g. Belum dipahami dengan jelas tentang penetapan jalur hijau serta informasi tentang jalur hijau.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis ini melalui:

- a. Sinergitas semua perangkat Daerah, Instansi vertikal, Instansi Penagat Peraturan dalam pelaksanaan oprasional di lapangan (Satpol PP)
- b. secara bersama untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol PP)
- a. Melaksanakan secara konsisten MOU antar aparat dan Penegak Hukum yan terkait dengan tindak lanjut membuat Perjanjian Kerja Sama.
- b. Sosialisasi tentang peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
- c. Patroli keliling secara rutin
- d. Meningkatkan kemitraan dengan satuan keamanan lainnya
- e. Koordinasi dengan lintas sektor seperti dinas perijinan, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup serta perangkat daerah lainnya.

Analisis Kinerja Sasaran 12 : Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dimaksudkan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat. Hal ini merupakan implementasi dari pencapaian visi sesuai tertuang dalam RPJMD dengan sasaran strategis meningkatnya penegakan perda dan perkada dan indikatornya persentase penegakan perda dan perkada. Adapun formula dari indikator persentase penegakan perda dan perkada adalah Jumlah pengaduan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran perda dan perkada kali 100.

Hasil capaian indikator persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga kinerjanya sebesar 105,26% berarti telah melampaui target tahun 2021. Hasil capaian indikator persentase penegakan perda dan perkada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 95,26% dari target sebesar 90%. Hasil capaian



indikator persentase penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD sebesar 95%. Gambaran target dan capaian persentase penegakan Perda dan Perkada seperti grafik berikut:

Grafik 3.26
Target dan Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021

Berdasarkan hasil pendataan penegakan perda dan perkada tahun 2021 sebanyak 407 pelanggaran dan tertangani sebesar 100%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebanyak 359 jenis pelanggaran, dan yang tertangani sebanyak 342 jenis pelanggaran atau sebesar 95,26%. Distribusi jenis pelanggaran perda dan perkada menurut kecamatan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Kuta Utara sebanyak 199 pelanggaran dan tertangani sebanyak 199 pelanggaran atau sebesar 100%.

Penegakan Perda dilakukan melalui program pemeliharaan ketertiban umum dan pencegahan tindak kriminal berupa kegiatan operasi Tibum dan Tranmas, Tipiring dan Pengamanan Event-event penting, penanganan pelanggaran yang melalui pemanggilan sampai dengan pembongkaran serta pemberkasan sesuai prosedur yang berlaku. Secara lengkap jenis pelanggaran perda dan perkada serta jumlah yang ditangani seperti tabel berikut:



Tabel 3.15

Jenis Pelanggaran yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	JENIS PELANGGARAN							JML	DITANGANI							JML	%
		1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7		
1	Petang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2	Abiansemal	3	0	2	0	0	0	11	16	3	0	2	0	0	0	11	16	100,0
3	Mengwi	10	0	15	0	0	0	19	44	10	0	15	0	0	0	19	44	100,0
4	Kuta Utara	40	0	24	0	0	35	100	199	40	0	24	0	0	35	100	199	100,0
5	Kuta	2	0	49	0	0	2	46	99	2	0	49	0	0	2	46	99	100,0
6	Kuta Selatan	15	0	7	0	0	1	26	49	15	0	7	0	0	1	26	49	100,0
	Kabupaten	70	0	97	0	0	38	202	407	70	0	97	0	0	38	202	407	100,0

Keterangan : 1. Pembongkaran Reklame 2. Tipiring 3. Pengaduan Masyarakat 4. Penyegehan Usaha 5. Operasi 6. Pembongkaran Bangunan 7. Surat Pernyataan

Perbandingan jumlah pelanggaran perda dan perkara yang ditangani pada tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran perda/perkada berfluktuatif dan pada tahun 2021 telah tertangani semua sebanyak 407 pelanggaran (100%). Jumlah pelanggaran dan tertangani di Kabupaten Badung tahun 2019-2021 seperti tabel berikut :

Tabel 3.16

Jumlah Pelanggaran dan Pelanggaran yang Ditangani
di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH PELANGGARAN			JUMLAH DITANGANI		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Petang	19	0	0	19	0	0
2	Abiansemal	70	49	16	67	47	16
3	Mengwi	134	32	44	128	28	44
4	Kuta Utara	153	111	199	130	106	199
5	Kuta	102	132	99	76	129	99
6	Kuta Selatan	176	35	49	137	32	49
	Kabupaten	654	359	407	557	342	407

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung Tahun 2021



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penegakan perda dan perkara didukung oleh 35 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, program pemerintahan dan kesejahteraan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, dan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.692.623.765,- dengan realiasi sebesar Rp. 4.719.153.671,- dengan serapan anggaran sebesar 61,35%.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran yaitu : rata - rata usia personil PNS diatas umur 50 tahun sehingga gerak dan tindakan sudah melambat, Berkurangnya PPNS karena mutasi pada saat ini masih ada 4 orang PPNS, Belum semua personil memiliki sertifikat Diklatsar Polisi Pamong Paja dan kurangnya pemahaman terhadap perkembangan peraturan perundang - undangan.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian sasaran antara lain : Jumlah personil yang cukup sesuai kebutuhan, sarana dan prasarana kerja cukup



bagus dan lengkap, loyalitas personil yang baik dengan adanya jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian sasaran ini antara lain : Memberi kesempatan Diklat dan tes kopetensi untuk jampung Sat Pol PP, melibatkan linmas dan aparat desa atau kelurahan saat pelaksanaan

penertiban wilayah di 6 Kecamatan. Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan capaian sasaran pada tahun kedepan sinergitas semua perangkat daerah, instansi vertikal, Instansi Penegak Peraturan dalam pelaksanaan operasional di lapangan secara bersama untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membuat MOU antar aparat dan penegak hukum yang terkait dengan tindak lanjut membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian sasaran ini melalui: penegakan perda dan perkara seperti penandatanganan pernyataan, pelaksanaan tindak pidana ringan, dan pembongkaran.



Analisis Kinerja Sasaran 13 : Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDP). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari 4 indikator yang lebih menekankan pada status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini, mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender.

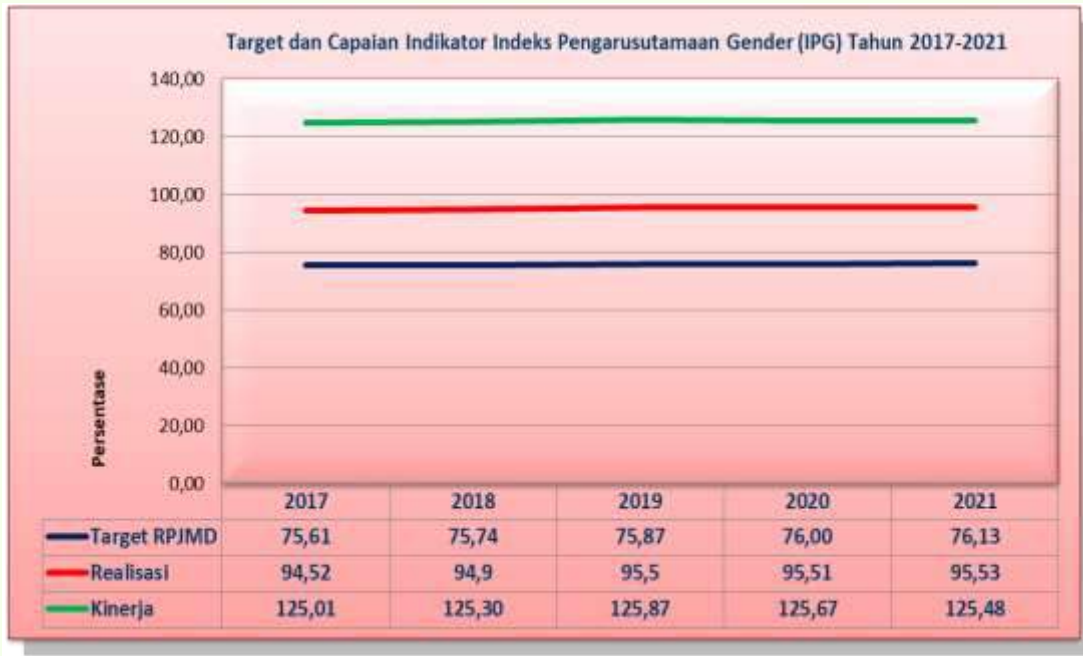
IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Pada dasarnya IPG dihitung dari variabel yang sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya dalam penghitungan IPG, rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks pembangunan manusia, IPG dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan pembangunan yang berbasis gender. Semakin tinggi IPG suatu wilayah atau negara, semakin rendah kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki atau Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Hasil pengukuran terhadap indikator indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung seperti grafik berikut:



Grafik 3.27

Target dan Capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI, Tahun 2017-2021

Hasil capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 sebesar 95,53 dari target yang ditetapkan sebesar 76,13 sehingga capaian kinerjanya sebesar 125,48% berarti telah melampaui target pada tahun 2021. Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 95,51. Hasil capaian indeks pembangunan gender sebelum tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian telah mencapai target yang ditetapkan

Hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) tahun 2021 lebih tinggi bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 76,13. Hasil capaian IPG yang tinggi menunjukkan bahwa di Kabupaten Badung ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan sangat kecil dalam pembangunan jika dilihat dari perspektif gender.

Distribusi hasil capaian indikator indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Badung tahun 2021 dengan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa Kabupaten Badung dengan hasil capaian nomor dua setelah Kota Denpasar, namun telah melampaui capaian tingkat Provinsi Bali dan Nasional. Hasil perbandingan capaian kinerja indeks pembangunan gender seperti grafik berikut :

Grafik 3.30

Perbandingan indeks pembangunan gender menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2021



Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI, 2022

Distribusi capaian indeks pembangunan gender menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian IPG tertinggi, Kota Denpasar sebesar 96.88 dan yang terendah Kabupaten Karangasem sebesar 88.96. Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten dalam lima tahun dengan hasil capaian IPG yang masih <90. Secara lengkap hasil capaian indeks pembangunan gender menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali seperti tabel berikut:

Tabel 3.17
Indeks Pembangunan Gender menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2016-2021

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 Jembrana	-	92.65	93.21	93.52	93.38	93.86	
2 Tabanan	-	95.13	95.34	95.35	95.36	95.42	
3 Badung	-	94.52	94.90	95.50	95.51	95.53	
4 Gianyar	-	93.61	94.16	94.26	94.63	94.70	
5 Klungkung	-	91.03	91.06	91.10	91.12	91.18	
6 Bangli	-	90.72	91.23	91.25	91.54	91.58	
7 Karangasem	-	89.02	89.22	88.87	88.93	88.96	
8 Buleleng	-	91.40	91.92	91.94	91.59	91.65	
9 Kota Denpasar	-	96.88	96.89	96.92	96.77	96.88	
BALI	93.20	93.70	93.71	93.72	93.79	94.01	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI, 2016-2021



Distribusi capaian indeks pembangunan gender menurut provinsi di Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian IPG tertinggi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 94.88 dan yang terendah Provinsi Papua sebesar 80.16. Secara lengkap hasil capaian indeks pembangunan gender menurut provinsi di Indonesia seperti tabel berikut:

Tabel 3.18
Indeks Pembangunan Gender menurut Provinsi
di Indonesia Tahun 2016-2021

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aceh	91.89	91.67	91.67	91.84	92.07	92.23
2	Sumatera Utara	90.82	90.65	90.66	90.71	90.67	90.73
3	Sumatera Barat	94.42	94.16	94.17	94.09	94.17	94.34
4	Riau	88.04	88.17	88.37	88.43	88.14	88.38
5	Jambi	88.29	88.13	88.44	88.44	88.41	88.62
6	Sumatera Selatan	92.08	92.43	92.62	92.40	92.38	92.35
7	Bengkulu	91.06	91.34	91.37	91.19	91.00	91.16
8	Lampung	90.30	90.49	90.57	90.39	90.33	90.37
9	Kep. Bangka Belitung	88.90	88.93	89.15	89.00	88.92	89.11
10	Kepulauan Riau	93.13	92.96	92.97	93.10	93.31	93.49
11	Dki Jakarta	94.98	94.70	94.70	94.71	94.63	94.84
12	Jawa Barat	89.56	89.18	89.19	89.26	89.20	89.36
13	Jawa Tengah	92.22	91.94	91.95	91.89	92.18	92.48
14	D I Yogyakarta	94.27	94.39	94.73	94.77	94.80	94.88
15	Jawa Timur	90.72	90.76	90.77	90.91	91.07	91.67
16	Banten	90.97	91.14	91.30	91.67	91.74	91.83
17	Bali	93.20	93.70	93.71	93.72	93.79	94.01
18	Nusa Tenggara Barat	90.05	90.36	90.37	90.40	90.45	90.53
19	Nusa Tenggara Timur	92.72	92.44	92.57	92.72	92.73	92.63
20	Kalimantan Barat	85.77	86.28	86.74	86.81	86.87	86.95
21	Kalimantan Tengah	89.07	88.91	89.13	89.09	89.03	88.79
22	Kalimantan Selatan	88.86	88.60	88.61	88.61	88.86	88.86
23	Kalimantan Timur	85.60	85.62	85.63	85.98	85.70	85.95
24	Kalimantan Utara	86.34	85.96	86.74	87.00	86.67	87.30
25	Sulawesi Tengah	91.91	91.66	92.08	92.01	91.87	91.91



No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	Sulawesi Selatan	92.79	92.84	93.15	93.09	92.86	92.85
27	Sulawesi Tenggara	90.23	90.24	90.24	90.56	90.50	90.68
28	Gorontalo	86.12	86.64	86.63	86.83	86.73	87.50
29	Sulawesi Barat	89.35	89.44	90.05	89.76	89.43	89.57
30	Maluku	92.38	92.75	93.03	93.04	92.97	93.19
31	Maluku Utara	89.15	89.15	89.50	89.61	89.55	89.75
32	Papua Barat	82.34	82.42	82.47	82.74	82.91	83.00
33	Papua	79.09	79.38	80.11	80.05	79.59	80.16
	Indonesia	90.82	90.96	90.99	91.07	91.06	91.27

Sumber Data : Badan Pusat Statistik RI, 20216-2021

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Peningkatan Kualitas Keluarga dan program . Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 361.240.097,- dengan realiasi sebesar Rp.337.847.294,- dengan serapan anggaran sebesar 93,52%.

Faktor pendorong meningkatnya capaian indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung, antara lain :

1. Adanya Komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Badung
2. Tersedianya anggaran program untuk mendukung kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Terbentuknya POKJA PUG, FOCAL POINT serta FORUM DATA

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Badung, antara lain :

1. Kapasitas SDM yang belum mampu sepenuhnya memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) terutama menganalisis bagian kegiatan yang responsif gender
2. Belum optimalnya keterpaduan program dan kegiatan antar OPD dengan jejaring/partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PUG
3. Masih rendahnya Aspek Keterwakilan Perempuan dalam jabatan publik dan parlement.
4. Budaya Patrilineal
5. Peran serta perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal

Strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pembangunan gender (IPG) antara lain :



1. Mengaktifkan Anggota Pokja PUG dan vocal point yang ada di setiap OPD dalam membangun 7 (tujuh) komponen PUG
2. Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di OPD/LM/Non LM
3. Peningkatan kapasitas kemampuan SDM dalam Program Kegiatan di OPD/LM/Non LM
4. Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender
5. Mendorong peran aktif perempuan dalam bidang ekonomi, hukum serta politik
6. meningkatkan program pendidikan vokasional (keterampilan) khususnya pada perempuan usia kerja.

Analisis Kinerja Sasaran 14 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas lingkungan hidup merupakan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung terkait dengan Tiga indikator yaitu kualitas udara, air dan tutupan hutan. IKLH disusun berdasarkan basis data hasil pengamatan yang dilakukan setiap tahun dengan menggunakan parameter yang telah ditetapkan. IKLH menjadi hal yang sangat penting diketahui mengingat saat ini tantangan yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pembangunan semakin berat dan kompleks.

IKLH berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kondisi lingkungan, sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Kabupaten Badung di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi indeks kualitas lingkungan hidup seperti berikut:

- 1) Sangat Baik : > 90
- 2) Baik : 70 - 90
- 3) Sedang : 50 - 70
- 4) Buruk : 25 - 50
- 5) Sangat Buruk : 0 - 25



Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kuitas lingkungan hidup hidup dengan indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 sebesar 68,37 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 69,40 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,51% berarti belum mencapai target RPJMD. Hasil capaian indikator IKLH tahun 2021 termasuk kategori sedang karena nilainya berkisar antara 50 - 70.

Hasil capaian indikator IKLH tahun 2021 lebih rendah capaiannya dibandingkan tahun 2020 sebesar 70,88. Penurunan capaian indikator IKLH pada tahun 2021 disebabkan oleh karena perubahan cara perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup. Hasil capaian indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 masih dibawah target akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 69,40. Gambaran target dan realisasi indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) seperti grafik berikut:

Grafik 3.29

Target dan Capaian Indikator IKLH Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung, 2017-2021

Berdasarkan variabel IKLH pada tahun 2021 menunjukkan capaian variabel Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) capaiannya meningkat. Nilai IKLH Kabupaten Badung didapatkan hasil sebesar 68,365 yang merupakan kategori SEDANG.

Nilai IKLH tersebut didapatkan dari nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 94,073 yang berarti kualitas udara di Kabupaten Badung berada pada status sangat baik. Kemudian untuk Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63,333, yang terdiri dari



sampel yang memenuhi baku mutu sebesar 66,7% dan sampel yang tercemar ringan sebesar 33,3%. Selanjutnya, Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 29,461. Pemberian status kualitas udara, kualitas air, maupun IKLH tersebut dilakukan berdasarkan Rentang nilai IKLH yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Distribusi capaian Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Badung pada tahun 2016-2021 seperti grafik berikut:

Grafik.30

Capaian Variabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2016--2021

Distribusi hasil capaian indikator IKLH menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian IKLH tertinggi Kabupaten Buleleng sebesar 70,46 dan yang terendah Kota Denpasar sebesar 59,47. Untuk Kabupaten Badung pada peringkat kedua terbaik dengan capaian sebesar 68,37 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 70,70 serta IKLH nasional sebesar 71,43. Perbandingan IKLH menurut Kabupaten/di Provinsi Bali dan Nasional seperti grafik berikut :



Grafik 3.31

Perbandingan IKLH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2021



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung 2021

Pemakaian indikator indeks kualitas lingkungan hidup bagi Kabupaten Badung, terkait erat dengan kebutuhan prioritas pembangunan berkelanjutan sesuai 6 (enam) prinsip dasar pembangunan Kabupaten Badung, salah satunya adalah *pro environment* dan selaras dengan sasaran RPJMN. Indeks kualitas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjaga kualitas udara, air sungai dan tutupan lahan di Kabupaten Badung.



LAYANAN KEBERSIHAN PANTAI

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup didukung oleh 11 program, 12 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran ini meliputi: Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program

Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, program Penanganan Pengaduan



Lingkungan Hidup, program Pengelolaan Persampahan, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program Kawasan Permukiman, dan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 55.179.586.123,- dengan realiasi sebesar Rp. 47.404.300.311,- dengan serapan anggaran sebesar 85,91%.

Faktor pendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

1. Komitmen kepala daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan kebijakan pro environment dalam pembangunan di Kabupaten Badung.
2. Adanya pandemi COVID 19 berdampak pada pengurangan aktivitas masyarakat sehingga secara tidak langsung mengurangi pencemaran terhadap lingkungan udara serta air sungai.
3. Dukungan pendanaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui dana hibah pariwisata dalam menunjang bangkitnya kepariwisataan di Kabupaten Badung.
4. Mempertahankan Luas tutupan hutan dengan tidak melakukan alih fungsi hutan ke peruntukan yang lain.
5. Adanya kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan yang ikut berperan aktif menjaga kualitas lingkungan.
6. Melakukan inventarisasi potensi dan masalah pengelolaan wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi salah satu sumber pencemar pada badan air sungai. Kajian geofisik kimia, biologi dan inventarisasi kegiatan serta studi masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar DAS perlu dilakukan untuk mencari solusi dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan IKLH di Kabupaten Badung adalah :

1. belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengurangi pencemaran pada badan sungai
2. belum optimalnya program pemulihan terhadap sungai-sungai yang tercemar melalui berbagai program aksi, seperti prokasih (program kali bersih)
3. Belum dimanfaatkan sungai sebagai sarana pariwisata dan kegiatan ekonomi
4. adanya pandemi covid 19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran.

Strategi yang ditempuh untuk lebih optimalnya peningkatan IKLH di Kabupaten Badung yaitu:



1. Mengendalikan Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
2. Mengurangi Daerah Rawan bencana dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
3. "Memprioritaskan cara pengelolaan persampahan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Badung"
4. Pemantauan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Badung
5. Membangun TPS 3R/TPA di tempat yang wilayah-wilayah desa/kelurahan yang sudah tersedia lahan
6. Membangun taman berkualitas internasional yang berwujud bersih dan hijau di Kabupaten Badung
7. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Melaksanakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

2. Indeks Pertanaman (IP)

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup melalui penghijauan lahan maka dalam RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 ditetapkan indikator Indeks Pertanaman. Indeks Pertanaman (IP) menunjukkan kerapatan pertanaman pada sebidang lahan. IP ini menunjukkan berapa kali melakukan penanaman padi, palawija dan hortikultura dalam setahunnya. Formula untuk menghitung indeks pertanaman adalah Luas tanam dibagi luas lahan kali 100.

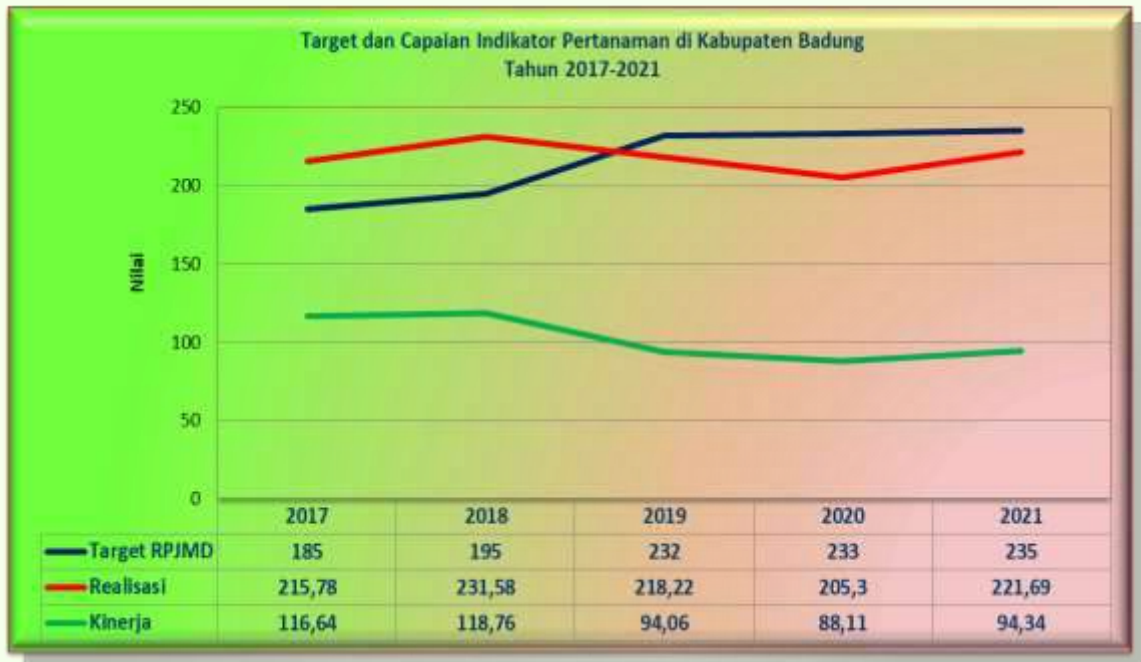
Pengukuran sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks pertanaman menunjukkan bahwa hasil capaian indikator indeks pertanaman tahun 2021 sebesar 221,69 dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 235 sehingga kinerjanya sebesar 94,34%, berarti masih dibawah target yang ditetapkan RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian indikator indeks pertanaman (IP) tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 205,3. Hasil capaian indikator indeks pertanaman tahun 2021 masih dibawah target yang ditetapkan pada Akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 235. Secara lengkap Indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.32

Target dan Capaian Indeks Pertanian (IP) di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya indeks pertanian didukung oleh 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 262.917.342,- dengan realisasi sebesar Rp. 189.275.573,- dengan serapan anggaran sebesar 71,99%.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator indeks pertanian adalah adanya perbaikan saluran irigasi yang rusak berat dan sedang, musim kemarau yang berkepanjangan, pola tanam masyarakat, kondisi tanah sebagai lahan pertanian serta pemilihan bibit unggul.

Faktor yang mendorong indeks pertanian (IP) di Kabupaten Badung adalah Adanya bantuan Sarana produksi padi serta Adanya Asuransi Tanaman Padi, bantuan pupuk dan bibit unggul.

Strategi untuk meningkatkan indeks pertanian adalah meningkatkan intensifikasi tanaman dan Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan indeks pertanian adalah Meningkatkan intensifikasi tanaman, Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna, Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan serta penambahan irigasi/pengairan (pembangunan sumber-sumber air).



Analisis Kinerja Sasaran 15 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu. Tujuan peningkatan kapasitas adalah untuk menurunkan indeks resiko bencana. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga dapat meningkatkan ketahanan daerah serta menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, merujuk pada peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan resiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian – capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Indeks kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 7 (tujuh) kriteria, meliputi:

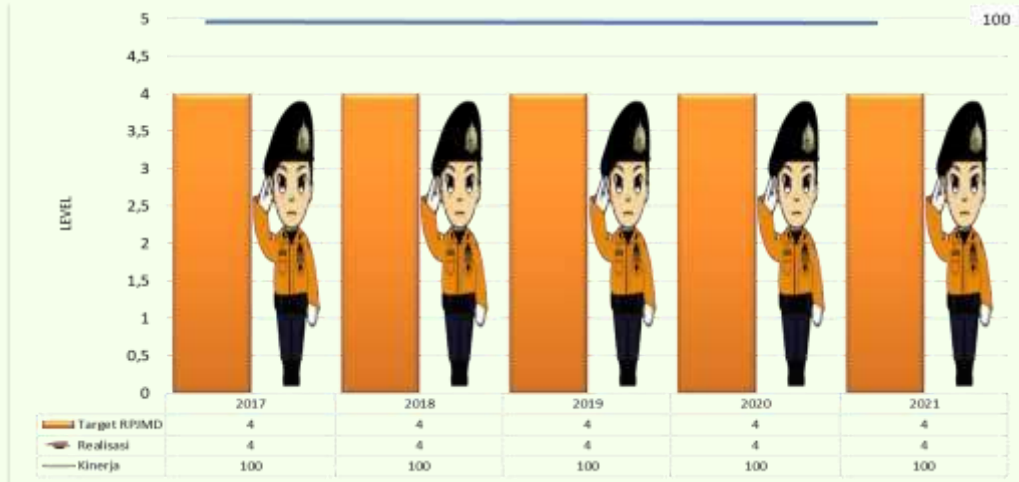
1. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, untuk tahun 2021 pada kategori level IV dari target yang ditetapkan RPJMD pada level IV sehingga kinerjanya sebesar 100%. Hasil capaian indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2021 sama dengan periode tahun sebelumnya 2017-2020 dengan kategori level IV. Sedangkan capaian tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir RPJMD tahun 2021 dengan kategori level IV.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.33
Target dan Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah
dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung tahun 2017-2021

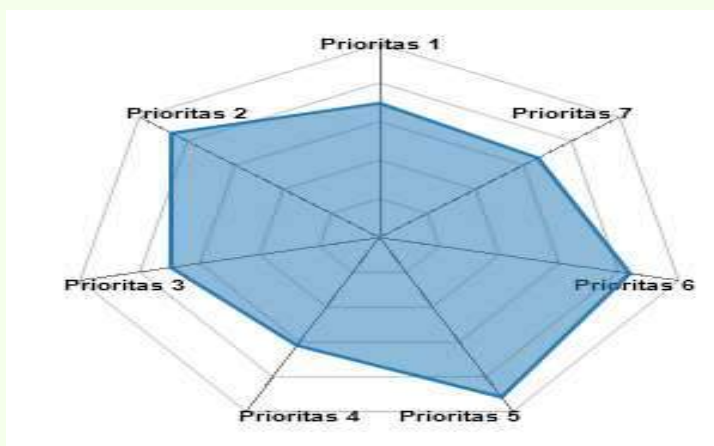


Keterangan : 4) Angka 4 berarti Level 4

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2021

Berdasarkan kriteria tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung menunjukkan bahwa dari 7 kriteria maka Kabupaten Badung pada tahun 2021 memperoleh nilai 0,92 dari nilai 1. Hasil capaian terhadap 7 (tujuh) komponen prioritas tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2021 seperti grafik berikut:

Grafik 3.34
Capaian Kriteria Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
Kabupaten Badung tahun 2021



Sumber Data : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021



Berdasarkan data inaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Badung pada tahun 2021, termasuk dalam kategori sedang untuk tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana serta memiliki tren indeks risiko bencana yang cenderung menurun. Capaian prioritas, tingkat kapasitas daerah serta tren risiko bencana berdasarkan data inaRISK Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 seperti gambar berikut :

Gambar 3.2
Capaian Prioritas, Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks resiko Bencana
Kabupaten Badung Tahun 2021



Sumber Data : Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Badung antara lain:

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2. Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
3. Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
4. Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
6. Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
7. Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Penguatan Forum PRB
9. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah



Prioritas 2 : Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu

1. Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
2. Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
3. Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
4. Optimalisasi Penerapan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik

1. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
2. Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya
3. Komunikasi bencana lintas lembaga
4. Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
5. Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional
6. Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB
7. Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
8. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
9. Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
10. Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
11. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana
12. Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
13. Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
2. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
3. Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
4. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
5. Pembangunan Desa Tangguh Bencana

Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana



1. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
2. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
3. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai
4. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
5. Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Penerapan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan
7. Penguatan Kerjasama Lintas Batas untuk Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir Bandang
8. Penegakan Hukum untuk pelanggaran penerapan IMB khususnya bangunan tahan gempa bumi
9. Pembangunan zona peredam gelombang tsunami di daerah berisiko
10. Pemeliharaan dan Peningkatan Ketahanan tanggul, embung, waduk dan taman kota di Daerah Berisiko Banjir
11. Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui konservasi vegetatif DAS

Prioritas 6 : Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana

1. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempa bumi melalui Perencanaan Kontijensi
2. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi
3. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami Daerah
4. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Tsunami
5. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
6. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
7. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah
9. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi



10. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
11. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunung api melalui Perencanaan Kontijensi
12. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunung api Daerah
13. Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunung api
14. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi
15. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah
16. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi
17. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah
18. Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
19. Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
20. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana
21. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
22. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
23. Pengerahan bantuan kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme
24. Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

1. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
2. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana
3. Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana
4. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

Hasil perbandingan tingkat kapasitas daerah dan indeks resiko bencana menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 9 Kabupaten/kota di Provinsi Bali maka tingkat kapasitas daerah dengan kategori tinggi diperoleh Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, sedangkan lainnya dengan kategori sedang kecuali Kabupaten Karangasem yang tidak ada datanya. Capaian tingkat kapasitas daerah dan indeks risiko bencana menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2021, seperti tabel berikut :



Tabel 3.19

Tingkat Kapasitas Daerah dan Indeks Resiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021

No	Kabupaten	Tingkat Kapasitas Daerah	Indeks Resiko Bencana
1	Kab. Jembrana	Sedang	152,62
2	Kab. Tabanan	Sedang	148,10
3	Kab. Badung	Sedang	98,23
4	Kab. Gianyar	Sedang	125,38
5	Kab. Klungkung	Tinggi	124,22
6	Kab. Bangli	Sedang	133,69
7	Kab. Karangasem	-	-
8	Kab. Buleleng	Tinggi	92,46
9	Kota Denpasar	Sedang	105,81

Sumber Data : Inarisk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021

Gambar 3.3

Indeks Resiko Bencana di Indonesia Tahun 2021



Sumber Data : Inarisk Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2021

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana antara lain menyiapkan desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana. Di Kabupaten Badung telah memiliki 42 desa/kelurahan tangguh bencana dari 62 desa/kelurahan yang ada, atau capaian 67,74%. Sedangkan untuk sekolah aman bencana sudah ada sebanyak 29 sekolah dari 32 sekolah di daerah rawan bencana atau 90,63%. Hasil capaian desa/kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana tahun 2021



sama hasil capaian dengan tahun 2020. Perkembangan desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana seperti berikut:

Tabel 3.20
Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Aman Bencana
Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA/ KEL.	DESA/KEL TANGGUH BENCANA	%	SEKOLAH DI DAERAH RAWAN	SEKOLAH AMAN BENCANA	%
1	Petang	7	7	100,00	0	0	0
2	Abiansemal	18	14	77,78	0	0	0
3	Mengwi	20	11	55,00	1	0	0
4	Kuta Utara	6	2	33,33	0	0	0
5	Kuta	5	4	80,00	18	16	88,89
6	Kuta Selatan	6	4	66,67	13	13	100,00
	Kabupaten	62	42	67,74	32	29	90,63

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2021

Perkembangan desa aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa desa/kelurahan aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 4 desa menjadi 42 pada tahun 2021. Perkembangan desa/kelurahan aman bencana seperti grafik berikut :

Grafik 3.35
Desa Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2021



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2014-2021

Perkembangan sekolah aman bencana di Kabupaten Badung tahun 2014-2021 menunjukkan bahwa sekolah aman bencana terus meningkat setiap tahunnya yang awalnya tahun 2014 sebanyak 2 sekolah menjadi 29 sekolah pada tahun 2021. Perkembangan sekolah aman bencana seperti grafik berikut :



Grafik 3. 36

Sekolah Aman Bencana Kabupaten Badung Tahun 2014-2021



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Badung, 2022

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana didukung oleh 4 program, 6 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Penanggulangan Bencana, program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan program Pengembangan Perumahan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 56.264.712.238,- dengan realiasi sebesar Rp.51.262.913.962,- dengan serapan anggaran sebesar 91,11%.

Faktor yang mendorong peningkatan indikator tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:

1. Komitmen pemerintah pusat dan daerah mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana
2. Terselenggaranya koordinasi antara penyelenggara penanggulangan bencana (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha)

Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam peningkatan tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Kabupaten Badung yaitu:

1. Perlu adanya penguatan struktur dan mekanisme penyampaian informasi kebencanaan
2. Belum tersedia Strategi, SOP dan mekanisme untuk ketersediaan energi listrik pada masa tanggap darurat
3. Belum tersedia Strategi, SOP dan mekanisme untuk pemenuhan kebutuhan pangan pada masa tanggap darurat
4. Belum update Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana



5. Belum Optimal Penegakan hukum terkait RTRWK sesuai Pengurangan Resiko Bencana
 6. Belum tersedia Rencana Kontinjensi Banjir, kekeringan.
 7. Belum optimalnya pelaksanaan Desa Tangguh Bencana
 8. jumlah Sekolah Aman Bencana belum terpenuhi sesuai target
 9. Belum adanya akreditasi Rumah sakit dan Puskesmas Aman Bencana
Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana yaitu :
 1. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait
 2. Peningkatan pengelolaan informasi, dan percepatan perbaikan kerusakan sarana dan prasarana vital
 3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam pemulihan pasca bencana
- Sedangkan upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana yaitu :

Tabel 3.21

Rencana Tindak Lanjut Sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun	Dokumen	1
2	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Destana dan SAB terbentuk	destana/ SAB	5/3
3	Penangan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pasca bencana yang tersusun	Dokumen	8
4	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	orang	62
5	Pencarian, pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupten/Kota	Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi	orang	25
6	Penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kebencanaan yang disediakan	jenis	12



Analisis Kinerja Sasaran 16 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah bahkan negara maju sekalipun. Masalah pengangguran, tidak hanya tentang masalah sosial tetapi juga berkaitan dengan permasalahan ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berupaya untuk menekan pengangguran. Hal ini tercermin dalam prioritas pembangunan untuk menekan tingkat pengangguran penduduk dengan sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dengan formula jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 6,93% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 0,310% sehingga kinerjanya sebesar -2035,48% berarti belum mencapai target yang ditetapkan.

Hasil capaian indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 lebih tinggi dari capaian tahun 2020 sebesar 6,92%. Hasil capaian indikator tahun 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target Akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 0,310%. Secara lengkap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.37

Target dan Capaian Pengangguran Terbuka di Kabupeten Badung Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Badung, 2021



Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Bali sebesar 5,63%. Distribusi tingkat pengangguran menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan tingkat pengangguran di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi. Adapun penyebab tingginya tingkat pengangguran di 3 kabupaten/kota oleh karena dampak pandemi COVID 19 yang melumpuhkan sektor pariwisata. Adapun distribusi tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti tabel berikut :

Tabel 3.22

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengangguran				Persentase Pengangguran			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Badung	1.670	1.543	27.324	28.027	0,46	0,306	6,92	6,93
2	Bangli	1.217	1.104	2.727	2.659	0,81	0,75	1,86	1,8
3	Buleleng	7.198	10.960	19.861	20.234	1,88	3,12	5,19	5,38
4	Gianyar	5.091	4.506	22.028	20.064	1,61	1,46	7,53	6,9
5	Jembrana	2.321	2.102	7.485	7.354	1,41	1,44	4,52	4,11
6	Karangasem	2.665	1.590	6.284	6.099	1,03	0,62	2,42	2,32
7	Klungkung	1.596	1.679	5.794	5.577	1,47	1,57	5,42	5,35
8	Tabanan	4.035	3.527	11.663	10.939	1,45	1,29	4,21	3,94
9	Kota Denpasar	10.018	12.277	41.334	37.716	1,87	2,29	7,62	7,02
	Provinsi Bali	35.811	39.288	144.500	138.669	1,4	1,57	5,63	5,37

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2021

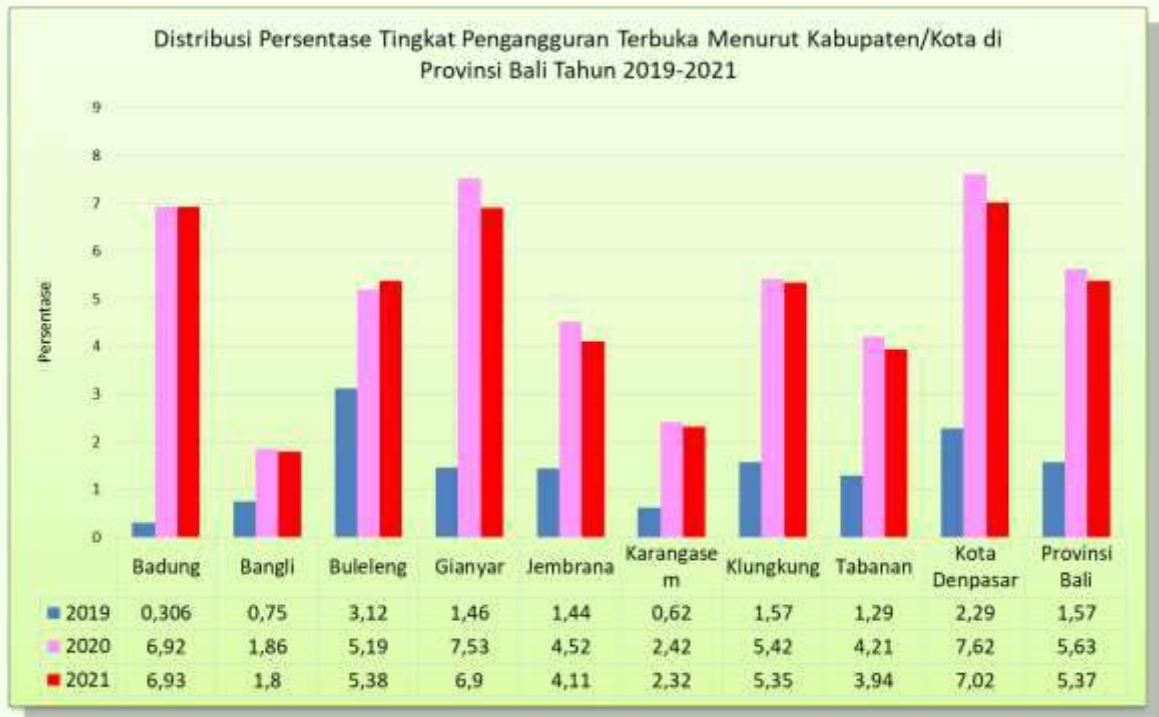
Tingkat pengangguran menurut Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 pada saat terjadinya pandemic covid-19 menunjukkan semua kabupaten/kota mengalami peningkatan pengangguran, dan 3 kabupaten dengan peningkatan pengangguran terbanyak Kabupaten Badung sebesar 6,614%, Kabupaten Gianyar sebesar 6,07% dan Kota Denpasar sebesar 5,33. Ketiga kabupaten/kota tersebut merupakan daerah kunjungan pariwisata sehingga dengan adanya pandemi covid 19 mempengaruhi kunjungan wisatawan dan mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan kecuali Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Perbandingan tingkat pengangguran menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali seperti grafik berikut :



Grafik 3.38

Distribusi Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2019-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2021

Tingkat pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2021 sebesar 6,93% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran Provinsi Bali sebesar 5,37% dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka tingkat nasional sebesar 6,49%.

Tingkat pengangguran menurut Provinsi di Indonesia tahun 2019 dibandingkan tahun 2020, saat terjadinya pandemi covid-19 menunjukkan semua provinsi mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini sebagai bukti bahwa pandemi covid 19 sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran.

Tingkat pengangguran terbuka menurut Provinsi di Indonesia tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami penurunan tingkat pengangguran terbuka, kecuali tiga provinsi mengalami peningkatan yaitu: Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Secara lengkap perbandingan tingkat pengangguran terbuka per provinsi di Indonesia seperti tabel berikut:



Tabel 3.23

Tingkat Pengangguran terbuka menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021

No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				Selisih 2020	Selisih 2021
		2018	2019	2020	2021	Thd 2019	Thd 2019
1	Aceh	6,34	6,17	6,59	6,3	0,42	-0,29
2	Sumatera Utara	5,55	5,39	6,91	6,33	1,52	-0,58
3	Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	6,52	1,5	-0,36
4	Riau	5,98	5,76	6,32	4,42	0,56	-1,9
5	Jambi	3,73	4,06	5,13	5,09	1,07	-0,04
6	Sumatera Selatan	4,27	4,53	5,51	4,98	0,98	-0,53
7	Bengkulu	3,35	3,26	4,07	3,65	0,81	-0,42
8	Lampung	4,04	4,03	4,67	4,69	0,64	0,02
9	Kep. Bangka Belitung	3,61	3,58	5,25	5,03	1,67	-0,22
10	Kep. Riau	8,04	7,50	10,34	9,91	2,84	-0,43
11	Dki Jakarta	6,65	6,54	10,95	8,5	4,41	-2,45
12	Jawa Barat	8,23	8,04	10,46	9,82	2,42	-0,64
13	Jawa Tengah	4,47	4,44	6,48	5,95	2,04	-0,53
14	Di Yogyakarta	3,37	3,18	4,57	4,56	1,39	-0,01
15	Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	5,74	2,02	-0,1
16	Banten	8,47	8,11	10,64	8,98	2,53	-1,66
17	Bali	1,40	1,57	5,63	5,37	4,06	-0,26
18	Nusa Tenggara Barat	3,58	3,28	4,22	3,01	0,94	-1,21
19	Nusa Tenggara Timur	2,85	3,14	4,28	3,77	1,14	-0,51
20	Kalimantan Barat	4,18	4,35	5,81	5,82	1,46	0,01
21	Kalimantan Tengah	3,91	4,04	4,58	4,53	0,54	-0,05
22	Kalimantan Selatan	4,35	4,18	4,74	4,95	0,56	0,21
23	Kalimantan Timur	6,41	5,94	6,87	6,83	0,93	-0,04
24	Kalimantan Utara	5,11	4,49	4,97	4,58	0,48	-0,39
25	Sulawesi Utara	6,61	6,01	7,37	7,06	1,36	-0,31
26	Sulawesi Tengah	3,37	3,11	3,77	3,75	0,66	-0,02
27	Sulawesi Selatan	4,94	4,62	6,31	5,72	1,69	-0,59
28	Sulawesi Tenggara	3,19	3,52	4,58	3,92	1,06	-0,66
29	Gorontalo	3,70	3,76	4,28	3,01	0,52	-1,27
30	Sulawesi Barat	3,01	2,98	3,32	3,13	0,34	-0,19
31	Maluku	6,95	6,69	7,57	6,93	0,88	-0,64



No	Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)				Selisih 2020	Selisih 2021
		2018	2019	2020	2021	Thd 2019	Thd 2019
32	Maluku Utara	4,63	4,81	5,15	4,71	0,34	-0,44
33	Papua Barat	6,45	6,43	6,80	5,84	0,37	-0,96
34	Papua	3,00	3,51	4,28	3,33	0,77	-0,95
	Indonesia	5,30	5,23	7,07	6,49	1,84	-0,58

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2018-2021

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja didukung oleh 5 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Beberapa Program pendukung meliputi: program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, program Penempatan Tenaga Kerja, program Hubungan Industrial, program Perencanaan Tenaga Kerja dan program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 850.669.795,- dengan realiasi sebesar Rp. 843.562.038,- dengan serapan anggaran sebesar 99,16%.

Faktor penyebab meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Badung antara lain:

1. pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang menonaktifkan karyawannya.
2. Perusahaan belum semua menerapkan sistem pengupahan menggunakan struktur dan skala upah
3. Monitoring upah belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena banyaknya perusahaan di Kabupaten Badung dan terbatasnya waktu dan personil.
4. Perusahaan yang memiliki pekerja diatas 10 orang belum semua memiliki peraturan perusahaan
5. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
6. Masih kurangnya fasilitas penunjang dalam memfasilitasi proses mediasi.
7. Belum optimalnya penyedia tenaga kerja (job creator) dan pencari kerja (job seeker) memanfaatkan bursa kerja elektronik
8. Minimnya jumlah LPKS yang terakreditasi
9. Kewajiban Dinas tenaga kerja untuk menerbitkan rekomendasi ijin LPKS

Beberapa faktor pengendali terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Badung antara lain:

1. Adanya Kebijakan pemberian insentif/Bantuan Sosial (Bansos) bagi Pekerja Formal di Sektor Pariwisata dan sektor lainnya yang terkena PHK dan



dirumahkan akibat dampak Covid-19, masing-masing menerima Rp. 600 ribu setiap bulannya selama tiga bulan.

2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui pelatihan yang dilanjutkan dengan uji kompetensi dan sertifikasi.
3. Adanya fasilitas sistem informasi industri dan tenaga kerja (SINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan) dapat memasukan lowongan yang ada pada sistem tersebut
4. Peluang menggunakan anggaran yang digunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sangat terbuka (APBD)

Faktor penghambat pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja meliputi :

1. Perusahaan belum semua menerapkan sistem pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.
2. Monitoring upah belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena banyaknya perusahaan di Kabupaten Badung dan terbatasnya waktu dan personil.
3. Perusahaan yang memiliki pekerja diatas 10 orang belum semua memiliki peraturan perusahaan.
4. Perusahaan belum semua menerapkan norma-norma ketenagakerjaan.
5. Masih kurangnya fasilitas penunjang dalam memfasilitasi proses mediasi
6. Belum maksimalnya penuntasan pengangguran, karena Kabupaten Badung merupakan tujuan urban (pencari kerja) yang tinggi tanpa dukungan skill yang memadai dan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Badung tahun 2020 juga disebabkan karena pandemic Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang menon aktifkan karyawannya.
7. Belum optimalnya penyedia tenaga kerja (job creator) dan pencari kerja (job seeker) memanfaatkan bursa kerja elektronik
8. Minimnya jumlah LPKS yang terakreditasi
9. Dinas wajib menerbitkan rekomendasi ijin LPKS

Strategi kedepan yang akan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan penurunan tingkat pengangguran yaitu :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
2. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri
4. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja



untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)

5. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
6. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran

Analisis Kinerja Sasaran 17 : Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Infrastruktur wilayah yang mantap dan berkualitas diharapkan dapat menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Sebagai daerah tujuan wisata yang sudah terkenal Kabupaten Badung dituntut mampu menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor dari negara lain yang sama-sama mengandalkan sektor kepariwisataan. Salah satu infrastruktur jalan, jembatan dan trotoar serta saluran irigasi di Kabupaten Badung diharapkan semakin meningkat kualitasnya.

Indikator infrastruktur kondisi mantap merupakan indikator penilaian terhadap kondisi kemantapan jalan yang berkondisi sedang dan baik. Formula pengukuran infrastruktur kondisi mantap adalah Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 13 tahun 2016 terdapat perubahan target Indikator infrastruktur kondisi mantap untuk tahun 2020 menjadi 89,38% dan tahun 2021 sebesar 90,58%. Perubahan target diakibatkan oleh karena kondisi fiskal keuangan pemerintah Kabupaten Badung mengalami penurunan.

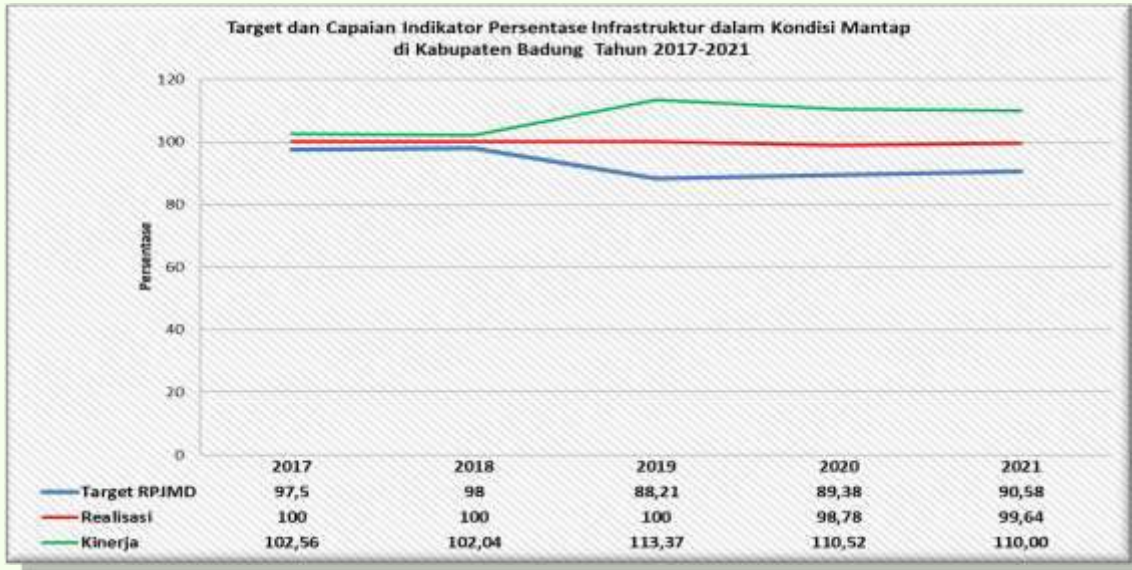
Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dengan indikator infrastruktur kondisi mantap tahun 2021 sebesar 99,64% dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 90,58% sehingga kinerjanya sebesar 110,00% berarti telah mencapai target RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian indikator infrastruktur kondisi mantap tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 98,78%. Sedangkan capaian infrastruktur kondisi mantap Kabupaten Badung tahun 2021 telah melampaui target Akhir RPJMD sebesar 90,58%. Secara lengkap capaian indikator infrastruktur kondisi mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :



Grafik 3.39

Target dan Capaian Indikator Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung Tahun 2017-2021

Distribusi capaian indikator infrastruktur kondisi mantap menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2021 menunjukkan bahwa 4 (empat) wilayah kecamatan dengan kondisi infrastruktur kondisi mantap 100% walaupun masih ada kondisi yang rusak, sedangkan Kecamatan Petang dengan kondisi jalan dan jembatan yang paling banyak mengalami kerusakan sebesar 3.144 meter sehingga capaian infrastruktur dalam kondisi mantap sebesar 98,35%. Distribusi kondisi jalan di Kabupaten Badung berdasarkan kategorinya seperti tabel berikut :

Tabel 3.24

Distribusi Panjang Jalan dan Kondisi Jalan per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	JUMLAH PANJANG (meter)		KONDISI JALAN			KONDISI JEMBATAN BAIK	JALAN MANTAP	% JALAN MANTAP	% JEMBATAN BAIK	% INFRA STRUKTUR MANTAP
		JALAN	JEMBAT	BAIK	SEDANG	RUSAK					
1	Petang	95.300	185,57	78.424	13.732,00	3.144	185,57	92156,0	96,70	100,0	98,35
2	Abiansemal	128.713	407,29	115.795	11.178,00	1.740	407,29	126973,0	98,65	100,0	99,32
3	Mengwi	166.815	374,22	161.335	5.480,00	3.38	374,22	166815,0	100,00	100,0	100,00
4	Kuta Utara	100.671	123,8	100.671	0,10	2.78	123,8	100671,1	100,00	100,0	100,00
5	Kuta	66.630	74	63.831	2.799,00	6.38	74	66630,0	100,00	100,0	100,00
6	Kuta Selatan	115.240	417,39	107.270	7.970,00	7.38	417,39	115240,0	100,00	100,0	100,00
	KABUPATEN	673.369	1.582,27	627.326	41.159,10	4.884	1582,27	668485,10	99,27	100,0	99,64

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, 2021



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas didukung oleh 12 program, 24 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program informasi dan komunikasi publik, program aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj), program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (psu), program penyelenggaraan jalan, program penataan bangunan dan lingkungannya, program penataan bangunan gedung, program pengelolaan sumber daya air (sda), program penyelenggaraan penataan ruang, dan program perekonomian dan pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 171.268.199.568,- dengan realisasi sebesar Rp. 153.986.933.148,15,- dengan serapan anggaran sebesar 89,91%.

Faktor yang menjadi pendorong seluruh jalan di Kabupaten Badung dalam kondisi mantap antara lain:

1. Komitmen pimpinan kepala daerah untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Badung pada masa pertama pemerintahan 2016-2021.
2. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan stimulus/hibah pariwisata memberikan dampak positif dalam pembangunan infrastruktur sektor pariwisata.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan infrastruktur dalam kondisi mantap adalah :

1. Adanya pandemi COVID 19 sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dari sector pariwisata di Kabupaten Badung.
2. Sinkronisasi anggaran yang belum memadai terhadap target sasaran yang seharusnya diselesaikan untuk pencapaian kondisi infrastruktur di Kabupaten Badung
3. belum optimalnya Koordinasi lintas instansi pemerintah terhadap rencana pembangunan infrastruktur seperti : PLN, PDAM, Telkom

Strategi kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan jalan di Kabupaten Badung yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dan penganggaran melalui skema KPBU, kolaborasi antar instansi dalam peningkatan dan pembangunan insfrasrtuktur.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran ini antara lain: peningkatan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan baru dan rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, peningkatan lingkungan Sehat Perumahan, penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan prioritas daerah pariwisata.



Analisis Kinerja Sasaran 18 : Meningkatnya Produksi Pangan Nabati Dan Hewani

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencakupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk baik dari jumlah, kualitas maupun keragamannya dan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya dan cita rasa. Pola Pangan Harapan digunakan sebagai basis perencanaan dan penilaian kecukupan gizi seimbang pada tingkat makro. Pola Pangan Harapan sebagai salah satu indikator output pembangunan pangan termasuk evaluasi penyediaan pangan, konsumsi pangan, dan diversifikasi pangan.

Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dengan cara mengalikan antara persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Keragaman konsumsi pangan berdasarkan energi aktual dari Sembilan (9) kelompok pangan berdasarkan metode PPH dikelompokkan menjadi sangat kurang (<55), kurang (55-69), cukup (70-84), dan baik (≥ 85) (Prasetyo *et al.* 2013).

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani dengan indikator skor pola pangan harapan tahun 2021 sebesar 86,8 dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 97,00 sehingga kinerjanya sebesar 94,34%, berarti belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Capaian skor PPH sebesar 86,8 termasuk **kategori baik**, Hal ini menggambarkan bahwa keragaman sumber kalori yang dikonsumsi masyarakat sudah beraneka ragam tidak hanya nasi, tetapi juga sumber kalori lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah.

Hasil capaian indikator skor pola pangan harapan pada tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena pada tahun 2020, tidak dilakukan survei PPH karena pandemi covid-19 serta pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil capaian tahun 2021 masih dibawah capaian tahun 2017-2019. Pelaksanaan survei pola pangan harapan tahun 2017-2019 atas kerjasama antara Dinas Pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Badung dengan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Denpasar.

Hasil capaian skor pola pangan harapan tahun 2021 masih dibawah target akhir RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 sebesar 97,00. Secara lengkap target dan capaian skor pola pangan harapan di Kabupaten Badung tahun 2017-2021 seperti grafik berikut:



Grafik 3.40

Target dan Capaian Indikator Skor Pola Panga Harapan (PPH)
di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Badung Tahun 2021

Perbandingan hasil capaian skor PPH Kabupaten Badung dengan capaian tingkat nasional seperti grafik berikut :

Grafik 3.41

Perbandingan Skor PPH Kabupaten Badung
dengan Nasional Tahun 2017-2021





Sedangkan hasil capaian skor pola pangan harapan Kabupaten Badung tahun 2017-2019 dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional menunjukkan skor PPH Kabupaten Badung lebih tinggi berarti kualitas konsumsi pangan masyarakat Badung lebih baik. Sedangkan untuk tahun 2020-2021 tidak bisa dibandingkan karena keterbatasan data.

Skor Pola Pangan Harapan salah satunya ditentukan oleh jumlah produksi pertanian serta perikanan yang menentukan keanekaragaman konsumsi pangan. Hasil produksi perikanan diperoleh data jumlah produksi perikanan (tangkap dan budidaya) terus meningkat, dengan gambaran produksi pada Tahun 2015 sebanyak 6.760,7 Ton dan tahun 2021 sebanyak 9.255,08 ton. Produksi Ikan berfluktuasi setiap tahunnya, dengan produksi paling banyak pada tahun 2019 sebesar 9.563,80 ton dengan jumlah produksi terbesar pada ikan tangkap. Tingkat pemenuhan ikan untuk masyarakat Kabupaten Badung tahun 2015-2021 menunjukkan bahwa persentase pemenuhan ikan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 75,25%. Gambaran produksi ikan, tingkat kebutuhan ikan serta persentase pemenuhan ikan di Kabupaten Badung tahun 2015-2021 seperti tabel berikut :

Tabel 3.25
Jumlah Produksi Perikanan dan Kebutuhan Ikan
di Kabupaten Badung Tahun 2015-2021

No	TAHUN	PRODUKSI IKAN (TON)		TOTAL (TON)	STANDAR KONSUMSI IKAN/Org/ THN (TON)	TOTAL KEBUTUHAN IKAN (TON/THN)	% PEMENUHAN IKAN
		TANGKAP	BUDI DAYA				
1	2	3	4	5	6	7	8 (5/7*100)
1	2015	6.173,90	586,8	6.760,70	0,024	14.673,00	46,1
2	2016	6.458,80	595,4	7.054,20	0,024	15.006,60	47
3	2017	6.691,60	580,2	7.271,80	0,024	15.337,70	47,4
4	2018	8.780,30	735,2	9.515,50	0,024	15.666,30	60,7
5	2019	8.833,60	730,2	9.563,80	0,024	15.992,60	59,8
6	2020	7.922,30	624,5	8.546,90	0,024	16.316,40	52,38
7	2021	8.570,50	684,58	9.255,08	0,024	12.299,64	75,25

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021

Distribusi produksi ikan menurut kecamatan di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa produksi ikan terbanyak di Kecamatan Kuta sebanyak 6.813,59 ton sedangkan yang terendah di Kecamatan Petang sebanyak 123,64 ton. Produksi



ikan di Kecamatan Kuta diperoleh dari TPI Kedonganan. Distribusi produksi perikanan menurut kecamatan di Kabupaten Badung seperti tabel berikut :

Tabel 3.26
Target dan capaian Produksi Perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	TARGET PRODUKSI PERIKANAN		JUMLAH (Ton)	REALISASI PRODUKSI PERIKANAN		JUMLAH (Ton)	%
		TANGKAP	TANGKAP		TANGKAP	BUDIDAYA		
1	Petang	2,00	64,00	66,00	2,66	120,98	123,64	187,33
2	Abiansemal	2,00	188,00	190,00	5,09	286,25	291,34	153,34
3	Mengwi	143,00	305,00	448,00	266,07	195,31	461,38	102,99
4	Kuta Utara	123,00	46,00	169,00	141,83	70,79	212,62	125,81
5	Kuta	5.562,50	10,00	5.572,50	6.813,59		6.813,59	122,27
6	Kuta Selatan	1.455,50	10,00	1.465,50	1.341,26	11,25	1.352,51	92,29
	Kabupaten	7.288,00	623,00	7.911,00	8.570,50	684,58	9.255,08	116,99

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Badung 2021

Upaya peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Badung melalui pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta pembinaan dan temu teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pangan harapan didukung oleh 9 program, 14 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat, program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, program Penyuluh Pertanian, program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dan program Perekonomian dan Pembangunan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.179.226.452,- dengan realiasi sebesar Rp. 8.325.957.042,- dengan serapan anggaran sebesar 81,79%.

Faktor pendorong meningkatnya capaian indikator skor Pola Pangan Harapan adalah pengetahuan masyarakat tentang peningkatan gizi sangat tinggi seiring dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan keaneka ragaman pangan, meningkatnya pola hidup sehat yang mengurangi asupan karbohidrat yang berlebihan, peningkatan pembenihan ikan dengan membangun benih ikan yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan antara lain :



- a) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan fungsi ekonomi.
- b) Pola pikir masyarakat yang masih mengutamakan konsumsi beras
- c) Konsumsi pangan masyarakat belum beragam
- d) Perubahan cuaca yang menyebabkan banyaknya kematian ikan budidaya dan susah nya nelayan untuk melaut.
- e) Tingkat penguasaan teknologi yang masih terbatas di kalangan pembudidaya ikan dan nelayan di Kabupaten Badung
- f) Banyaknya terjadi alih profesi dari pembudidaya, terutama budidaya rumput laut dan nelayan yang menjadi pelaku usaha pariwisata.
- g) Masih rendahnya kemampuan Balai Benih Ikan dalam memproduksi bibit ikan yang diperlukan kelompok pembudidaya.
- h) Terbatasnya lokasi pemeliharaan dan pengembalaan itik.

Upaya-upaya untuk meningkatkan skor pola pangan harapan meliputi : Meningkatkan sosialisasi mengenai keanegaraman konsumsi makanan, meningkatkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga memberi nilai tambah, menumbuhkan gerakan generasi muda sebagai petani, mengalakkan asuransi pertanian, meningkatkan pertanian organik.

Analisis Kinerja Sasaran 19 : Meningkatnya Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dan motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung, sehingga menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing merupakan bentuk komitmen menjaga keberlangsungan sektor kepariwisataan. Formula dari indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing adalah Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100.

Daya Tarik Wisata (DTW) dalam laporan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 tahun 2010 tentang standarisasi Daya Tarik Wisata (DTW). Berdasarkan Peraturan Gubernur disebutkan bahwa standar daya tarik wisata harus memenuhi persyaratan standar antara lain: memiliki manajemen pengelolaan, fasilitas toilet, P3K, loket penjualan tiket, petugas keamanan, petugas parkir, tempat sampah, media informasi dan memiliki usaha penunjang seperti *art shop*. Oleh



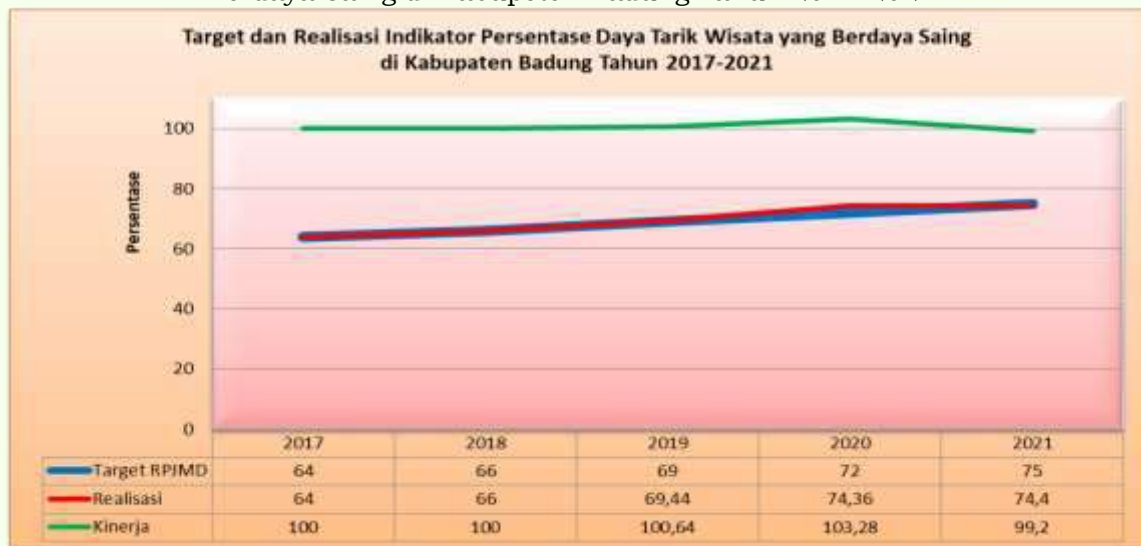
karena itu, setiap obyek wisata perlu dilakukan penataan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga bisa kompetitif dengan DTW daerah lainnya.

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2021 sebesar 74,4% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,2%, berarti belum mencapai target yang ditetapkan RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2021 sama dengan hasil capaian tahun 2020 sebesar 74,36% dan lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 69,44%. Hasil capaian indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing tahun 2021 bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan capaian masih dibawah target sebesar 75%. Data capaian kinerja persentase daya tarik wisata yang berdaya saing seperti grafik berikut :

Grafik 3.42

Target dan Capaian Indikator Persentase Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Kabupaten Badung sebanyak 39 DTW dengan DTW yang telah sesuai standar sebanyak 29 DTW atau sebesar 74,4%. Distribusi daya tarik wisata menurut kecamatan di Kabupaten Badung tahun 2021 menunjukkan kecamatan dengan daya tarik wisata yang sesuai standar yang tertinggi Kecamatan Abiansemal sebesar 100% dan terendah di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara sebesar 40%. Distribusi DTW dan Desa Wisata di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:



Tabel 3.27

Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	JUMLAH DTW	JUMLAH DTW	%	JUMLAH DESA WISATA	JUMLAH DESA WISATA BERKEMBANG / MAJU	%
		YANG ADA	SESUAI STANDAR				
1	Petang	5	4	80,0	5	3	60,00
2	Abiansemal	4	4	100,0	4	2	50,00
3	Mengwi	5	2	40,0	8	4	50,00
4	Kuta Utara	3	2	66,7	-	-	-
5	Kuta	5	3	60,0	-	-	-
6	Kuta Selatan	17	14	82,4	-	-	-
	Kabupaten	39	29	74,4	17	9	52,94

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung tahun 2021

Desa wisata di Kabupaten Badung sebanyak 17 desa dengan kategori maju sebanyak 9 Desa (52,94%). Desa wisata yang ada di Kabupaten Badung terdapat di 3 (tiga) kecamatan meliputi : Kecamatan Petang, Abiansemal dan Mengwi.

Daya tarik wisata yang memenuhi standar serta desa wisata berdampak terhadap meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing, sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi daerah tujuan wisata utama di Provinsi Bali dengan didukung oleh program pemasaran pariwisata dengan kegiatan promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata di Kabupaten Badung tahun 2021 sebanyak 605.075 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan wisatawan tahun 2020 sebanyak 158.365 orang. Distribusi jumlah kunjungan wisatawan menurut kecamatan di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan terbanyak ke Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 557.246 orang.

Distribusi jumlah sarana pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2021 menunjukkan bahwa jenis sarana penunjang pariwisata terbanyak adalah restoran (681), dan kecamatan dengan jumlah sarana penunjang pariwisata yang terbanyak di Kecamatan Kuta sebanyak 530. Distribusi kunjungan wisatawan ke DTW per kecamatan seperti tabel berikut :



Tabel 3.28

Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Sarana Penunjang Pariwisata
Di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	KECAMATAN	JUMLAH KUNJUNAN WISATA	JML SARANA PARIWISATA				JUMLAH SARANA
			RESTO RAN	RUMAH MAKAN	BAR	CATE RING	
1	Petang	4.122	-	-	-	-	0
2	Abiansemal	31.024	1	-	-	-	1
3	Mengwi	12.683	2	1	1	-	4
4	Kuta Utara	-	184	50	3	-	237
5	Kuta	-	400	75	50	5	530
6	Kuta Selatan	557.246	141	14	5	3	163
	Kab. 2021	605.075	728	140	59	8	935
	Kab. 2020	158.365	681	155	62	5	903

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2021

Perkembangan usaha sarana penunjang pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah usaha sarana pariwisata dari tahun 2016-2018, namun dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Perkembangan usaha sarana penunjang pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2021 seperti grafik berikut:

Grafik 3.43

Perkembangan Sarana Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, 2021



Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing didukung oleh 4 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program pengembangan pemasaran pariwisata, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program sediaan farmasi, dan alat kesehatan dan makanan minuman. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 6.745.030.189,- dengan realiasi sebesar Rp. 6.423.725.631,- dengan serapan anggaran sebesar 95,24%.

Permasalahan/faktor penghambat dalam pencapaian persentase daya tarik wisata yang berdaya saing adalah sumber daya (anggaran) yang belum memadai oleh karena dampak pandemi COVID19 sehingga mengakibatkan adanya refocusing dan realokasi anggaran, kesiapan sumber daya manusia kepariwisataan, belum lengkapnya fasilitas umum seperti toilet, tempat pengelolaan sampah, belum lengkapnya fasilitas pendukung kegiatan wisata seperti penginapan, home stay, pondok wisata dll, belum lengkapnya fasilitas atraksi wisata dan kesiapan organisasi pengelola obyek wisata.

Strategi dan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini meliputi: pengalokasian anggaran untuk perbaikan daya tarik wisata, Menyusun strategi recovery pasca pandemi covid - 19, yaitu dengan melengkapi destinasi wisata dengan prokes sesuai standar kesehatan, pengembangan destinasi wisata, Melaksanakan pemasaran pariwisata baik di dalam dan luar negeri serta melalui media elektronik, pengembangan pengelolaan produk-produk wisata, Melaksanakan penataan kawasan wisata dan DTW, Melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata, Melaksanakan pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada daya tarik wisata.

Analisis Kinerja Sasaran 20 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Produkt domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial suatu daerah.

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peran dalam menunjang pembangunan,



sebagai sumber devisa negara dan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata mampu membuka dan menggerakkan berbagai lapangan pekerjaan yang memungkinkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha lebih luas dan merata bagi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, tidak heran jika sektor pariwisata dianggap sebagai salah satu industri terbesar di dunia dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata.

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung berdampak terhadap semakin besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bertumbuhnya kegiatan ekonomi mikro yang tersebar di seluruh Kabupaten Badung serta meningkatnya lapangan pekerjaan disektor pariwisata. Terbukanya kesempatan kerja dengan ketrampilam terbatas seperti pelayanan porter di airport, pekerjaan kasar di hotel, pemandu wisata, dan beragam pekerjaan di berbagai usaha layanan wisata lainnya.

Dengan besarnya peran sektor pariwisata dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Badung maka sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Badung dengan sasaran RPJMD meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017-2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.44

Target dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, 2017-2021



Hasil capaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB untuk tahun 2021 sebesar 23,25% dari target yang ditetapkan sebesar 29% sehingga capaian kerjanya sebesar 80,17% berarti masih dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021.

Hasil capaian kinerja indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian sebesar 24,61%, sehingga pada tahun 2021 terjadi penurunan kontribusi PDRB sektor pariwisata di Kabupaten Badung sebesar 1,36%. Hasil capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2021 masih dibawah target yang ditetapkan pada akhir RPJMD 2016-2021 sebesar 29,00%.

Distribusi PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa sektor pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB. Rata-rata kontribusi PDRB dari sektor pariwisata di Kabupaten Badung tahun 2016-2019 berkisar diatas 28%, sedangkan untuk tahun 2020-2021, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami penurunan. Adapun penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal Maret 2020 yang berdampak terhadap lumpuhnya sektor pariwisata melebihi dampak kejadian bom Bali I dan II. Data Distribusi PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.29
Distribusi PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlakau
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2021

	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,57	6,35	6,00	5,82	7,45	8,5
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,29	0,28	0,27	0,34	0,36
C	Industri Pengolahan	3,99	3,74	3,67	3,63	4,43	4,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,20	0,19	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,22	0,21	0,27	0,27
F	Konstruksi	8,24	8,36	8,72	8,79	11,18	11,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,31	6,32	6,35	6,38	7,78	8,57
H	Transportasi dan Pergudangan	25,43	25,48	25,65	25,99	17,2	12,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28,50	28,93	28,84	28,67	24,61	23,25
J	Informasi dan Komunikasi	5,59	5,49	5,50	5,60	7,98	9,09



K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,49	2,41	2,46	3,05	3,32
L	Real Estate	3,16	3,18	3,17	3,14	4,07	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	0,69	0,68	0,67	0,67	0,83	0,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,14	3,25	3,28	3,13	4,05	4,47
P	Jasa Pendidikan	3,06	2,99	3,00	2,99	3,9	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,28	1,28	1,28	1,75	1,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,74	0,76	0,78	0,95	1,04
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2016-2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sangat ditentukan oleh kunjungan pariwisata. Distribusi kunjungan pariwisata ke Kabupaten Badung tahun 2015 – 2019 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2020 kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara (domestik) mengalami penurunan yang sangat tajam. Adapun penyebab turunnya wisatawan oleh karena pandemi COVID 19 yang mengakibatkan pengaturan jadwal penerbangan ke Bali melalui bandara I Gusti Ngurah Rai serta penutupan obyek wisata di wilayah Kabupaten Badung. Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Badung tahun 2016 -2021 disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik 3.45

Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Badung, 2021



Lima negara dengan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Badung tahun 2021 antara lain : Rusia, amerika, malaysia, australia, jerman. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung tahun 2021 seperti grafik berikut :

Grafik 3.46

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung Tahun 2021



Sumber Data : Dinas Pariwisata Kab. Badung, 2021

Upaya untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program pendukung meliputi: program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 101.526.086,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.421.284,- dengan serapan anggaran sebesar 97,93%.

Faktor pendorong untuk pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meliputi : Kondisi Kabupaten Badung yang kondusif bagi kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, citra Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata favorit tingkat nasional, regional dan internasional, adanya koordinasi/ kerjasama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan stakeholder pariwisata dalam menjalankan berbagai program kepariwisataan yang telah direncanakan, adanya berbagai ragam daya tarik wisata baik wisata alam, budaya dan buatan, adanya sarana dan prasarana pariwisata yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Badung, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung.



Faktor penghambat untuk pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meliputi : adanya pandemi covid 19 sehingga berdampak pada pembatasan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Upaya –upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meliputi : pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat seperti desa wisata, meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata pedesaan, meningkatkan manajemen pengelolaan obyek wisata, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pedesaan, mengadakan promosi obyek wisata secara elektronik atau melalui kegiatan gebyar wisata, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pada lokasi pariwisata.

3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam konteks memantapkan otonomi daerah desentralisasi fiskal yang menganut prinsip “*Money Follows Program*” yaitu perubahan paradigma pendekatan anggaran yang lebih focus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan *money follows program*, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (*money follows function*).

Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021 sebesar Rp. 1.119.108.803.765 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 904.057.417.689,86 sehingga persentase penyerapan sebesar 80,78%. Sebagai perbandingan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.356.993.556.381,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.223.623.428.734,- sehingga persentase penyerapan sebesar 90,17%.

Sasaran strategis pada tahun 2021 didukung sebanyak 105 program, 149 kegiatan dan 289 sub kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2020 didukung program sebanyak 143 dan kegiatan sebanyak 487. Alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing program kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021 seperti tabel berikut:



Tabel 3.30
Sasaran Strategis, Jumlah Program/Kegiatan, Pagu dan Realisasi Anggaran
Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG	JML PAGU ANGGARAN	JML REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	78,45	1	1	1	0	0	0
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	90	5	7	17	83.159.466.730	68.783.869.733	82,71
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	21	34	69	107.369.220.996	61.235.767.615	57,03
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Katagori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	80,01	3	3	5	287.386.801	225.139.972	78,34
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	3	4	6	943.730.350	101.750.962	10,78
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	75	1	2	5	2.124.340.494	1.239.696.070	58,36
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,57	3	7	38	440.083.900.540	363.874.087.404	82,68
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indek Kebahagiaan masyarakat	75,51	3	4	10	126.976.584.885	114.667.317.071	90,31
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	0,60	5	7	9	45.979.453.874	17.389.780.709	37,82
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,91	4	4	4	755.647.859	562.054.336	4,38



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG	JML PAGU ANGGARAN	JML REALISASI ANGGARAN	%
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	95	1	1	1	2.523.339.581	2.384.863.864	94,51
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	95	5	5	7	7.692.623.765	4.719.153.671	61,35
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	76,13	2	2	2	361.240.097	337.847.294	93,52
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,40	11	12	14	55.179.586.123	47.404.300.311	85,91
		Indeks Pertanaman	235	2	2	2	262.917.342	189.275.573	71,99
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	4	6	10	56.264.712.238	51.262.913.962	91,11
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	0,31	5	5	8	850.669.795	843.562.038	99,16
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	90,58	12	24	53	171.268.199.568	153.986.933.148	89,91
18	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	97	9	14	21	10.179.226.452	8.325.957.042	81,79
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	75,00	4	4	6	6.745.030.189	6.423.725.631	95,24
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	29,00	1	1	1	101.526.086	99.421.284	97,93
Total				105	149	289	1.119.108.803.765	904.057.417.690	80,78



3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Kriteria penilaian dari analisis efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 99% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 99%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Analisis efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi sasaran dengan realisasi anggaran. Kriteria penilaian analisis efektivitas yaitu: Nilai positif berarti efektif (semakin tinggi nilainya berarti semakin efektif program dan kegiatan dalam mencapai sasaran), sedangkan nilai minus (negatif) berarti tidak efektif. Hasil Analisis efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran seperti tabel berikut :

Tabel 3.31
Hasil analisis Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan
di Kabupaten Badung Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEK TIVITAS	EFISI ENSI
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	-	-	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan	95,77	82,71	13	Tidak Efisien



No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEK TIVITAS	EFISI ENSI
		dan pelestarian budaya				
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	104,15	57,03	47	Efisien
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	-	78,34	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	-	10,78	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	58,36	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100,32	82,68	18	
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indek Kebahagiaan	-	90,31	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	-276,67	37,82	-314	Tidak Efisien
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	135,27	74,38	61	Efisien
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	105,26	94,51	11	Efisien
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	105,26	61,35	44	Efisien
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	125,48	93,52	32	Efisien



No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEK TIVITAS	EFISI ENSI
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	96,42	78,95	17	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	100	91,11	9	Efisien
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	-2.035	99,16	-2.135	Tidak Efisien
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	110	89,91	20	Efisien
18	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	89,48	81,79	8	Tidak Efisien
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	99,20	95,24	4	Efisien
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	80,17	97,93	-18	Tidak Efisien
Total			-54,30	80,78	-145	Tidak Efisien

3.5. PRESTASI/PENGHARGAAN

Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya yang sungguh-sungguh tersebut diapresiasi oleh pemerintah pusat serta pihak-pihak terkait dalam bentuk penghargaan dan prestasi. Kabupaten Badung tahun 2021 mendapat 14 penghargaan/prestasi, secara rinci seperti tabel berikut :



Tabel 3.32
Penghargaan/Prestasi Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Penghargaan Kabupaten Layak Anak 2021 Kategori Nindya	Melindungi Dan Memenuhi Hak - Hak Anak Secara Berkelanjutan	29 Juli 2021	Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA)
2	Badung Raih Penghargaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021	Komitmen Terhadap Perlindungan Anak Dan Pelaporan Berbasis Sistem Monitoring Dan Evaluasi Perlindungan Anak (Simep), Dengan Indikator Komitmen Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak,	22 Juli 2021	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
3	Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Internasional Untuk Mengenang Dan Memberi Penghormatan Kepada Korban Terorisme Bom Bali 1 Dan 2	Penanganan Dan Pemulihan Korban Terorisme Bom Bali 1 Dan 2	21 Agustus 2021	
4	Badung Raih Opini Wtp 7 Kali Berurut-Turut	Penandatanganan Kesepakatan Nota Kerjasama Dan Kolaborasi Sebagai Wujud Komitmen Antara Kanwil Direktorat Pembendaharaan Provinsi Bali Dengan Pemkab Badung Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	28 Agustus 2021	Kanwil Direktorat Pembendaharaan Provinsi Bali
5	Badung Raih Dua Penghargaan Desa Wisata Di Ajang Trisakti Tourism Award 2021	Mendorong Pemerintah Desa Dan Masyarakatnya Untuk Menunjang Pariwisata	26 Agustus 2021	DPP PDI Perjuangan
6	10 Besar Terbaik Nasional Dalam Keterbukaan Informasi Publik	Peringatan Hasi Hak Untuk Tahu Sedunia Tahun 2021	28 September 2021	Ketua Komisi Informasi (KI)
7	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	29 September 2021	Kementerian PPPA
8	Penghargaan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba)	Program P4GN	10 September 2021	Kepala BNN Golose



NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
9	Penganugerahan STBM Award Tahun 2021	Keberhasilan Pemkab Badung Dalam Mengubah Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Serta Kemampuan Dalam Melahirkan Inovasi-Inovasi Baru Berbasis 5 Pilar Stbm	15 Oktober 2021	Wakil Menteri Kesehatan RI
10	Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2021	Penetapan Kawasan Wisata Di Kabupaten Badung	02 November 2021	Kemeparkraf RI
11	Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 Kategori <i>Outstanding Achievement Of Public Service Innovation</i>	Patriot (Pendeteksi Area Tangkapan Ikan Menggunakan <i>Sistem Internet Of Things</i>)	09 November 2021	Kemenpan RB
12	Juara 1 Desa Konten Kreatif Dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021	Desa Konten Kreatif	07 Desember 2021	Kemeparkraf RI
13	Anugerah Meritokrasi Kategori Baik	Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Asn	07 Desember 2021	Ketua Kasn RI
14	Penghargaan Internasional Khusin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI)	Khusin Ryu M Karatedo Indonesia (KKI)	08 Desember 2021	Khusin Ryu M Karatedo Indonesia (KKKI) Provinsi
15	Penghargaan Dari Kpk Kategori Pemerintah Daerah Yang Mampu Memperoleh Dana Insetif Daerah (DID) Tahun 2020-2021	Mempertahankan Dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan, Pelayanan Umum Pemerintah, Pelayanan Dasar Publik Serta Kesejahteraan Masyarakat	09 Desember 2021	KPK
16	Penghargaan Terbaik Untuk Dimensi <i>Smart Economy</i>	Pencapaian Penyusunan Masterplan Dan Implementasi Program Kota Cerdas (Aplikasi Fish Go) Melalui Dimensi Smart Economy	14 Desember 2021	Kemenkominfo RI
17	Penghargaan Juara 1 Kategori Pemerintah Kabupaten Terkait Kinerja Bidang Kebinamargaan Dalam Penyelenggaraan Jalan Dari Kementerian PUPR	Komit Sediakan Infrastruktur Jalan Memadai	20 Desember 2021	Menteri PUPR



NO	PENGHARGAAN	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
18	Badung Raih Anugerah Kebudayaan Indonesia (Aki) Tahun 2021	Lembaga Beredikasi Terhadap Kebudayaan	23 Desember 2021	Tim Penilai Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

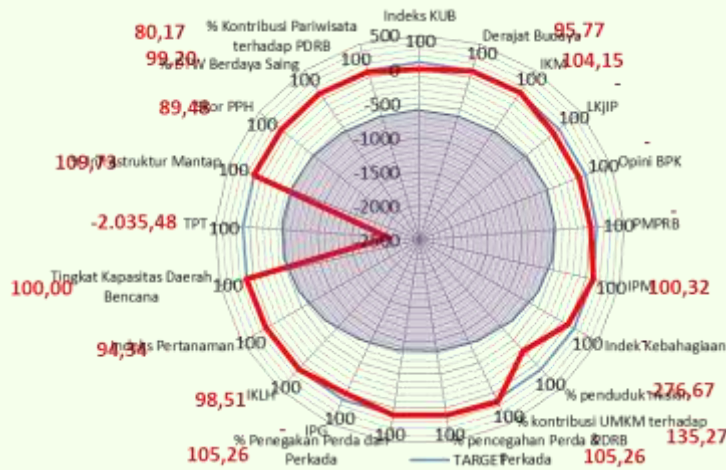
Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan maka dapat disimpulkan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2021, seperti berikut :

1. Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Badung terhadap capaian kinerja sasaran strategis sesuai RPJMD Semesta Berencana 2016-2021 beserta keberhasilan dan kegagalan serta perkembangan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai perbandingan kinerja.
2. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016-2021 mencakup 9 misi yang dijabarkan menjadi 13 tujuan, 20 sasaran dan 21 indikator kinerja utama (IKU).
3. Pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD. Hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2021 terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang tidak bisa/belum dapat diukur kinerjanya, yaitu:
 - a. Indikator kinerja yang tidak dilaksanakan survei oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, sebanyak 2 IKU meliputi : **Indeks kerukunan umat beragama dan Indek Kebahagiaan**. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengukuran indikator ini oleh karena pengumpulan data harus dilakukan melalui survei, sehingga dengan kondisi pandemi COVID-19, kegiatan survei/pengumpulan data dari masyarakat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dan adanya refocusing anggaran terhadap program/kegiatan/sub kegiatan.
 - b. Indikator yang belum terbit hasil evaluasinya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) meliputi : **Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten** dan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** oleh kementerian PAN-



RB serta **Opini BPK** masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

4. Hasil capaian kinerja tujuan RPJMD terhadap 17 indikator, rata-rata sebesar -105,10%. Hal ini disebabkan karena dua indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu tingkat kemiskinan sebesar -276,67% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar -2.035,48%.
5. Hasil pengukuran indikator tujuan sebanyak 17 indikator kinerja diperoleh hasil seperti berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 6 indikator kinerja utama (35,29%)
 - b. dibawah target (<100%) sebanyak 6 indikator kinerja utama (35,29%)
 - c. Tidak ada Hasil pengukuran sebanyak 5 indikator kinerja utama (29,41%)
6. Hasil capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dari 21 indikator kinerja utama (IKU) rata-rata sebesar -54,31%. Hal ini disebabkan karena dua indikator dengan nilai minus diatas 100% yaitu tingkat kemiskinan sebesar -276,67% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar -2.035,48% sehingga mempengaruhi nilai rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan.
7. Hasil pengukuran terhadap 21 indikator kinerja utama diperoleh hasil seperti berikut :
 - a. Melebihi target (>100%) sebanyak 7 indikator kinerja utama (33,33%)
 - b. Sesuai target (100%) sebanyak 1 indikator kinerja utama (4,76%)
 - c. dibawah target (<100%) sebanyak 8 indikator kinerja utama (38,10%)
 - d. Tidak ada Hasil pengukuran sebanyak 5 indikator kinerja utama (23,81%)
8. Hasil pengukuran indikator kinerja utama (IKU) terhadap 16 indikator menunjukkan indicator dengan capaian dibawah target yaitu sebanyak 8 indikator (50%) dan 8 indikator telah mencapai target atau diatas target (>100%) sebesar 50%.
9. Hasil pengukuran indikator dengan nilai minus yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini disebabkan dampak pandemi COVID 19 terhadap sektor pariwisata Kabupaten Badung.
10. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2021 sebesar Rp. 1.119.108.803.765 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 904.057.417.689,86 sehingga persentase penyerapan sebesar 80,78%.
11. Hasil capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD semesta berencana 2016-2021 untuk tahun 2021 seperti berikut :



4.2. UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Secara keseluruhan capaian kinerja pada tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan indikator kinerja yang dapat diukur terdapat 8 sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, maka Pemerintah Kabupaten Badung akan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja sesuai target RPJMD semesta berencana 2016-2021 antara lain :

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelestarian adat dan budaya melalui :
 - a. Pemberian bantuan kepada desa adat dalam pelaksanaan upacara yadnya pemberian bantuan kepada lembaga adat, lembaga kesenian, dan pelaku seni.
 - b. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada desa adat dan lembaga kesenian dengan crosscutting program dengan OPD lain dalam hal pelestarian adat, seni dan Budaya
 - c. Pemberian bantuan operasional terhadap subak di Kabupaten badung
 - d. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap seluruh subak yang ada di kabuapten badung
 - e. Adanya *crosscutting* program dengan OPD lainnya dalam hal pelestarian subak
 - f. pemberian bantuan anggaran untuk pemeliharaan/perawatan warisan budaya.



2. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis menurunnya angka kemiskinan melalui :
 - a. Melaksanakan validasi data masyarakat miskin sebagai dampak pandemic covid 19
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar (pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan)
 - c. pemberdayaan ekonomi rumah tangga sasaran melalui pelatihan keterampilan, pemberian bantuan untuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP)
 - d. Penertiban, pembinaan dan rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

3. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan melalui :
 - a. Mengendalikan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
 - b. Mengurangi Daerah Rawan bencana dengan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
 - c. Memprioritaskan cara pengelolaan persampahan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Badung
 - d. Pemantauan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Badung
 - e. Membangun TPS 3R/TPA di tempat yang wilayah-wilayah desa/kelurahan yang sudah tersedia lahan
 - f. Membangun taman berkualitas internasional yang berwujud bersih dan hijau di Kabupaten Badung
 - g. Meningkatkan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Melaksanakan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

4. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks pertanian melalui :
 - a. Meningkatkan intensifikasi tanaman
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
 - c. Meningkatkan pendampingan Penyuluh untuk pemanfaatan pekarangan



- d. Pembangunan/rehab saluran irigasi/pengairan serta pembuatan embung untuk menampung air (pembangunan sumber-sumber air).
5. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing tenaga kerja melalui :
 - a. Melaksanakan pembinaan terhadap pembuatan Peraturan Perusahaan dan pengesahannya.
 - b. Melakukan pembinaan tentang norma-norma ketenagakerjaan secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri
 - d. Meningkatkan sosialisasi sistem informasi industri dan tenaga kerja (SIINAGA) yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh pencari kerja untuk mencari lowongan pekerjaan dan bagi pengguna tenaga kerja (perusahaan)
 - e. Melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dengan 8 standar mutu LPK
 - f. Melakukan verifikasi administrasi dan visitasi lapangan ke lokasi LPKS (pemohon) yang didukung dengan anggaran
 6. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani dengan indikator skor pola pangan harapan melalui:
 - a. Meningkatkan sosialisasi mengenai keanekaragaman konsumsi makanan dan gizi seimbang.
 - b. Meningkatkan pengolahan hasil pertanian dan perikanan sehingga memberi nilai tambah
 - c. Menumbuhkan gerakan generasi muda sebagai petani dan nelayan
 - d. Mengalakkan asuransi pertanian, meningkatkan pertanian organik.
 - e. Meningkatkan produksi hewani dan produksi ikan tangkap/budidaya
 7. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing dengan indikator persentase daya tarik wisata yang berdaya saing melalui:
 - a. Penerapan Protokol Kesehatan CHSE (*Cleanliness, Hygiene, Safety, Environment*) pada obyek wisata/DTW
 - b. Memperketat protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan obyek wisata destinasi atau atraksi budaya, dengan penyediaan kelengkapan protocol kesehatan bagi wisatawan, seperti masker *hand sanitizer* dan wastafel dan sumber daya manusia pariwisata. Penyediaan fasilitas kesehatan serta pelengkap lainnya seperti ruang karantina mandiri,



thermal detector, rapid test kit.

- c. Penyusunan kebijakan transportasi kepariwisataan untuk kepastian perjalanan wisatawan.
8. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB melalui :
- a. Pengembangan obyek wisata berbasis masyarakat seperti desa wisata
 - b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata pedesaan
 - c. Meningkatkan manajemen pengelolaan obyek wisata
 - d. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pedesaan
 - e. Mengadakan promosi obyek wisata secara elektronik atau melalui kegiatan gebyar wisata,
 - f. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan obyek wisata dan lingkungannya.

Mangupura, 29 Maret 2022

Bupati Badung,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Lampiran I :

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4	Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5	Opini BPK	Nilai	WTP
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8	Indek Kebahagiaan	Nilai	75,51
9	Menurunnya angka kemiskinan	9	Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	%	95
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13	Indeks pembangunan gender (PG)	Nilai	76,13
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14	Indeks kualitas lingkungan hidup (KLH)	Nilai	69,4
		15	Indeks Pertanaman (IP)	Nilai	235
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58
18	Meningkatnya produksi pangan harapan	19	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29

Lampiran II :
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	1.	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	78,45	-	Tidak dilaksanakan survei
2.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	2.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	%	90	86,19	95,77
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3.	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82	85,4	104,15
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4.	Nilai akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Nilai	80,01	-	Data Belum Terbit
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	5.	Opini BPK	Nilai	WTP	-	Data Belum Terbit
6.	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	75	-	Data Belum Terbit
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,57	81,83	100,32
8.	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8.	Indeks Kebahagiaan	Nilai	75,51	-	Tidak dilaksanakan survei
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9.	Persentase penduduk miskin	%	0,60-0,40	2,62	-276,67
10.	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10.	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	%	7,91	10,70	135,27
11.	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11.	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	%	95	100	105,26
12.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	95	100	105,26

NO	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
13.	Meningkatnya pengarusutamaan gender	13.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	76,13	95,53	125,48
14.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14.	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai	69,40	68,37	98,51
		15.	Indeks Pertanaman	Nilai	235	221,69	94,34
15.	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	16.	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai	Level 4	Level 4	100,00
16.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	17.	Tingkat Pengangguran terbuka	%	0,31	6,93	-2035,48
17.	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	18.	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	90,58	99,39	109,73
18.	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	97	86,8	89,48
19.	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	20.	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	%	75,00	74,4	99,20
20.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21.	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	29,00	23,25	80,17
Total Kinerja							-868,93
Rata-rata Kinerja							-54,31



Lampiran III :
**Hasil Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Strategis Pemerintah
Kabupaten Badung Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG	JML PAGU ANGGARAN	JML REALISASI ANGGARAN	%
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	78,45	1	1	1	0	0	0
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	90	5	7	17	83.159.466.730	68.783.869.733	82,71
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	21	34	69	107.369.220.996	61.235.767.615	57,03
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	80,01	3	3	5	287.386.801	225.139.972	78,34
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP	3	4	6	943.730.350	101.750.962	10,78
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	75	1	2	5	2.124.340.494	1.239.696.070	58,36
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	81,57	3	7	38	440.083.900.540	363.874.087.404	82,68
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indek Kebahagiaan	75,51	3	4	10	126.976.584.885	114.667.317.071	90,31
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	0,60	5	7	9	45.979.453.874	17.389.780.709	37,82
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,91	4	4	4	755.647.859	562.054.336	4,38



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JML PROG	JML KEG	JML SUB KEG	JML PAGU ANGGARAN	JML REALISASI ANGGARAN	%
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	95	1	1	1	2.523.339.581	2.384.863.864	94,51
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	95	5	5	7	7.692.623.765	4.719.153.671	61,35
13	Meningkatnya pengarasutamaan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	76,13	2	2	2	361.240.097	337.847.294	93,52
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,40	11	12	14	55.179.586.123	47.404.300.311	85,91
		Indeks Pertanaman	235	2	2	2	262.917.342	189.275.573	71,99
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	4	6	10	56.264.712.238	51.262.913.962	91,11
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	0,31	5	5	8	850.669.795	843.562.038	99,16
17	Meningkatnya intrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	90,58	12	24	53	171.268.199.568	153.986.933.148	89,91
18	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	97	9	14	21	10.179.226.452	8.325.957.042	81,79
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	75,00	4	4	6	6.745.030.189	6.423.725.631	95,24
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	29,00	1	1	1	101.526.086	99.421.284	97,93
Total				105	149	289	1.119.108.803.765	904.057.417.690	80,78



**Lampiran IV :
Hasil Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Kabupaten
Badung Tahun 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEK TIVITAS	EFISI ENSI
1.	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	-	-	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur
2	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	95,77	82,71	13	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	104,15	57,03	47	Efisien
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori akuntabilitas Kinerja Kabupaten	-	78,34	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	-	10,78	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	58,36	Belum dapat Diukur	Belum dapat Diukur
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100,32	82,68	18	
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indek Kebahagiaan	-	90,31	Tidak Dapat Diukur	Tidak Dapat Diukur
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	-276,67	37,82	-314	Tidak Efisien
10	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	135,27	74,38	61	Efisien

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	REALISASI SASARAN	REALISASI ANGGARAN	EFEK TIVITAS	EFISI ENSI
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda & Perkada	105,26	94,51	11	Efisien
12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	105,26	61,35	44	Efisien
13	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	125,48	93,52	32	Efisien
14	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	96,42	78,95	17	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	100	91,11	9	Efisien
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	-2.035	99,16	-2.135	Tidak Efisien
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	110	89,91	20	Efisien
18	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	89,48	81,79	8	Tidak Efisien
19	Meningkatnya daya Tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya Tarik wisata yang berdaya saing	99,20	95,24	4	Efisien
20	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	80,17	97,93	-18	Tidak Efisien
Total			-54,30	80,78	-145	Tidak Efisien



LAMPIRAN V :

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	1 Meningkatkan toleransi hidup beragama	1. Indek kerukunan umat beragama	Survey : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah dan 4)Potensi lokal	Balitbang, Bakesbangpol, Disbud, Setda (Bag.Kesra)
			2 Meningkatkan pelestarian adat dan budaya	2 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (Jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	Disbud, Bapenda/Pasedahan Agung



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
2 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3 Indeks kepuasan masyarakat	Survey indeks kepuasan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
3 Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	3 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	4 Katagori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Setda (Bagian Organisasi), Inspektorat, Bappeda
	4 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik Daerah	5 Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan	BPKAD, Inspektorat, Setda (Bag.Pembanguna), seluruh Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
	5 Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	6 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Katagori Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)
4 Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	6 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	7 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	7 Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	Balitbang, Disdikpora, Diskes, Diskop UKMP, SRUD
	7 Indek kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	8 Indeks Kebahagiaan	Survey tingkat kebahagiaan masyarakat	Balitbang, Seluruh Perangkat Daerah
	8 Tingkat Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	9 Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	Dinsos, Bappeda, Seluruh Perangkat Daerah



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
5 Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	9 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	10 Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	10 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	Diskop UKMP, Disperinaker, Setda (Bag.Perekonomian)
6 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	10 Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	11 Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	11 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham), seluruh Kecamatan
			12 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	12 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	Satpol PP, Bakesbangpol, Seta (Bagian Hukum dan Ham)



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
7 Terwujudnya Pengarasutamaan Gender	11 Indeks Pembangunan Gender	$IPG = 1/3(X + Y + Z)$ Dimana : Xede(1):Xede untuk harapan hidup, Xede(2):Xede untuk harapan pendidikan, I(inc-dls):Indeks distribusi pendapatan	13 Meningkatnya pengarusutamaan gender	13 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dimana: Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dls): Indeks distribusi pendapatan	DP2KBP3A, Balitbang, Disperinaker, Dinsos, Seluruh Perangkat Daerah
8 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	12 Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/lahan	14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Penghitungan Indikator dari : Indeks Kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	DLHK, DPKP, DPUPR, Diskes
				15 Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam dibagi luas lahan x 100% (dalam setahun)	Satpol PP, Disperpa, Setda (Bag.SDA)



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
9 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	13 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah pemenuhan kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	15 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	16 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	BPBD, DPUPR, DPKP, Dinsos, Diskarmat, Satpol PP, Diskes, RSUD
10 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	14 Tingkat pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	16 Meningkatkan daya saing tenaga kerja	17 Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	Disperinaker, Bappeda, Dispar, Dinsos, Diskop UKMP
11 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	15 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	17 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas	18 Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	DPUPR, Disbud, Bappeda, DPKP, Diskominfo, Setda(Bag. Pembangunan)
12 Meningkatnya ketersediaan pangan	16 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	18 Meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani	19 Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	Disperpa, Diskan, DPUPR



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Penanggungjawab Perangkat Daerah baru
13 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	17 Indeks daya saing destinasi pariwisata	Suevei indeks daya saing dstinasi pariwisata	19 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	20 Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	Dispar, DPUPR, Disbud
			20 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	21 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%	Dispar, Disbud, Diperpa, Diskan, Diskominfo, Diskes, DLHK, PUPR

